

ACTION PLAN

PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2018



**Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung
2014**



KATA PENGANTAR

Action Plan PD Kebersihan Kota Bandung merupakan rencana kerja program setiap tahun secara terinci dengan mengacu pada rencana strategis PD Kebersihan yang lebih operasional dan lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah.

Sesuai dengan Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan 2012 – 2016 adalah : “Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Adapun rencana kerja yang diuraikan setiap tahun telah disesuaikan dengan dokumen *corporate plan*, RPJMD Kota Bandung dan perkembangan serta permasalahan penanganan sampah yang harus ditindaklanjuti saat ini. Sebagaimana evaluasi kinerja PD Kebersihan Kota Bandung, untuk lebih jelasnya rencana tindak lanjut 2014 – 2018 diuraikan dalam 5 aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan dan SDM
2. Aspek Peraturan
3. Aspek Keuangan
4. Aspek Teknik dan Operasional
5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Semoga laporan ini dapat bermanfaat demi “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”

DIREKTUR UTAMA

CECE H ISKANDAR

DAFTAR ISI

| | | Hal |
|---------|---|--------|
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan Penyusunan | I-2 |
| 1.3 | Sistematika Pelaporan | I-2 |
| BAB II | KEBIJAKAN STRATEGIS | II-1 |
| 2.1 | Visi dan Misi PD. Kebersihan | II-1 |
| 2.2 | Tujuan dan Sasaran | II-3 |
| 2.3 | Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 | II-6 |
| BAB III | KONDISI PD.KEBERSIHAN TAHUN 2013 | III-1 |
| 3.1 | Kelembagaan | III-1 |
| 3.1.1 | Kedudukan PD Kebersihan | III-1 |
| 3.1.2 | Tugas Pokok dan Fungsi PD Kebersihan | III-2 |
| 3.1.3 | Struktur Organisasi PD Kebersihan dan Komposisi Jumlah Pegawai | III-2 |
| 3.2 | Peraturan | III-8 |
| 3.3 | Pembiayaan | III-10 |
| 3.3.1 | Perkembangan Keuangan Perusahaan Tahun 2013 | III-11 |
| 3.3.1.1 | Kenaikan Tarif | III-11 |
| 3.3.2 | Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Perusahaan | III-34 |
| 3.4 | Kegiatan Penagihan Jasa Pelayanan Kebersihan | III-34 |
| 3.5 | Pelanggan/Wajib Bayar Jasa Pelayanan Kebersihan | III-36 |
| 3.5.1 | Pelanggan/Wajib Bayar Kategori Rumah Tinggal | III-37 |
| 3.5.2 | Pelanggan Kategori Komersial | III-38 |
| 3.5.3 | Pelanggan Kategori Non Komersial | III-40 |
| 3.5.4 | Pelanggan Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap (PKL) | III-41 |
| 3.5.5 | Pelanggan Angkutan Umum | III-43 |

| | | |
|--------|---|---------|
| 3.6 | Teknik dan Operasional | III-46 |
| 3.6.1 | Sistem Operasional Pelayanan | III-46 |
| 3.6.2 | Wilayah Operasional | III-54 |
| 3.6.3 | Peningkatan serta Optimalisasi Prasarana dan Sarana Operasional Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah | III-55 |
| 3.6.4 | Upaya dalam Mengefektifkan dan Mengefisiensikan Pengangkutan Sampah ke TPA melalui Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tegallega | III-56 |
| 3.6.5 | Upaya Pengurangan Sampah Yang dibuang ke TPA | III-56 |
| 3.6.6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 3R | III-64 |
| 3.6.7 | Kendala dan Upaya Kegiatan Operasional Pelayanan Pengelolaan Sampah | III-65 |
| 3.7 | Peran Serta Masyarakat | III-66 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS KINERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG..... | IV-1 |
| 4.1 | Kinerja Keuangan PD. Kenersihan | IV - 1 |
| 4.1.1 | Database Wajib Bayar dan Kontribusi Terbesar Pendapatan Tarif Jasa Kebersihan | IV - 2 |
| 4.1.2 | Pencatatab Pos Subsidi Dalam Pendapatan Non – Operasional Serta Urgensi Perhitungan Detail Beban Pengelolaan Sampah Sebagai Dasar Subsidi | IV - 4 |
| 4.1.3 | Sumber Pendapatan Dari Kompos | IV - 7 |
| 4.1.4 | Potensi Peningkatan Pendapatan Dari Rumah Tangga | IV - 8 |
| 4.1.5 | Efisiensi Operasional Melalui Pemilahan Sampah di Sumber | IV - 10 |
| 4.1.6 | Kesesuaian Tarif Jasa Dengan Kondisi Riil Biaya Pengelolaan Sampah | IV - 12 |
| 4.1.7 | Kondisi Hutang Luar Negeri | IV - 14 |
| 4.1.8 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan | |

| | | |
|-------|--|---------|
| | Melalui Sinergitas dengan Instansi Terkait | IV - 15 |
| 4.2 | Analisis Kinerja Operasional | IV - 16 |
| 4.2.1 | Proses Pemilahan Sampah di Sumber | IV - 16 |
| 4.2.2 | Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana | IV - 17 |
| 4.2.3 | Proses Penyapuan dan Pengangkutan Hasil Penyapuan | IV - 18 |
| 4.2.4 | Pemanfaatan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Pengelolaan Sampah | IV - 19 |
| 4.2.5 | Penjadwalan Pengmpulan Sampah Berdasarkan Jenisnya | IV - 20 |
| 4.2.6 | Sosialisasi Pemilahan Sampah di Sumber | IV - 20 |
| 4.2.7 | Implementasi Inovasi Proses Melalui Business Process Reengineering (BPR) | IV - 23 |
| 4.3 | Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia | IV - 23 |
| 4.3.1 | Aspek Pengembangan Organisasi | IV - 31 |
| BAB V | RENCANA PENCAPAIAN TARGET PERTAHUN | V-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah kota merupakan kebutuhan prasarana dasar yang harus dipenuhi dalam kerangka pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan. Permasalahan yang diakibatkan oleh peningkatan volume timbulan sampah kota semakin hari semakin kompleks, tidak hanya menyangkut permasalahan teknis operasional tetapi menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Penanganan sampah di Kota Bandung dilaksanakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung. PD Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terakhir telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang PD Kebersihan. Maksud dan tujuan didirikannya PD Kebersihan ini berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 adalah :

- (1) Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 - a) Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
 - b) Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - c) Pelayanan kebersihan;
 - d) Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
 - e) Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.
- (2) Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka menunjang pembangunan dan

memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Action Plan PD Kebersihan ini adalah untuk menyusun rencana kerja program setiap tahun secara terinci dengan mengacu pada rencana strategis PD Kebersihan yang lebih operasional dan lebih menitik berat kan pada pemecahan masalah.

Tujuan dari penyusunan Action Plan PD Kebersihan ini adalah:

- Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menurunkan rencana strategis pengelolaan sampah kedalam rencana operasional yang aktif dan nyata khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam menjalankan tugas yang menitik beratkan pada pemecahan masalah yang aktif dan nyata.

1.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika pelaporan

Bab II: Kebijakan Strategis

Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandung

Bab III : Kondisi PD. Kebersihantahun 2013

Menjelaskan pencapaian program kerja perusahaan tahun 2013 dan kondisi perusahaan dilihat dari berbagai aspek

Bab IV : Analisis Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung

Bab ini menjelaskan hasil analisis kinerja PD Kebersihan Tahun 2014 yang menjadi salah satu dasar perbaikan dan perencanaan program kegiatan selama 5 tahun kedepan yang terangkum dalam analisis kinerja sebagai berikut :

- 4.1. Analisis Kinerja Keuangan PD. Kebersihan
- 4.2. Analisis Kinerja Operasional
- 4.3. Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia

Bab V : Rencana Pencapaian Target Per tahun

Menjelaskan rencana kerja setiap tahun dari mulai tahun 2014 – tahun 2018.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi PD Kebersihan

Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan 2012 – 2016 adalah : "Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan **dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat**".

Makna Perusahaan Profesional adalah :

Perusahaan yang secara mandiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini operasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan memenuhi harapan stakeholder.

Makna Pengelolaan Sampah Terpadu adalah :

Pengelolaan sampah dalam satu sistem yang terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis dengan sasaran berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Sistem tersebut adalah:

1. Mengurangi atau mencegah munculnya sampah (*Reduce*) : membantu rumah tangga dan komersial untuk mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan.
2. Menggunakan kembali sampah (*Reuse*) : menggunakan kembali sampah sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan sampah.
3. Mendaur ulang sampah (*Recycle*) : mengolah sampah ke dalam bentuk lain yang bermanfaat.

4. Mengembangkan sumber energi (*energy recovery*) : menghasilkan energi dari sampah menggunakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan.
5. Pemrosesan sampah (*disposal*) : mengelola sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali ke tempat pemrosesan akhir yang dikelola secara berkelanjutan

Makna Solusi Inovatif yang Bernilai Lebih adalah :

Operasi dari PD Kebersihan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan persampahan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat tanpa menimbulkan permasalahan baru dan dapat memberikan nilai ekonomis dari setiap solusi yang diberikan.

Makna Berkelanjutan adalah :

Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah mempertimbangkan:

1. Konservasi sumber daya alam
2. Menghindari emisi buang yang tidak diperlukan dan/ atau berbahaya
3. Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem

Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar.

Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

2. Menjalankan operasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan
3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder
4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas.
5. **Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat**

Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain:

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (*environmental concern*)
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*)
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual benefit partnership*)
4. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis kompetensi pengelolaan sampah kota.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam manajemen Perusahaan Daerah.

- b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.

Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber.
- b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.
- c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses pengelolaan sampah.
- d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan dan kegiatan 3 R.
- e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skala kota yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan penagihan.
- b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.
- c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun non operasional.
- d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.

Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Tujuan :

Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah
- b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan “cleaning service”
- c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Tujuan :

Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

- a. Meningkatkan peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah kota
- c. Meningkatkan peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah sebagai berikut :

- 1. Strategi** pertama implementasinya adalah Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi tersebut maka arah kebijakan :
 - Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestic dan pemerintah).
 - Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW
 - Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.
 - Gerakan zero waste home
 - Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah tanah
 - Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW (berteknologi biodigester).

- Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal ataupun terpusat.
 - Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah
 - Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan.
1. **Strategi kedua** yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014 - 2018 sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta dokumen Corporate Plan PD Kebersihan, untuk itu PD. Kebersihan Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2014 telah menyusun penyusunan Action Plan Tahun 2014 - 2018 yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan segala keterbatasannya. Action Plan ini merupakan rencana kerja program setiap tahun secara terinci dengan mengacu pada rencana strategis PD Kebersihan yang lebih operasional dan lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah.

BAB III

KONDISI PD KEBERSIHAN TAHUN 2013

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kebersihan sebagai lembaga pengelola sampah di Kota Bandung yang menyelenggarakan kegiatannya dibidang penanganan sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2011, maka kondisi dan realisasi program pelaksanaannya telah dilakukan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

3.1 Kelembagaan

Perusahaan Daerah Kebersihan adalah lembaga yang mengelola persampahan di Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung jo Peraturan Daerah No.02/PD/1985 tentang Pembentukan Daerah Kebersihan Kotamadya Dati II Bandung jo Peraturan Daerah No.15 Tahun 1993 dan pada tahun 2011 telah diganti menjadi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan. Demikian pula sesuai Perda 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 7 bahwa Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga **Pemerintah Daerah Kota Bandung menunjuk PD Kebersihan.**

3.1.1 Kedudukan PD Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, PD Kebersihan adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan di Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, bahwa PD Kebersihan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidanusaha jasa pelayanan kebersihan,

yang dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi PD Kebersihan

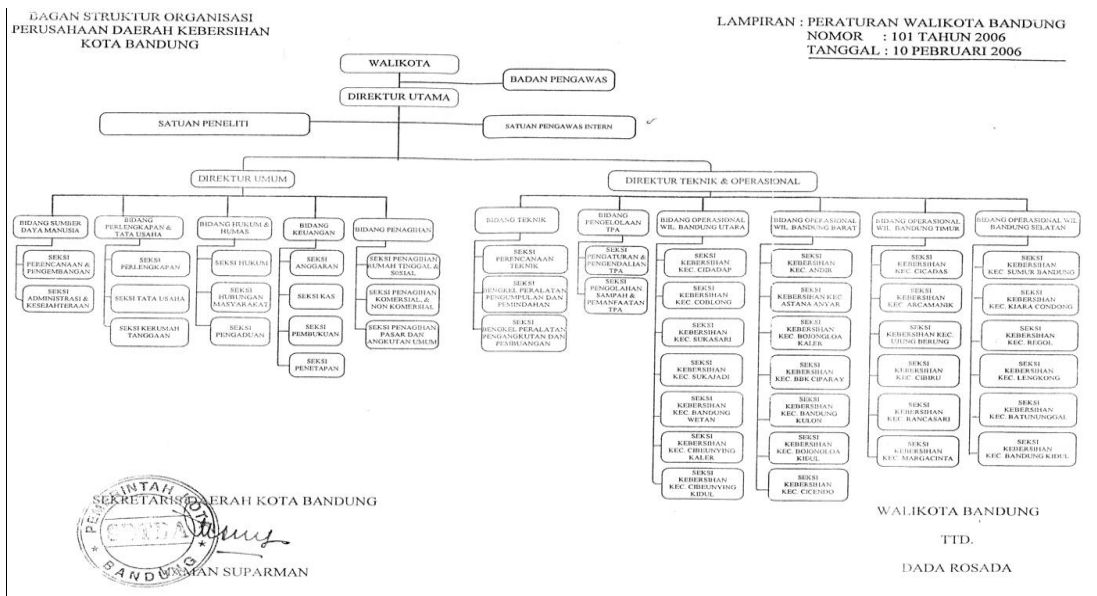
Tugas Pokok PD.Kebersihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006, adalah “Menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan“.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka PD Kebersihan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visi dan misi Kota Bandung.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di bidang persampahan kota meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan akhir.
- c. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan di bidang persampahan.

3.1.3 Struktur Organisasi PD Kebersihan dan Komposisi Jumlah Pegawai

Berikut merupakan struktur organisasi PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 101 Tahun 2006:



a. Badan Pengawas

Badan Pengawas PD Kebersihan memiliki tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya perusahaan. Badan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Badan Pengawas juga bertugas memberikan laporan, pendapat dan saran kepada Walikota.

b. Direktur Utama

Direktur Utama membawahkan Direktur Umum dan Direktur Teknik Operasional, Satuan Peneliti dan Satuan Pengawas Intern

c. Direktur Umum, membawahkan :

1. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan
 - b) Seksi Administrasi dan Kesejahteraan
2. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Seksi Perlengkapan
 - b) Seksi Tata Usaha

- c) Seksi Kerumahtanggaan
- 3. Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Seksi Hukum
 - b) Seksi Hubungan Masyarakat
 - c) Seksi Pengaduan
- 4. Bidang Keuangan, membawahkan :
 - a) Seksi Anggaran
 - b) Seksi Kas
 - c) Seksi Pembukuan
 - d) Seksi Penetapan
- 5. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - a) Seksi Penagihan Rumah Tinggal dan Sosial
 - b) Seksi Penagihan Pasar dan Angkutan Umum
 - c) Seksi Penagihan Komersial dan Non Komersial

d. Direktur Teknik dan Operasional, membawahkan :

- 1. Bidang Teknik, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknik
 - b) Seksi Bengkel Peralatan Pengumpulan dan Pemindahan
 - c) Seksi Bengkel Peralatan Pengangkutan dan Pembuangan
- 2. Bidang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir, membawahi :
 - a) Seksi Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pembuangan Akhir.
 - b) Seksi Pengolahan Sampah dan Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir
- 3. Bidang Ops. Wilayah Bandung Utara, membawahkan : Seksi Kebersihan Kecamatan : Cidadap, Coblong, Sukasari, Sukajadi, Bandung Wetan, Cibeunying Kaler dan Kecamatan Cibeunying Kidul
- 4. Bidang Ops. Wilayah Bandung Barat, membawahkan : Seksi kebersihan Kecamatan : Andir, Astanaanyar, Bojongloa Kaler,

Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul dan Kecamatan Cicendo.

5. Bidang Ops. Wilayah Bandung Timur, membawahkan : Seksi kebersihan Kecamatan : Cicadas, Arcamanik, Ujung Berung, Cibiru, Rancasari dan Kecamatan Margacinta.
6. Bidang Ops. Wilayah Bandung Selatan, membawahkan : Seksi kebersihan Kecamatan : Sumur Bandung, Kiaracondong, Regol, Lengkong, Batu Nunggal dan Kecamatan Bandung Kidul.

e. Satuan Peneliti

Satuan peneliti berada dibawah Direktur Utama dan secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama.

f. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama.

Komposisi Jumlah Pegawai Tahun 2013

Jumlah pegawai PD Kebersihan pada tahun 2013 berjumlah 1579 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.1. Komposisi Jumlah Pegawai PD Kebersihan tahun 2013

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|--------------|---|--------|
| 1 | Direksi | 2 |
| 2 | Kepala Bidang / Satuan | 12 |
| 3 | Kepala Seksi / Peneliti dan Pengawas Muda | 54 |
| 4 | Kepala Urusan | 55 |
| 5 | Pengawas Lapangan | 55 |
| 6 | Staf / Pelaksana Administrasi | 152 |
| 7 | Penagih dan Pendata | 143 |
| 8 | Penyapu Jalan | 629 |
| 9 | Penyapu Pasar | 44 |
| 10 | Juru Sapu TPA | 3 |
| 11 | Pengemudi | 152 |
| 12 | Kru Angkutan | 209 |
| 13 | Operator Alat Berat | 3 |
| 14 | Operator Mesin Pres Sampah | 5 |
| 15 | Petugas Bengkel | 32 |
| 16 | Petugas TPA | 13 |
| 17 | Petugas Jaga | 16 |
| JUMLAH TOTAL | | 1579 |

Sumber : Bidang SDM PD Kebersihan Data Desember 2013

Pelaksanaan kegiatan dan realisasi program kerja perusahaan yang berkaitan dengan SDMpada tahun 2013 meliputi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai, antara lain:

1. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan pegawai: telah dilakukan kajian sistem penggajian direksi dan badan pengawas dan merubah item tunjangan dalam gaji pegawai yang disesuaikan dengan Perda 14 Tahun 2011 yang akan diberlakukan di tahun 2014, mengikutsertakan pegawai untuk kegiatan seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh instansi lain, serta melakukan pembinaan pegawai.

2. Perbaikan dan penyesuaian tunjangan pegawai: telah dilakukan pemberian gaji ke 13, pemberian SHR serta kenaikan besarannya, kenaikan pangkat dan golongan, kenaikan status pegawai dan kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji pegawai harian, serta pemberian bantuan pengobatan kepada pegawai dan keluarga.

Selama tahun 2013, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan yaitu dilakukan revisi Perwal No.101 Tahun 2006 tentang SOTK PD Kebersihan yang disesuaikan dengan Perda 14 Tahun 2011 yang penyusunannya dibantu oleh LPM UNPAD. Dari sisi sumber daya manusia perusahaan masih harus terus ditingkatkan kualitasnya serta dari sisi kejelasan deskripsi jabatan untuk masing-masing bidang ataupun pegawai. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: Mengikutsertakan pegawai ke dalam pelatihan, seminar/talkshow maupun studi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pada tahun 2013, jumlah pegawai yang mengikuti seminar maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi lain berjumlah 50 orang.

Perkembangan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan seminar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perkembangan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan seminar PD Kebersihan dari Tahun 2009 - 2013

| No | Jenis kegiatan | Tahun | | | | |
|--------|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Diklat dan Bintek | 188 | 50 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Seminar | 18 | 12 | 28 | 20 | 27 |
| 3 | ESQ | 116 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Diklat Pengawasan | - | - | - | - | 15 |
| jumlah | | 322 | 62 | 28 | 21 | 50 |

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pegawai dilakukan pula pembinaan pegawai bagi pegawai yang melanggar peraturan perusahaan, serta rotasi pegawai sesuai kebutuhan perusahaan dan meningkatkan status pegawai sesuai peraturan perusahaan.

Tabel 3.3. Pembinaan Pegawai PD Kebersihan dari Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | Orang (tahun) | | | | |
|----|--|---------------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | pembinaan pegawai | 183 | 75 | 62 | 46 | 23 |
| 2 | Formasi pegawai dan penerimaan pegawai | 13 | 38 | 0 | 11 | 14 |
| 3 | Meningkatkan status pegawai harian menjadi capeg | 0 | 0 | 3 | 14 | 102 |
| 4 | meningkatkan status capeg menjadi peg perusahaan | 0 | 65 | 0 | 7 | 51 |

3.2. Peraturan

Pelaksanaan pengelolaan kebersihan oleh PD Kebersihan didasarkan oleh adanya Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung No.02/PD/1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Dati II Bandung, jo Perda No.15 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung No.02 Tahun 1985. Pada bulan November 2011 telah disahkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Perda No.11 Tahun 2005

4. Keputusan Walikota Nomor 316 Tahun 2013 Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung
5. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan

Sementara itu upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain:

1. Dilakukan upaya tindak lanjut terhadap Perda No.14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
2. Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah melalui penyusunan Raperwal pengelolaan sampah yang dilakukan oleh tim penyusun Raperwal.
3. Perubahan Kepwal No. 644 Tahun 2002 tentang TarifJasa Kebersihan Kota Bandung menjadi Perwal No. 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan pada tanggal 2 April 2013 oleh Bapak Walikota Bandung
4. Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
5. Keputusan Direksi Nomor 974/Kep.40-HH/2013 tentang pemberian uang prestasi bagi pendataan wajib bayar jasa pelayanan kebersihan kategori komersial.
6. Keputusan Direksi Nomor 658.1/Kep.40HH/2013 tentang pembentukan usaha pelayanan jasa pengelolaan sampah (pelayanan khusus).
7. Penyelesaian Penanganan Perkara Gugatan eks TPA Cieunteung dengan diputusnya perkara perdata pada Tingkat Kasasi di Pengadilan negeri Bale Bandung. Sesuai dengan Nota Dinas dari Kuasa Hukum Walikota Bandung Nomor 181.1/2508.Bag.Huk-HAM PD. Kebersihan akan melakukan Rencana Peninjauan

Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan menyiapkan Novum (bukti baru) diantaranya Surat Keterangan dari Balai Besar waduk Sungai Citarum (BBSW), bukti pembayaran pajak atas nama Hj. Sundiyah dan perlu adanya pengecekan sertifikat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan lahan Ex TPA Cienteung.

8. Dari Total 1561 RW yang ada di Kota Bandung pada tahun 2013, ada 1304 RW yang melakukan MoU dan 257 RW yang belum melakukan MoU atau 16,46% dari jumlah RW yang ada. Untuk kategori Komersil/Non Komersil pada tahun 2013 ada 46 perusahaan yang melakukan MoU dengan PD. Kebersihan Kota Bandung dan 2 perusahaan diantaranya dalam proses penandatanganan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 184.313.607,50,-. Per tahun.

3.3 Pembiayaan

Sumber dana untuk membiayai komponen biaya pengelolaan berasal dari pendapatan operasional dan non operasional perusahaan serta subsidi dari APBD Kota Bandung.

- A. Pendapatan operasional jasa pelayanan kebersihan, yang terdiri dari:
 - Rumah Tinggal
 - Komersial dan non komersial
 - Pasar dan pedagang tidak tetap
 - Angkutan umum
 - Kebersihan khusus
- B. Pendapatan non operasional
 - Pendapatan jasa bank
 - Pendapatan lain-lain
- C. Subsidi/APBD, Dalam hal tarif jasa pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan biaya pengelolaan

sampah maka dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui subsidi

3.3.1. Perkembangan Keuangan Perusahaan Tahun 2013

3.3.1.1. Kenaikan Tarif



Tarif jasa pelayanan kebersihan yang berlaku sampai dengan bulan April 2013 adalah Perwal No.644 Tahun 2002 dan pada tanggal 2 April 2013 telah ditetapkan oleh Bapak Walikota Bandung Perwal No. 316 Tahun

2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, sehingga per tanggal 1 Mei 2013 tarif baru mulai diberlakukan, dengan adanya pemberlakuan tarif baru maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PD Kebersihan, adapun tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

(1) Kategori Rumah Tinggal

| KEPWAL No. 644Th. 2002 | | PERWAL No. 316 Th 2013 | |
|------------------------|----------|------------------------|----------|
| Kategori Rumah tinggal | Rp/Bulan | Golongan Rumah tinggal | Rp/Bulan |
| RT 1 | 7.500 | Kelas 6 | 20.000 |
| RT 2 | 6.000 | Kelas 5 | 15.000 |
| RT 3 | 5.000 | Kelas 4 | 10.000 |
| RT 4 | 4.000 | Kelas 3 | 7.000 |
| RT 5 | 3.000 | Kelas 2 | 5.000 |
| RT 6 | 2.000 | Kelas 1 | 3.000 |

(2) Kategori komersial dan non komersial

| Golongan | Tarif Kepwal 644 th 2002 | Tarif Perwal 316 th 2013 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Komersial | (Gol II a) : Rp. 15.000/m3 | Rp. 60.000/m3 |
| Non komersial | (Gol II b) Rp. 12.500/m3 | Rp. 50.000/m3 |

(3) Kategori Sosial, Sektor Informal, dan Angkutan Umum

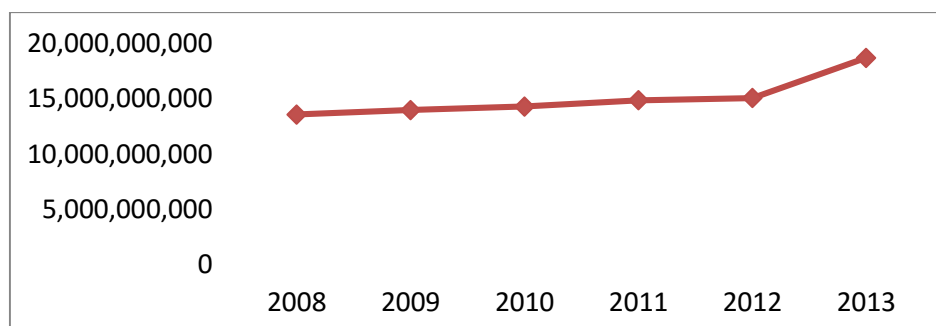
| Golongan | Tarif kepwal 644 th 2002 | Tarif Perwal 316 th 2013 | Ket. |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Panti Sosial & Tempat Ibadah | Gol III Pelayanan tidak langsung : Kelas 1 Rp. 7.500/bln Kelas 2 Rp. 6.000/bln Kelas 3 Rp. 5.000/bln Kelas 4 Rp. 4.000/bln Kelas 5 Rp. 3.000/bln Kelas 6 Rp. 2.000/bln | Golongan Sosial : Rp 45.000/m3 | |
| Pedagang pasar | Gol. IV a 1. Meja, Rp. 500/hari 2. Los/Kios/jongko, Rp. 600/hari 3. Toko, Rp. 700/hari 4. Gudang, Rp. 1.000/hari 5. Grosir, Rp. 2.000/hari | Rp. 60.000/m3 | Dimasukan kedalam kategori komersial |
| Pedagang sektor informal (PKL) | Gol. IV b Rp. 400/hari | Rp. 1.000/hari | |
| Angkutan Umum | Gol. V Angkot atau taxi, Rp. 500/hari Bus kota dan antar kota, Rp. 1.000/hari | Angkot, Rp. 1.000/hari Taxi, Rp. 1.000/hari Minibus/non Bus Rp. 3.000/hari, Bus umum Rp.5.000/hari Bus pariwisata Rp. 10.000/hari | |

Perkembangan kondisi penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah selama tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perkembangan Kondisi Penerimaan Jasa Pelayanan Sampah dari Tahun 2008 - 2013

| TAHUN | SUMBER TAGIHAN | | | JUMLAH (Rp) |
|-------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | RUMAH TINGGAL (Rp) | Komersial & Non Komersial (Rp) | Pasar, Pkl & Angk.Umum (Rp) | |
| 2008 | 6.300.558.000 | 5.154.884.560 | 2.120.691.600 | 13.576.134.160 |
| 2009 | 6.114.610.500 | 5.488.962.115 | 2.371.212.400 | 13.974.785.015 |
| 2010 | 5.890.610.000 | 5.990.597.700 | 2.413.069.500 | 14.294.277.200 |
| 2011 | 5.987.838.000 | 6.474.395.250 | 2.401.796.200 | 14.864.029.450 |
| 2012 | 5.774.560.000 | 7.376.896.232 | 1.916.667.100 | 15.068.123.332 |
| 2013 | 7.635.082.275 | 9.398.401.624 | 1.683.103.900 | 18.716.587.799 |

Grafik 3.1 Perkembangan Kondisi Penerimaan Jasa Pelayanan Sampah dari Tahun 2008 - 2013



Kondisi keuangan perusahaan selama tahun 2013 dapat dilihat pada laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Perusahaan tahun 2012 s/d tahun 2013

| NO. | URAIAN | TAHUN 2012 | | TAHUN 2013 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI |
| PENERIMAAN OPERASIONAL | | | | | |
| 1 | Rumah Tinggal | 8,259,072,000 | 5,776,148,225 | 8,506,844,000 | 7,635,082,275 |
| 2 | Komersial | 10,064,093,000 | 7,364,792,232 | 10,669,757,000 | 9,398,401,624 |
| 3 | Pasar dan PKL | 3,404,160,000 | 1,762,559,100 | 3,404,160,000 | 1,543,838,900 |
| 4 | Angkutan Umum | 213,480,000 | 154,108,000 | 426,960,000 | 139,270,000 |
| 5 | Kebersihan Khusus | 30,000,000 | 27,698,000 | 30,000,000 | 22,570,070 |
| 6 | Kompos | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 21.970.805.000 | 15.085.305.557 | 23.037.721.000 | 18.739.157.869 |
| PENERIMAAN NON OPR. | | | | | |
| | | 465,584,224 | 346,998,554 | 416.472.000 | |
| Subsidi | | 57,625,500,000 | 62,055,500,000 | 65,000,000,000 | 65,299,322,731 |
| JUMLAH | | 79,596,305,000 | 77,140,805,557 | 88.454.193.000 | 84.038.480.600 |

Dari tabel di atas diketahui pencapaian realisasi total penerimaan selama tahun 2013 terhadap anggaran tahun 2013 adalah sebesar 95% dengan penerimaan dari jasa pelayanan kebersihan (Komersial, Rumah Tinggal, Pasar, Angkutan Umum & PKL, serta Kebersihan Khusus) sebesar Rp. 18.739.157.869,- atau 81,34 % dari anggaran penerimaan jasa pelayanan kebersihan tahun 2013 tanpa subsidi.

Sementara itu, untuk subsidi yang diterima perusahaan selama tahun 2013 sebesar Rp. 65.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.299.322.731,- atau 100 % dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2013. Pada realisasi subsidi ada penerimaan dana sebesar Rp.299.322.731,- itu berasal dari bunga bank. Adapun dana subsidi dialokasikan untuk memenuhi kekurangan biaya pegawai, BBM, Oli dan Ban, perbaikan dan pemeliharaan, perlengkapan lapangan, serta pembayaran kepada BPSR Provinsi Jawa Barat untuk kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) atau terhadap sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti / tipping fee.

Tabel 3.6 Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pengeluaran
Tahun 2013

| URAIAN | TAHUN 2013 | | % Pencapaian |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| Pengeluaran Operasional | | | |
| Penyapuan dan Kebersihan Jalan | 19.122.313.000 | 18.189.360.803 | 95,12 % |
| Penyapuan dan Kebersihan Pasar | 2.524.895.000 | 1.854.100.818 | 73,43 % |
| Angkutan | 34.563.900.000 | 31.811.783.858 | 92 % |
| Pengelolaan TPA | 17.107.006.000 | 14.648.784.825 | 85,63 % |
| Beban Pokok Lainnya | 3.687.075.000 | 2.432.824.614 | 65,98 % |
| Beban Penagihan | 3.906.099.000 | 4.827.279.819 | >100 % |
| Beban Administrasi Umum | 9.968.322.000 | 8.128.212.966 | 81,54 % |
| Investasi | 3.040.113.000 | 2.586.230.480 | 85 % |
| Beban Lain lain | 3.167.638.649 | 103.563.130 | 3,26 % |
| Jumlah pengeluaran operasional | 97.087.361.649,00 | 84.582.141.313,00 | 87,11 % |

Dari tabel diatas diketahui realisasi pengeluaran sampai dengan tahun 2013 terhadap anggaran perusahaan tahun 2013 tercapai sebesar 87,11 %, dengan pengeluaran terbesar untuk beban pengangkutan sebesar 31.811.783.858,- dimana didalamnya mencakup beban pegawai, beban transport, beban perbaikan pemeliharaan asset, beban pemakaian peralatan, beban sewa dan beban dana kecelakaan. Untuk beban lain-lain hanya terealisasi 3,26% karena bunga hutang luar negeri tidak dibayarkan.

Pada tahun 2013 sistem kebijakan akuntansi PD Kebersihan mengalami perubahan dalam sistem penulisan proyeksi cash flow, laporan neraca dan laporan laba rugi dengan tujuan untuk memudahkan penyajian data apabila diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun oleh Inspektorat, dan juga dengan dirubahnya sistem kebijakan akuntansi perusahaan maka akan lebih memudahkan melihat biaya operasional yang dibutuhkan seperti yang terlampir dalam tabel dibawah ini :

**PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
CASH FLOW KOMPARATIF TAHUN 2008 S/D 2012**

| KODE PERK. | URAIAN | TAHUN 2008 | TAHUN 2009 | TAHUN 2010 | TAHUN 2011 | TAHUN 2012 |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SADO AWAL | 9.362.727.615 | 16.751.415.724 | 14.992.657.715 | 11.268.979.709 | 12.016.567.840 |
| 700 | JASA PELAYANAN KEBERSIHAN | | | | | |
| 701 | Rumah Tinggal | 5.364.784.855 | 5.198.384.950 | 5.008.136.125 | 5.987.274.875 | 5.776.148.225 |
| 702 | Komersil dan Non Komersil | 5.158.456.060 | 5.498.938.415 | 5.978.347.475 | 6.474.487.250 | 7.364.792.232 |
| 703,1 | Pasar | 2.120.691.600 | 2.222.814.400 | 2.231.517.400 | 2.256.599.200 | 1.762.559.100 |
| 703,4 | Angkutan Umum | - | 144.254.900 | 163.574.600 | 145.197.000 | 154.108.000 |
| 704 | Kompos | - | - | 900.000 | - | - |
| 705 | Khusus | 144.676.000 | 146.300.000 | 76.500.000 | 30.806.000 | 27.698.000 |
| 706 | Subsidi | 50.495.000.000 | 44.125.500.000 | 45.125.500.000 | 57.625.500.000 | 62.055.500.000 |
| | JUMLAH PENERIMAAN OPS. | 63.283.608.515 | 57.336.192.665 | 58.584.475.600 | 72.519.864.325 | 77.140.805.557 |
| | PENERIMAAN NON OPS. | | | | | |
| 901,2 | Jasa Bank | 49.550.784 | 158.432.458 | 96.862.250 | 120.423.547 | 128.544.628 |
| 112 | Cicilan Piutang Pegawai | 40.420.488 | 77.344.079 | 67.054.165 | 91.547.428 | - |
| 901,4 | Lain - lain | 72.754.916 | 44.782.400 | 48.842.538 | 473.624.905 | 48.622.769 |
| 118 | Angsuran Piutang Pemkot Cimahi | 329.001.065 | 88.208.478 | 83.454.501 | 78.700.448 | 73.953.164 |
| 130 | Pengembalian Uang Muka Kerja | 765.768.939 | 26.570.000 | - | - | 62.595.575 |
| 102 | Pengisian Dana Kas Kecil | 50.000.000 | - | 769.500 | - | - |
| 316 | Cicilan Piutang Lain - lain | - | - | 14.200.000 | 11.529.967 | 33.282.418 |
| | JML PENERIMAAN NON OP. | 1.307.496.192 | 395.337.415 | 311.182.954 | 775.826.295 | 346.998.554 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUMLAH PENERIMAAN | 64.591.104.707 | 57.731.530.080 | 58.895.658.554 | 73.295.690.620 | 77.487.804.111 |
| | JUMLAH DANA YANG TERSEDIA | 73.953.832.322 | 74.482.945.804 | 73.888.316.269 | 84.564.670.329 | 89.504.371.951 |
| | PENGELUARAN OPERASIONAL | | | | | |
| 801 | Belanja Pegawai | 26.809.021.395 | 31.109.582.729 | 33.388.965.170 | 34.781.826.158 | 35.650.286.565 |
| 802 | BBM, Pelumas, Ban | 18.641.535.629 | 13.326.373.174 | 13.329.042.553 | 14.264.845.003 | 14.147.679.119 |
| 803 | Perbaikan dan Pemeliharaan | 2.452.992.987 | 3.241.349.624 | 4.657.091.954 | 5.645.837.057 | 5.381.104.310 |
| 804 | Peralatan Lapangan | 611.100.902 | 870.200.271 | 961.819.763 | 1.145.688.591 | 1.035.331.371 |
| 805 | Administrasi Umum | 6.376.726.643 | 7.934.314.960 | 6.879.590.926 | 8.362.169.625 | 7.666.818.003 |
| 200 | Investasi | 474.847.299 | 1.767.216.063 | 3.056.972.275 | 1.548.645.816 | 1.731.919.658 |
| 112 | Piutang Pegawai | 931.314.733 | 17.740.860 | 8.722.133 | 15.240.650 | 4.836.650 |
| 115 | Piutang Dinas | 83.392.996 | - | - | - | - |
| 402 | Hutang Dinas | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.704.000 | - | 25.962 |
| 410 | Angsuran Pinjaman | 484.233.875 | 1.208.709.147 | 321.176.000 | 1.539.319.324 | - |
| 101 | Pengeluaran Kas Kecil | 50.000.000 | - | - | 62.595.575 | - |
| 130 | Uang Muka Kerja | 271.310.989 | - | - | - | 63.554.475 |
| | Kompensasi | - | - | - | 5.134.052.990 | 14.349.592.095 |
| 9035 | Lain - lain | 769.500 | 33 | - | 35.043.700 | 65.756.325 |
| | JML PENGELUARAN OPS. | 57.188.246.948 | 59.476.486.861 | 62.606.084.774 | 72.535.264.489 | 80.096.904.533 |
| | PENGELUARAN NON OPS. | | | | | |
| 902,2 | Administrasi Bank | 14.169.650 | 13.801.228 | 13.251.786 | 12.838.000 | 12.149.500 |
| | JML PENGELUARAN NON OPS | 14.169.650 | 13.801.228 | 13.251.786 | 12.838.000 | 12.149.500 |
| | JUMLAH PENGELUARAN | 57.202.416.598 | 59.490.288.089 | 62.619.336.560 | 72.548.102.489 | 80.109.054.033 |
| | SALDO AKHIR | 16.751.415.724 | 14.992.657.715 | 11.268.979.709 | 12.016.567.840 | 9.395.317.918 |

Keterangan : Sumber dari Bidang Keuangan

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Laporan cash flow Per 31 Desember 2013

| KODE PERK. | U R A I A N | TAHUN 2013 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | SALDO AWAL | 9.395.317.918 |
| 600000 | JASA PELAYANAN KEBERSIHAN | |
| 610000 | Rumah Tinggal | 7.635.082.275 |
| 630000 | Komersil dan Non Komersil | 9.398.401.624 |
| 660000 | Pasar dan PKL | 1.543.833.900 |
| 680000 | Angkutan Umum | 139.270.000 |
| 690000 | Khusus | 18.812.000 |
| 610000 | Kompos | 3.758.070 |
| | JUMLAH PENERIMAAN OPERASIONAL | 18.739.157.869 |
| | PENERIMAAN NON OPERASIONAL | |
| 911000 | Jasa bank | 96.291.515 |
| 918000 | Subsidi | 65.000.000.000 |
| 133000 | Cicilan Piutang Pegawai | 91.066.802 |
| 910000 | Lain - lain | 48.409.939 |
| 111200 | Penggantian uang muka kerja (KK) | 63.554.475 |
| | JML PENERIMAAN NON OPERASIONAL | 65.299.322.731 |
| | JUMLAH PENERIMAAN | 84.038.480.600 |
| | JUMLAH DANA YANG TERSEDIA | 93.433.798.518 |
| | PENGELUARAAN OPERASIONAL | |
| 710000 | Beban Penyapuan Dan Kebersihan Jalan | 18.189.360.803 |
| 720000 | Beban Penyapuan Dan Kebersihan Pasar | 1.854.100.818 |
| 730000 | Beban Pengangkutan | 31.811.783.858 |
| 740000 | Beban Pengelolaan TPA | 14.648.784.825 |
| 750000 | Beban Pokok Lainnya | 2.432.824.614 |
| 810000 | Beban Penagihan | 4.827.279.819 |
| 820000 | Beban Administrasi Umum | 8.128.212.966 |
| 200000 | Pengadaan Aset | 2.586.230.480 |
| 922000 | Beban Lain-lain | 49.816.228 |
| 133000 | Piutang Pegawai | 17.188.758 |
| | Pengeluaran uang muka kerja (KK) | 24.987.644 |
| | JML PENGELUARAN OPERASIONAL | 84.570.570.813 |
| | PENGELUARAN NON OPERASIONAL | |
| 921000 | Administrasi bank | 11.570.500 |
| | JMLPENGELUARAN NON OPERASIONAL | 11.570.500 |
| | JUMLAH PENGELUARAN | 84.582.141.313 |
| | SALDO AKHIR | 8.851.657.205 |

Keterangan : Sumber dari Bidang Keuangan

3.3.2. Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Perusahaan

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan perusahaan pada tahun 2013 antara lain:

a. Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan.

Berdasarkan Perwal No. 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, sehingga per tanggal 1 Mei 2013 tarif baru mulai diberlakukan, dengan adanya pemberlakuan tarif baru maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PD Kebersihan.

b. Optimalisasi Potensi Wajib Bayar Jasa Pelayanan Kebersihan

Jumlah wajib bayar jasa pelayanan kebersihan hingga saat ini belum menunjukkan jumlah yang optimal. Untuk kategori rumah tinggal khususnya, jumlah wajib bayar pada tahun 2013 baru mencapai sekitar 80% dari potensi wajib bayar, yaitu rata-rata sebanyak 1304 wajib bayar. Kegiatan optimalisasi dilakukan dengan terus melakukan penyisiran/pendataan wajib bayar melalui kerjasama dengan RW dan penyampaian surat pemberitahuan tunggakan juga dilakukan kepada pihak RW terkait. Untuk kategori komersial, dilakukan inventarisir wajib bayar yang tarifnya harus dirubah, melalukan penyisiran piutang wajib bayar, serta menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan.

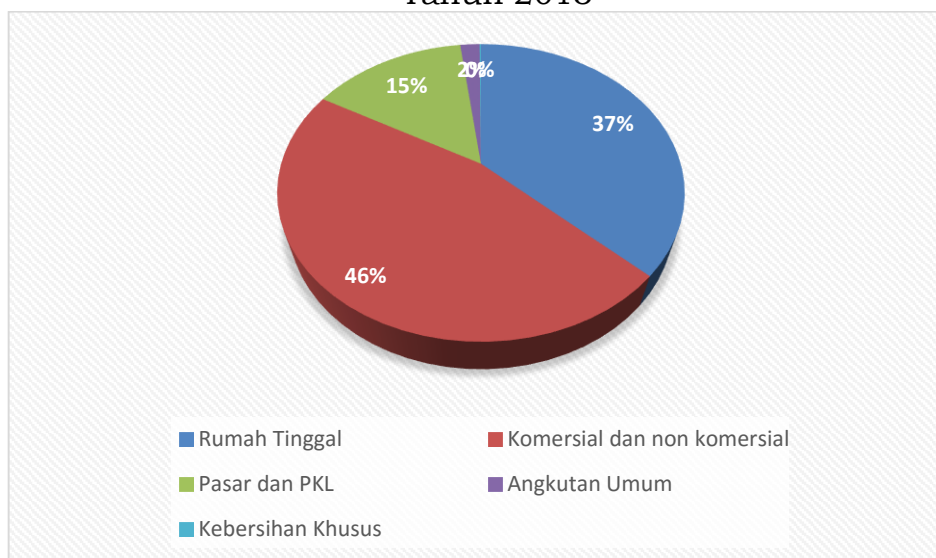
3.4. Kegiatan Penagihan Jasa Pelayanan Kebersihan

Penerimaan jasa pelayanan kebersihan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp.18.739.162.869 atau tercapai sebesar 81,34% dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.23.037.721.000.

Tabel 3.7 Anggaran&Realisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

| NO | URAIAN | TAHUN 2013 | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % |
| | PENERIMAAN OPERASIONAL | | | |
| 1 | Rumah Tinggal | 8.506.844.000 | 7.635.082.275 | 89,75 % |
| 2 | Komersial dan non komersial | 10.669.757.000 | 9.398.401.624 | 88 % |
| 3 | Pasar dan PKL | 3.404.160.000 | 1.543.833.900 | 45,35 % |
| 4 | Angkutan Umum | 426.960.000 | 139.270.000 | 32,61 % |
| 5 | Kebersihan Khusus | 30.000.000 | 22.570.070 | 75,23 % |
| | JUMLAH | 23.037.721.000 | 18.739.157.869 | 81,34 % |
| | PENERIMAAN NON OPR. | 416.472.000 | | |
| | Subsidi | 65.000.000.000 | 65.299.322.731 | 100 % |
| | TOTAL PENERIMAAN | 88.454.193.000 | 84.038.480.600 | 95 % |

Grafik 3.2 Komposisi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2013

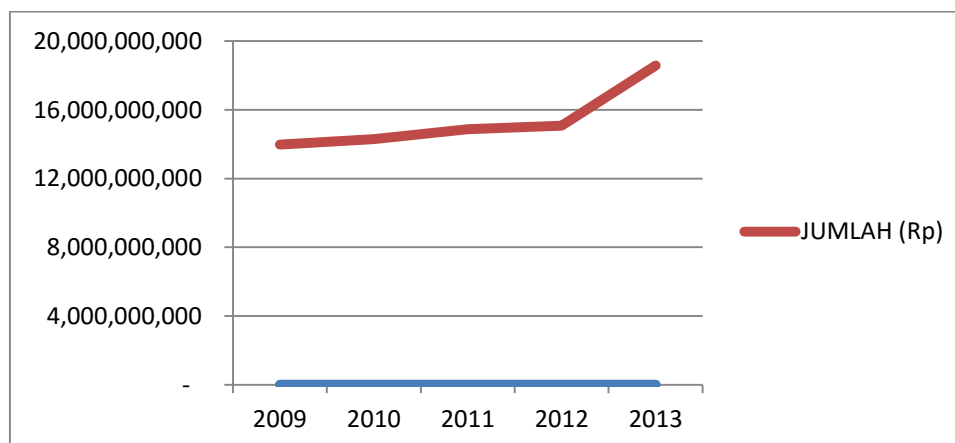


Berdasarkan grafik diatas, penerimaan dari sektor komersial memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan jasa pelayanan kebersihan, baru kemudian diikuti oleh sektor rumah tinggal. Jika melihat perkembangan penerimaan hasil tagihan jasa pelayanan kebersihan dari tahun 2009 hingga 2013, penerimaan perusahaan tetap mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Perkembangan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2009 s/d 2013

| TAHUN | SUMBER TAGIHAN | | | JUMLAH (Rp) |
|-------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | RUMAH TINGGAL (Rp) | KOMERSIAL & NON KOMERSIAL (Rp) | PASAR, PKL & ANGK.UMUM (Rp) | |
| 2009 | 6.114.610.500 | 5.488.962.115 | 2.371.212.400 | 13.974.785.015 |
| 2010 | 5.890.610.000 | 5.990.597.700 | 2.413.069.500 | 14.294.277.200 |
| 2011 | 5.987.838.000 | 6.474.395.250 | 2.401.796.200 | 14.864.029.450 |
| 2012 | 5.774.560.000 | 7.376.896.232 | 1.916.667.100 | 15.068.123.332 |
| 2013 | 7.509.601.500 | 9.379.426.454 | 1.683.313.900 | 18.572.341.854 |

Grafik 3.3. Perkembangan Jumlah Penerimaan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2009 s/d 2013



3.5. Pelanggan / Wajib Bayar Jasa Pelayanan Kebersihan

Wajib bayar jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung dikategorikan menjadi:

1. Kategori Rumah Tinggal
2. Kategori Komersil
3. Kategori Sosial / Non Komesil
4. Kategori Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap (PKL)
5. Kategori Angkutan Umum

3.5.1. Pelanggan/ Wajib Bayar Kategori Rumah Tinggal

Kegiatan penagihan jasa pelayanan kebersihan untuk kategori rumah tinggal pada tahun 2013 masih dilakukan melalui kerjasama dengan pihak RW. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU penagihan hingga tahun 2013 sebanyak 1.304 RW atau sekitar 83, 54% dari total RW di Kota Bandung sebanyak 1.561 RW, sedangkan jumlah RW yang belum melakukan MoU sebanyak 257 RW sehingga tidak dilakukan pendropan karcis oleh bidang Penagihan.

Tabel 3.9 Rekapitulasi data MoU tahun 2013 antara PD Kebersihan dengan RW

| NO | URAIAN | WILAYAH | | | | JUMLAH TOTAL |
|----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | BANDUNG BARAT | BANDUNG SELATAN | BANDUNG UTARA | BANDUNG TIMUR | |
| 1 | Kecamatan | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 |
| 2 | Kelurahan | 43 | 36 | 32 | 41 | 152 |
| 3 | Jumlah RW | 377 | 361 | 354 | 469 | 1561 |
| 4 | RW yang sudah MoU | 322 | 336 | 308 | 338 | 1304 |
| 5 | RW yang belum MoU | 55 | 25 | 46 | 131 | 257 |

*) Sumber: Bidang Humas

Selama tahun 2013, jumlah kuitansi yang diterbitkan oleh Sie. Penetapan untuk kategori rumah tinggal mulai dari R1 hingga R6 sebanyak 2.819.800 lembar dengan realisasi kuitansi tertagih sebesar 1.687.353 lembar atau terealisasi sebesar 59,84%. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 tentang tarif jasa pengelolaan sampah yang mengalami kenaikan sebesar 51,88% dari tarif lama, maka ada Berikut merupakan rincian jumlah penerbitan kuitansi serta realisasi karcis tertagih selama tahun 2013:

Tabel 3.10 Jumlah Penerbitan & Realisasi Kuitansi Tertagih Per Tahun Kategori Rumah Tinggal Tahun 2013

| KELAS | PENERBITAN | | REALISASI | |
|---------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | LEMBAR | NOMINAL | LEMBAR | NOMINAL |
| R1 | 12.000 | 1.565.500.000 | 6.146 | 778.287.000 |
| R2 | 30.600 | 8.139.500.000 | 15.138 | 5.014.626.000 |
| R3 | 67.500 | 1.403.800.000 | 38.801 | 832.654.000 |
| R4 | 234.700 | 555.000.000 | 143.476 | 295.650.000 |
| R5 | 1.893.100 | 351.000.000 | 1.192.144 | 158.103.000 |
| R6 | 581.900 | 180.000.000 | 291.648 | 82.732.500 |
| JUMLAH | 2.819.800 | 12.194.800.000 | 1.687.353 | 7.162.052.500 |

3.5.2. Pelanggan Kategori Komersial

Pelanggan kategori komersial jasa pelayanan kebersihan PD Kebersihan meliputi hotel/losmen/penginapan, rumah sakit, toko, pusat perbelanjaan, industri rumah tangga, pabrik/p.teknik/bengkel, bioskop, pers.angkutan/gudang, dan pers. jasa/ kantor/bank. Selama tahun 2013, jumlah kuitansi komersial yang diterbitkan untuk masing-masing pelanggan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Rekapitulasi Penerbitan Kuitansi Komersial Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2013

| NO | JENIS PELANGGAN | KOMERSIAL | |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | LEMBAR | NOMINAL |
| 1 | HOTEL / LOSMEN / PENGINAPAN | 2,520 | 660,366,280 |
| 2 | RESTAURAN / RUMAH MAKAN | 6,293 | 773,855,750 |
| 3 | RUMAH SAKIT | 520 | 422,841,136 |
| 4 | TOKO | 47,273 | 2,110,073,260 |
| 5 | PUSAT PERBELANJAAN | 446 | 554,187,000 |
| 6 | PABRIK/P.TEKNIK/ BENGKEL | 3,211 | 452,475,600 |
| 7 | BIOSKOP | 24 | 4,455,000 |
| 8 | PERS.ANGKUTAN/GUDANG | 2,852 | 155,751,000 |
| 9 | HOME INDUSTRI | 6,067 | 354,047,600 |
| 10 | PERS.JASA/ KANTOR/ BANK | 25,856 | 3,908,468,382 |

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| | JUMLAH | 95,062 | 9,396,521,008 |
|--|--------|--------|---------------|

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pelanggan terbesar untuk kategori komersial adalah toko dan perusahaan jasa/kantor/bank dengan jumlah kuitansi yang diterbitkan mencapai 47.273 kuitansi untuk toko dan 25.856 kuitansi untuk perusahaan jasa/kantor/bank. Sementara itu, untuk jumlah kuitansi tertagih kategori komersial selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Jumlah Penerbitan Kuitansi dan Kuitansi Tertagih Kategori Komersial

| Bulan | Kuitansi yang diterbitkan | | Kuitansi Tertagih | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|
| | Lembar | Nominal (Rp) | Lembar | % | Nominal (Rp) | % |
| Januari | 8,052 | 648,475,178 | 7,306 | 90.74 | 509,704,292 | 78.60 |
| Februari | 8,075 | 666,399,848 | 7,284 | 90.20 | 515,123,495 | 77.30 |
| Maret | 8,095 | 667,646,428 | 7,303 | 90.22 | 531,294,057 | 79.58 |
| April | 8,102 | 668,862,928 | 7,295 | 90.04 | 530,083,207 | 79.25 |
| Mei | 7,888 | 835,239,478 | 5,595 | 70.93 | 588,538,717 | 70.46 |
| Juni | 7,798 | 829,709,128 | 6,524 | 83.66 | 615,562,667 | 74.19 |
| Juli | 7,813 | 825,368,128 | 6,597 | 84.44 | 632,230,117 | 76.60 |
| Agustus | 7,816 | 831,570,137 | 6,594 | 84.37 | 625,141,606 | 75.18 |
| September | 7,841 | 842,095,701 | 6,666 | 85.01 | 643,308,810 | 76.39 |
| Oktober | 7,840 | 833,976,951 | 6,694 | 85.38 | 647,861,060 | 77.68 |
| November | 7,858 | 875,171,501 | 6,715 | 85.45 | 599,703,645 | 68.52 |
| Desember | 7,884 | 872,005,801 | 6,764 | 85.79 | 661,122,300 | 75.82 |
| JUMLAH | 95,062 | 9,396,521,207 | 81,337 | | 7,099,673,973 | |

Berdasarkan tabel diatas, jumlah rata-rata kuitansi tertagih setiap bulannya untuk kategori komersial pada tahun 2013 adalah sebesar 7.922 kuitansi.

3.5.3. Pelanggan Kategori Non Komersial

Pelanggan kategori non komersial pada tahun 2013 terdiri rumah sakit pemerintah, perusahaan jasa/instansi pemerintah serta p.teknik/bengkel. Potensi pelanggan kategori non komersial dapat dilihat dari kuitansi yang diterbitkan oleh Seksi Penetapan dan Pendataan Bidang Keuangan, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.13. Jumlah penerbitan kuitansi tagihan jasa pelayanan kebersihan kategori komersial dan non komersial tahun 2013

| NO | JENIS PELANGGAN | NON KOMERSIAL | |
|----|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | LEMBAR | NOMINAL |
| 1 | HOTEL / LOSMEN / PENGINAPAN | - | - |
| 2 | RESTAURAN / RUMAH MAKAN | - | - |
| 3 | RUMAH SAKIT | 127 | 161,986,330 |
| 4 | TOKO | - | - |
| 5 | PUSAT PERBELANJAAN | - | - |
| 6 | PABRIK/P.TEKNIK/ BENGKEL | - | - |
| 7 | BIOSKOP | - | - |
| 8 | PERS.ANGKUTAN/GUDANG | - | - |
| 9 | HOME INDUSTRI | - | - |
| 10 | PERS.JASA/ KANTOR/ BANK | 5,758 | 819,694,404 |
| | JUMLAH | 5,885 | 981,680,734 |

Jumlah pelanggan kategori non komersial setiap bulannya selama tahun 2013 dapat dilihat dari jumlah kuitansi yang tertagih seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14. Jumlah Penerbitan Kuitansi dan Kuitansi Tertagih Kategori NonKomersial Tahun 2013

| Bulan | Kuitansi yang diterbitkan | | Kuitansi Tertagih | | | |
|----------|---------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | Lembar | Nominal (Rp) | Lembar | % | Nominal (Rp) | % |
| Januari | 489 | 65,391,322 | 318 | 65.03 | 27,751,050 | 42.44 |
| Februari | 488 | 65,942,542 | 285 | 58.40 | 26,118,050 | 39.61 |
| Maret | 489 | 63,783,130 | 377 | 77.10 | 32,335,150 | 50.70 |
| April | 492 | 72,606,690 | 374 | 76.02 | 34,254,650 | 47.18 |
| Mei | 497 | 99,657,060 | 319 | 64.19 | 34,778,600 | 34.90 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------|-------|
| Juni | 492 | 84,350,730 | 374 | 76.02 | 42,738,600 | 50.67 |
| Juli | 490 | 82,333,060 | 365 | 74.49 | 41,517,600 | 50.43 |
| Agustus | 490 | 85,257,120 | 334 | 68.16 | 43,175,800 | 50.64 |
| September | 490 | 83,954,520 | 385 | 78.57 | 43,226,200 | 51.49 |
| Oktober | 490 | 82,293,520 | 349 | 71.22 | 42,703,500 | 51.89 |
| November | 494 | 112,313,520 | 355 | 71.86 | 48,435,200 | 43.12 |
| Desember | 484 | 83,797,520 | 402 | 83.06 | 51,627,360 | 61.61 |
| JUMLAH | 5,885 | 981,680,734 | 4,237 | | 468,661,760 | |

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah rata-rata kuitansi tertagih untuk kategori non komersial setiap bulannya sekitar 490 kuitansi /pelanggan yang berasal dari lembaga pendidikan, rumah sakit, dll.

3.5.4. Pelanggan Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap (PKL)

Sesuai dengan Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dimana pengelola kawasan wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya, maka sejak tahun 2012 kegiatan pengelolaan sampah pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat diserahkan secara bertahap kepada PD Pasar Bermartabat. Sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah pasar yang diserahkan pengelolaannya sudah berjumlah 20 pasar dimana kegiatan penagihannya masuk kepada kategori komersial sehingga yang masuk ke dalam kategori pedagang pasar dan PKL hanya pasar yang belum diserahkan pengelolaannya kepada PD Pasar Bermartabat, pasar yang dikelola oleh pihak lain namun pengelolaan sampahnya masih oleh PD Kebersihan, serta pedagang kaki lima (PKL). Berikut merupakan pasar yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada PD. Pasar Bermartabat:

Tabel 3.15. Pasar yang Sudah Diserahkan Pengelolaannya kepada PD Pasar Bermartabat

| TAHAP | NAMA PASAR | TAHAP | NAMA PASAR |
|-------|---|-------|--|
| I. | Sederhana Astana Anyar Kosambi Bunga Cihapit | III. | Ujung Berung Ciwastra Cicaheum Palasari Leuwipanjang |
| II. | Cijerah Sukahaji Gegerkalong Pamoyanan Simpang Dago | IV. | Sadangserang Cihaurgeulis Karapitan ITC Kebonkelapa Kiaracandong |

Jumlah karcis yang diterbitkan oleh Seksi Penetapan PD. Kebersihan untuk kategori pasar dan PKL selama tahun 2013 sebanyak 2.086.500 lembar. Dengan adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang perubahan tarif jasa pengelolaan sampah yang mulai berlaku pada bulan Mei 2013. Berikut merupakan jumlah karcis yang diterbitkan selama tahun 2013:

Tabel 3.16. Jumlah Karcis Pasar dan PKL Yang Diterbitkan Selama Tahun 2013

| BULAN | KARCIS YANG DITERBITKAN (LEMBAR) | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 2000 |
| Januari | 2,000 | 116,000 | 31,000 | 74,200 | 11,300 | 1,400 |
| Februari | 1,900 | 110,000 | 19,400 | 38,000 | 10,700 | 1,200 |
| Maret | 1,900 | 115,500 | 22,100 | 46,200 | 10,800 | 1,000 |
| April | 1,700 | 113,000 | 22,500 | 44,200 | 11,300 | 1,000 |
| Mei | - | - | - | - | 197,000 | - |
| Juni | - | - | - | - | 160,000 | - |
| Juli | - | - | - | - | 151,000 | - |
| Agustus | - | - | - | - | 151,000 | - |
| September | - | - | - | - | 170,000 | - |
| Oktober | - | - | - | - | 164,200 | - |
| November | - | - | - | - | 145,000 | - |
| Desember | - | - | - | - | 140,000 | - |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| JUMLAH | 7,500 | 454,500 | 95,000 | 202,600 | 1,322,300 | 4,600 |
|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|

Sementara itu, jumlah karcis yang terealisasi untuk kategori Pasar dan PKL setiap bulannya yang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Jumlah Karcis Yang Terealisasi Untuk Kategori Pasar dan PKL Tahun 2013

| BULAN | KARCIS YANG TEREALISASI (LEMBAR) | | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 2000 |
| Januari | 1,345 | 104,378 | 21,356 | 47,665 | 9,101 | 618 |
| Februari | 1,805 | 101,731 | 18,329 | 37,735 | 8,379 | 555 |
| Maret | 1,748 | 109,879 | 20,012 | 44,396 | 9,550 | 620 |
| April | 1,622 | 106,085 | 20,227 | 42,674 | 9,508 | 603 |
| Mei | - | - | - | - | 148,100 | - |
| Juni | - | - | - | - | 149,000 | - |
| Juli | - | - | - | - | 142,411 | - |
| Agustus | - | - | - | - | 111,745 | - |
| September | - | - | - | - | 148,510 | - |
| Oktober | - | - | - | - | 138,078 | - |
| November | - | - | - | - | 142,130 | - |
| Desember | - | - | - | - | 140,202 | - |
| JUMLAH | 6,520 | 422,073 | 79,924 | 172,470 | 1,156,714 | 2,396 |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah kuitansi/karcis yang terealisasi untuk kategori pedagang pasar dan PKL mengalami fluktuasi setiap bulannya namun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena beralihnya tagihan pasar menjadi tagihan komersial setelah proses penyerahan 20 pasar kepada pihak PD Pasar Bermartabat, hal lain adalah karena adanya perubahan tarif jasa pengelolaan sampah terhitung mulai Mei 2013 dimana untuk kategori pasar dan PKL sebesar Rp. 1000.

3.5.5. Pelanggan Angkutan Umum

Penagihan jasa pelayanan kebersihan untuk angkutan umum dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Penagihan jasa kebersihan dilakukan di 4 (empat) terminal yaitu terminal Cicaheum, terminal Leuwi Panjang, terminal Ledeng dan terminal St.

Hall. Adapun kendaraan yang dikenakan jasa pelayanan kebersihan antara lain:

- Terminal Cicaheum dan Leuwi Panjang : bis antar kota antar propinsi dan bis antar kota dalam propinsi
- Terminal Ledeng dan St. Hall : kendaraan elf (non bis dan angkutan kecil)
- Bis pariwisata yang berada di jalur Cihampelas dan Jl. Diponegoro (depan Museum Geologi)
- Penagihan terhadap bis Damri yang beroperasi dan masuk terminal Cicaheum serta Leuwi Panjang

Tabel 3.18 Potensi Tagihan Jasa Pelayanan Pelayanan Kebersihan Kategori Angkutan Umum

| No | Jenis Angkutan | Jumlah Armada |
|----|------------------------|---------------|
| 1 | Angkutan Kota | 5,521 |
| 2 | Bis Kota | 144 |
| 3 | Bis Sedang (mikro bis) | 700 |
| 4 | Taksi | 1,633 |
| | Jumlah | 7,998 |

Sumber : Organda Kota Bandung 2011

Karcis yang diterbitkan pada tahun 2013, dari bulan Januari hingga Desember PD. Kebersihan menerbitkan 107.900 lembar karcis, penerimaan hasil tagihan jasa pelayanan kebersihan untuk kategori angkutan umum sebesar Rp.124.242.000 dengan uraian karcis yang tertagih setiap bulannya sebagai berikut:

Tabel 3.19 Jumlah Kuitansi yang diterbitkan untuk Kategori Angkutan Umum

| Bulan | Jenis karcis (Lembar) | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | Rp.500 | Rp. 1000 | Rp. 3000 | Rp. 5000 | Rp. 10.000 | |
| Januari | - | 14,500 | - | - | - | 14,500 |
| Februari | - | 14,500 | - | - | - | 14,500 |
| Maret | - | 14,500 | - | - | - | 14,500 |
| April | - | 14,500 | - | - | - | 14,500 |
| Mei | - | - | 2,100 | 9,800 | 200 | 12,100 |
| Juni | - | - | 700 | 2,100 | 400 | 3,200 |
| Juli | - | - | 700 | 2,100 | 200 | 3,000 |
| Agustus | - | - | 700 | 1,900 | 100 | 2,700 |
| September | - | 5,000 | 700 | 1,900 | 100 | 7,700 |
| Oktober | - | 5,000 | 700 | 1,300 | 200 | 7,200 |
| November | - | 5,000 | 700 | 1,200 | 100 | 7,000 |
| Desember | - | 5,000 | 700 | 1,200 | 100 | 7,000 |
| Jumlah | - | 78,000 | 7,000 | 21,500 | 1,400 | 107,900 |

Tabel 3.20 Jumlah Kuitansi Tertagih untuk Kategori Angkutan Umum

| Bulan | Jenis karcis | | | | | Jumlah |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | Rp.500 | Rp. 1000 | Rp. 3000 | Rp. 5000 | Rp. 10.000 | |
| Januari | - | 8,200 | - | - | - | 8,200 |
| Februari | - | 8,350 | - | - | - | ,350 |
| Maret | - | 8,350 | - | - | - | 8,350 |
| April | - | 8,700 | - | - | - | 8,700 |
| Mei | - | - | 305 | 1,550 | 200 | 2,055 |
| Juni | - | - | 318 | 1,450 | 155 | 1,923 |
| Juli | - | - | 612 | 1,600 | 10 | 2,222 |
| Agustus | - | - | 607 | 1,500 | - | 2,107 |
| September | - | - | 620 | 386 | 15 | 1,021 |
| Oktober | - | 4,980 | 623 | 750 | 69 | 6,422 |
| November | - | 5,000 | 629 | 1,000 | 85 | 6,714 |
| Desember | - | 4,900 | 4,900 | 480 | 100 | 10,380 |
| Jumlah | - | 48,480 | 8,614 | 8,716 | 634 | 66,444 |
| Rata-rata per bulan | | 6,926 | 1,077 | 1,090 | 91 | |

Jumlah karcis yang terealisasi pada tahun 2013 untuk kategori angkutan umum sebanyak 66.444 lembar dengan nominal Rp. 124.242.000. Jumlah ini masih kurang, dikarenakan masih terkendala beberapa hal, antara lain belum adanya kerjasama / MoU antara PD Kebersihan dengan Organda, kurangnya sosialisasi kepada para pengemudi angkot mengenai pengenalan jasa pelayanan kebersihan serta penolakan dari para pengemudi angkutan kota.

3.6. Teknik dan Operasional

3.6.1. Sistem Operasional Pelayanan

Sistem operasional yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan terbagi dalam dua pola yaitu pelayanan yang dimulai dari sumber sampah hingga ke TPA dan pelayanan yang dilakukan mulai dari TPS ke TPA. Pola pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 3.1. Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Sektor Rumah Tinggal, Komersial dan Non Komersial

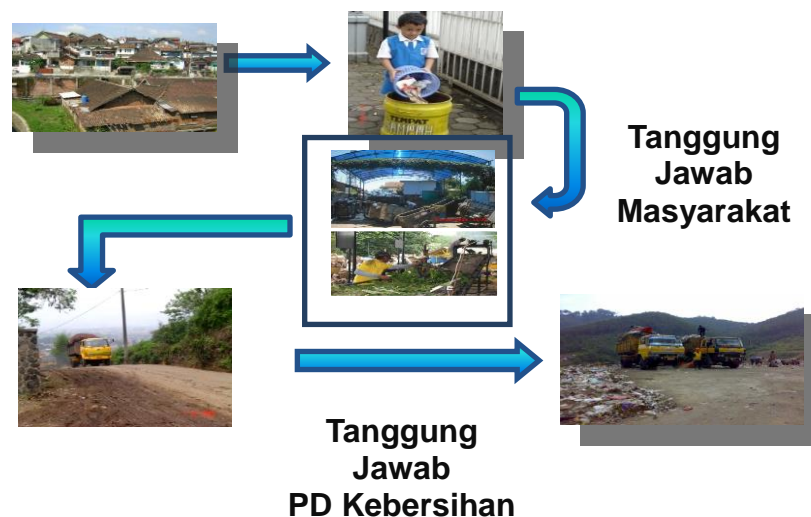
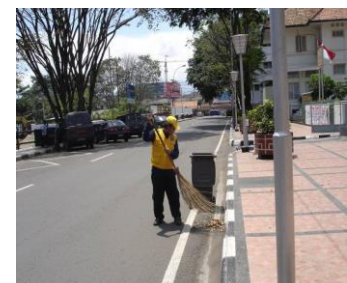


Diagram 3.2. Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Jalan, Pasar dan Fasilitas Umum



A. Penyapuan Jalan

Panjang jalan yang disapu selama tahun 2013 sepanjang 658.57 Km dengan 241 ruas jalan. Kegiatan penyapuan untuk pusat kota dan jalan tertentu dilaksanakan 2 shift kerja, yaitu shift 1 pukul 05.00 – 11.00 dan shift 2 pukul 11.00 – 17.00. Sarana yang digunakan untuk kegiatan penyapuan jalan antara lain sapu lidi, pengki, carangka, serta kontiner 120 liter. Jumlah personil penyapuan hingga bulan Desember 2013 berjumlah 693 personil dengan jumlah sampah hasil penyapuan sebanyak 230 m³/hari.



B. Penyapuan Pasar



Kegiatan penyapuan sampah pasar dilakukan sebanyak 1 shift kerja dengan menggunakan sarana berupa sapu, cerangka, kontainer 120 liter, gacok, pengki dan singkup. Jumlah personil penyapuan pasar tahun 2013 sebanyak 46 orang dengan sampah hasil sapuan sebanyak 208,2 m³/hari (dalam kondisi padat). Mulai

Bulan Januari – Desember 2012 pengelolaan sampah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat diserahkan secara bertahap ke PD Pasar Bermartabat (saat ini sudah 20 pasar), sehingga kegiatan penyapuan dan pengumpulan merupakan tanggung jawab PD Pasar Bermartabat sedangkan pengangkutan dari TPS ke TPA dilakukan oleh PD Kebersihan.

C. Pengumpulan Sampah

Kegiatan pengumpulan sampah hasil sapuan jalan ke TPS menggunakan gerobak sampah, motor trida dan mobil pick up (kancil), sedangkan pengumpulan sampah hasil sapuan pasar ke TPS menggunakan gerobak



sampah. Jumlah armada kancil sebanyak 8 unit dan trida sebanyak 27 unit. Jumlah personil trida dan kancil sebanyak 35 orang sedangkan jumlah lokasi TPS sebanyak 164 TPS. Jumlah mesin pengepres sampah sebanyak 1 unit yang diletakkan di TPS/ Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tegalega.

Kegiatan pengumpulan sampah yang bersumber dari pemukiman, sistem pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan gerobak ataupun mobil *pick up* yang dilakukan oleh petugas swakelola

RT/RW atau pihak luar yang telah melakukan kesepakatan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengumpulan sampah dan membawanya ke TPS terdekat.

Pengumpulan sampah dari daerah/kegiatan komersil dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu langsung dimasukkan ke dalam kontiner, baik yang diadakensendiri atau sistem sewa, dan apabila sudah penuh baru diangkut oleh PD Kebersihan atau sesuai jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak. Cara kedua yaitu dengan menggunakan jasa pengelola kebersihan swasta dan membuangnya langsung ke TPA.

D. Pengangkutan Sampah ke TPA



Jumlah sarana angkutan/truk sampah yang dimiliki perusahaan tahun 2013 sebanyak 102 unit dan menggunakan truk sewaan sebanyak 19 rit/hari. Jumlah personil angkutan (pengemudi dan kru) sebanyak 362orang. Total ritasi angkutan sampah setiap harinya rata-rata 195-200 rit dengan rata-rata jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2013sebanyak 1.000-

1100ton/hari.Mekanisme pengangkutan sampah yang dilakukan saat ini dengan menggunakan truk *arm roll* dan *dump truck*.

E. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Hingga saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang berlokasi di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan \pm 25 Ha. Jarak tempuh TPA dari pusat kota Bandung \pm 45 Km sehingga waktu tempuh angkutan per rit sekitar 3-4 jam. Sampah yang masuk ke TPA Sarimukti berasal

dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Sistem yang digunakan adalah *Control Landfill* dengan rencana umur pakai hingga tahun 2015. Rencana selanjutnya Pemprov Jawa Barat akan membangun TPA Regional Legok Nangka.



Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu sebesar Rp.33.500/ton, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, No 658.1/06/Diskimrum, 658.1/379-PD KBR,180/61-Perj./2011, 119/Perj.22-DCKTR/2011. Besaran kompensasi yang dibayarkan PD Kebersihan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.196.601.600

Tabel 3.21 Persentasi tingkat pencapaian kegiatan per wilayah selama tahun 2013

| KOMPONEN | WILAYAH | | | | PERSENTASI |
|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Bandung Utara | Bandung Selatan | Bandung Barat | Bandung Timur | |
| Penyapuan sampah jalan | 46,95 % | > 100 % | > 100 % | 86,46 % | 83,35 % |
| Pengumpulan sampah sapuan jalan | 95,22 % | 89,47 % | > 100 % | 85,71 % | 92,6 % |
| Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar | > 100 % | sudah diserahkan ke PD Pasar | > 100 % | >100 % | 100 % |
| Volume sampah yang terangkut ke TPA | 75 % | 85,35 % | 98,59 % | 65,57 % | 81 % |
| Ritasi truk sampah | 85,39 % | 94 % | > 100 % | 89 % | 92 % |
| Rental truk sampah | > 100 % | > 100 % | > 100 % | Tidak ada rental | > 100 % |
| Tingkat pencapaian perwilayah | 83,76 % | 93,76 % | 99,76 % | 85,34 % | 91,49 % |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan terhadap program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah telah mencapai 91,49 % selama tahun 2013 dengan komponen penyapuan sampah jalan kinerja yang telah dicapai adalah 83,35 %, pengumpulan sampah sapuan jalan mencapai 92,6 %, penyapuan dan pengumpulan sampah pasar mencapai 100 %, volume sampah yang terangkut ke TPA mencapai 81 %, ritasi truk sampah mencapai 92 % dan rental truk sampah mencapai 100 %. Untuk capaian tiap-tiap bidang wilayah operasional dapat dilihat wilayah operasional Bandung Utara tingkat pencapaian 83,76 %, wilayah operasional Bandung Selatan tingkat pencapaian 93,76 %, wilayah operasional Bandung Barat tingkat capaian 99,76 % dan wilayah operasional Bandung Timur tingkat capaian 85,34 %.

Ritasi dan Volume Sampah Yang Dibuang ke TPA Sarimukti

Rata-rata jumlah sampah yang diangkut ke TPA selama tahun 2013 sebesar 382.071,12 ton dengan total ritasi sebanyak 72.678 rit, sehingga rata-rata sampah yang yang diangkut ke TPA setiap harinya sebanyak 1.060,88 ton dengan ritasi rata-rata 199 rit/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Tabel Ritasi dan Tonase Pengangkutan Sampah Ke TPA Sarimukti

| NO | BULAN | PD Kebersihan dan Rental | | NON PD Kebersihan | | Rata-rata Harian | |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| | | RITASI | TONASE | RITASI | TONASE | Ritasi | Tonase |
| 1 | JANUARI | 5.757 | 30.616,63 | 89 | 314,17 | 189 | 997,76 |
| 2 | FEBRUARI | 5.256 | 24.785,71 | 86 | 282,02 | 190 | 895,27 |
| 3 | MARET | 5.992 | 32.832,13 | 94 | 408,13 | 196 | 1.072,26 |
| 4 | APRIL | 5.641 | 32.215,29 | 91 | 375,6 | 190 | 1.086,36 |
| 5 | MEI | 6.178 | 32.215,29 | 101 | 457,65 | 202 | 1.231,49 |
| 6 | JUNI | 6.080 | 36.286,23 | 95 | 457,49 | 206 | 1.224,79 |
| 7 | JULI | 6.324 | 38.788,55 | 115 | 519,75 | 208 | 1.268 |
| 8 | AGUSTUS | 5.926 | 32.190,14 | 97 | 364,71 | 194 | 1.050,15 |
| 9 | SEPTEMBER | 6.249 | 33.876,47 | 87 | 340 | 211 | 1.140,54 |
| 10 | OKTOBER | 6.237 | 26.063,55 | 83 | 212,13 | 203 | 847,60 |
| 11 | NOVEMBER | 5.962 | 27.914,12 | 72 | 219 | 201 | 937,77 |
| 12 | DESEMBER | 5.963 | 30.002,27 | 103 | 334,09 | 196 | 978,59 |
| JUMLAH | | 71.565 | 377.786,38 | 1.113 | 4.284,74 | 199 | 1.060,88 |

F. Rencana Pemrosesan Akhir Sampah Di Kota Bandung

Permasalahan yang terjadi di Kota Bandung adalah ketidaktersediaan lahan TPA. Sejak terjadinya bencana longsor di TPA Leuwigajah tanggal 21 Februari 2005, maka Kota Bandung menghadapi permasalahan sampah yang sangat mendesak, mengoptimalkan eks TPA yang sudah ditutup sudah dilakukan namun tidak memecahkan masalah karena keterbatasan lahan eks TPA.



Sejak tanggal 27 Juni 2006 hingga saat ini, pembuangan sampah dilakukan ke TPA Sarimukti, yang merupakan TPA regional yang dikelola oleh BPSRProvinsi Jawa Barat dan diperkirakan habis umur pakainya pada tahun 2015. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan lahan TPA Regional pengganti di Legok Nangka, namun Kota Bandung tetap harus mempersiapkan tempat pengolahan sampah yang tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat dibangun didalam Kota Bandung sendiri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung akan bekerjasama dengan pihak swasta, membangun tempat pengolahan dan pemrosesan sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (PLTSa) yang berlokasi di Kecamatan Gedebage, dengan luas lahan yang disediakan \pm 20 ha (baru terealisasi 13 ha).

Teknologi yang akan digunakan adalah insinerator yang ramah lingkungan dengan kapasitas pengolahan 700 ton/hari dan dapat ditingkatkan menjadi 1000 ton/hari. Kegiatan ini mendapat bantuan teknis dari Bappenas dan hingga saat ini sedang dalam tahap pelelangan dengan *leadingsector* BPLH Kota Bandung. Perkiraan pembangunan dilaksanakan 1,5-2 tahun.

Sejak bulan Juli Tahun 2012 telah dilakukan proses pelelangan umum pengadaan badan usaha dan telah ditetapkan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Nomor : 658.1/Kep.7653-BPLH/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha. Adapun perkembangan proyek sampai saat ini Perjanjian Kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD Kota Bandung berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor : 30 Tahun 2013 tentang Persetujuan Atas Rencana Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha.

3.6.2. Wilayah Operasional

Wilayah operasional pelayanan kebersihan Perusahaan Daerah Kota Bandung meliputi seluruh wilayah Kota Bandung seluas 16.729 Ha dan terlayani ± 90% dari luas area kota Bandung. Untuk memudahkan pengaturan operasional pelayanan kebersihan di wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja. Pembagian empat wilayah operasional tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 101 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kerja PD Kebersihan dan berdasarkan pembagian wilayah administrasi Kota Bandung.

Setiap wilayah operasional dipimpin oleh Kepala Bidang Operasional, sedangkan masing-masing kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan (Siek Bercam). Berikut merupakan wilayah kerja/operasional PD. Kebersihan Kota Bandung:

| | |
|--|---|
| <p>1) Wilayah Operasional Bandung Utara yang meliputi :</p> | <p>2) Wilayah Operasional Bandung Timur yang meliputi:</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cidadap 2. Kecamatan Coblong 3. Kecamatan Sukasari 4. Kecamatan Sukajadi 5. Kecamatan Bandung Wetan 6. Kecamatan Cibeunying Kaler 7. Kecamatan Cibeunying Kidul | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Gedebage 2. Kecamatan Arcamanik 3. Kecamatan Antapani 4. Kecamatan Ujung Berung 5. Kecamatan Cibiru 6. Kecamatan Rancasari 7. Kecamatan Buah Batu 8. Kecamatan Panyileukan 9. Kecamatan Cinambo 10. Kecamatan Mandalajati |
| <p>3) Wilayah Operasional Bandung Barat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Andir 2. Kecamatan Astana Anyar 3. Kecamatan Bojongloa Kaler 4. Kecamatan Babakan Ciparay 5. Kecamatan Bandung Kulon 6. Kecamatan Bojongloa Kidul 7. Kecamatan Cicendo | <p>4) Wilayah Operasional Bandung Selatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Sumur Bandung 2. Kecamatan Kiaracondong 3. Kecamatan Regol 4. Kecamatan Lengkong 5. Kecamatan Batununggal 6. Kecamatan Bandung Kidul |

3.6.3. Peningkatan serta Optimalisasi Prasarana dan Sarana Operasional Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah

Selama tahun 2013 dilakukan peningkatan dan optimalisasi prasarana dan sarana operasional, antara lain penambahan truk, kontiner, perbaikan dan pemeliharaan bangunan TPS, penyediaan sarana penunjang kegiatan 3R, dan penambahan TPS 3R.

Tabel 3.23 Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional tahun 2013

| NO | URAIAN | JUMLAH (UNIT) |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Sarana Pengumpulan | |
| | A. Kendaraan Kancil (pick up) | 8 |
| | B. Motor Trida | 27 |
| 2 | Truk Angkutan Sampah | 116 |
| 3 | Prasarana | |
| | A. TPS | 164 |
| | B. Kontainer | 186 |
| | C. Kontainer Hijau | 6 |
| | D. Roda Hijau | 15 |
| | E. TPS 3R | 10 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | F. TPA yang digunakan | 1 |
| 4 | Mesin pengepres sampah | 1 |
| 5 | Lokasi pengomposan (eks TPA) | 1 |
| 6 | Kendaraan Patroli | 1 |
| 7 | Kendaraan Pelayanan Khusus | 4 |

3.6.4. Upaya dalam Mengefektifkan dan Mengefesiensikan Pengangkutan Sampah ke TPA melalui Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tegallega

Stasiun Peralihan Antara yang berada di lokasi TPS Tegallega mulai beroperasi pada bulan Desember 2011. Teknologi yang digunakan adalah mesin



pengepres sampah, yang merupakan bantuan dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuan dari Stasiun Peralihan Antara adalah mengefisienkan biaya pengangkutan sampah ke TPA. Dengan adanya Stasiun Peralihan Antara (SPA), ritasi pengangkutan sampah dari TPS Tegallega yang sebelumnya sebanyak 4 rit/hari menjadi 2 rit/hari dan untuk mengefektifkan operasional pengepresan, sampah yang masuk ke SPA Tegallega ditambah dari lokasi lain sehingga ritasi pengangkutan tetap 4 rit/hari.

3.6.5 Upaya Pengurangan Sampah Yang Dibuang ke TPA

Salah satu indikator keberhasilan tingkat pencapaian penanganan sampah tahun 2013 sebagaimana visi dan misi yang diemban adalah terkelolanya sampah melalui kegiatan 3R sebesar 16% dari timbulan sampah kota. Selama tahun 2013, pengurangan sampah telah dilakukan baik oleh PD Kebersihan Kota Bandung, sektor informal,

maupun masyarakat. Kegiatan pengurangan sampah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Pengurangan Sampah oleh PD Kebersihan

Kegiatan pengurangan sampah oleh PD Kebersihan dilakukan di TPS 3R meliputi kegiatan pemilahan, pencacahan, pengomposan, serta pengolahan sampah untuk menghasilkan biogas. Lokasi TPS 3R meliputi TPS Ciroyom, TPS Indramayu, TPS Gedebage, dan TD Sekelimus dan eks TPA Jelekong untuk kegiatan pengomposan. Adapun kegiatan 3R di masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

1. TPS Gedebage

Kegiatan yang dilakukan di TPS Gedebage meliputi kegiatan pemilahan dan pencacahan sampah. Sampah yang berada di TPS Gedebage berasal dari pasar Gedebage. Volume sampah yang masuk setiap harinya rata-rata sebesar $\pm 40 \text{ M}^3/\text{hari}$ atau sekitar $14.600 \text{ M}^3/\text{tahun}$. Kegiatan pencacahan di tahun 2013 kurang optimal karena pencacahan hanya dilakukan pada bulan Januari dan Februari dengan jumlah sampah organik yang masuk ke TPS sebanyak 52 m^3 dan hasil cacahan $20,2 \text{ m}^3$, untuk bulan Maret sampai dengan Desember tidak ada kegiatan pencacahan karena mesin pencacah nya rusak.

2. TPS Indramayu

Kegiatan yang dilakukan di TPS Indramayu meliputi kegiatan pemilahan, pencacahan dan pengomposan sampah. Volume sampah yang masuk setiap harinya rata-rata sebesar $35 \text{ M}^3/$

hari. Di Tahun 2013 ada kendala mesin pencacahnya rusak dan karyawan yang bertugas di TPS Indramayu alih tugas menjadi karyawan penyapu sehingga kegiatan 3R di TPS Indramayu tidak berjalan dengan optimal, jumlah sampah organik selama tahun 2013 hanya 3,5 m3 dengan hasil cacahan sebesar 0,005 m3 di bulan Februari.

3. TPS Ciroyom

| No | Bulan | Sampah Organik (M3) | Sampah Non Organik (M3) | Hasil Cacahan (M3) |
|--------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Januari | 84 | 0.007 | 42 |
| 2 | Februari | 205 | 0.017 | 102.5 |
| 3 | Maret | 96 | 0.03 | 48 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 108 | 0.009 | 54 |
| 6 | Juni | 24 | 0.002 | 12 |
| No | Bulan | Sampah Organik (M3) | Sampah Non Organik (M3) | Hasil Cacahan (M3) |
| 7 | Juli | 24 | 0 | 12 |
| 8 | Agustus | 96 | 0.008 | 48 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 348 | 29 | 174 |
| 11 | November | 48 | 0.004 | 24 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1.033 | 29.077 | 516.5 |

Kegiatan yang dilakukan di TPS Ciroyom meliputi kegiatan pemilahan dan pencacahan sampah organik yang bersumber dari pasar. Jumlah sampah organik yang sudah dipilah sebesar 1.033 m3 selama tahun 2013 atau rata-rata 86 m3 per bulan dengan hasil cacahan selama tahun 2013 sebesar 516,5 m3 atau rata-rata 43m3 per bulan. Sampah hasil cacahan dikirim ke eks TPA Jelekong seminggu 2x dengan volume \pm 6 M3. Sampah Non organik yang sudah dipilah selama tahun 2013 sebesar 29,077 M3 atau rata-rata 2,42 M3 per bulan. Jumlah sampah non organic

yang dipilah selama tahun 2013 sedikit karena di bulan April, Juli, September dan Desember tidak melakukan pemilahan. Rasio penyusutan sampah organik yang masuk dengan sampah yang dicacah adalah sebesar 50 %.

4. TPS Tegallega

Kegiatan yang dilakukan di TPS Tegallega meliputi kegiatan pengepresan sampah dengan sumber sampah berasal dari pemukiman, jalan dan fasilitas umum. Sebelum ada mesin pengepres sampah volume sampah yang masuk ke TPS Tegallega $\pm 70 \text{ M}^3/\text{hari}$ dengan jumlah ritasi ke TPA sebanyak 7 rit/ hari. Setelah ada mesin pengepres sampah volume sampah yang masuk ke TPS Tegallega bertambah menjadi $\pm 160 \text{ M}^3/\text{hari}$, dengan tujuan mengefektifkan operasional pengepresan dimana sampah yang masuk ke TPS Tegallega ditambah dari lokasi lain. Ritasi pengangkutan sampah ke TPA dari TPS Tegallega setelah ada mesin pengepres sampah menjadi 4 - 5 rit/hari.

5. Ex TPA Jelekong

Kegiatan yang dilakukan di eks TPA Jelekong meliputi kegiatan pengomposan dengan bahan baku berasal dari TPS Ciroyom, TPS Astanaanyar, TPS Gedebage, dan TPS Tegallega. PD. Kebersihan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan The Emission Reduction Company (ERC) tentang pengolahan sampah di eks TPA Jelekong. Adapun ruang lingkup kerjasama dengan PT ERC meliputi memanfaatkan lahan dan landfill eks TPA Jelekong serta memanfaatkan sumber daya manusia dan warga sekitar es TPA Jelekong dalam kegiatan produksi kompos dan bahan lainnya. Kegiatan yang sudah berlangsung di eks TPA Jelekong sudah ada penyerahan kompos dari PD. Kebersihan kepada pihak PT ERC.

Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| No | Tanggal | Jumlah Kompos (kg) | Harga Kompos (kg) | Total Harga (Rp) | Keterangan |
|----|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| 1 | 04/01/2013 | 5.972,5 | Rp 220 / kg | 1.313.950,- 300.000 | Tagihan untuk bulan maret Biaya sewa gudang |
| 2 | 13/05/2013 | 0 | Rp 220 / kg | 0 300.000 | Biaya sewa gudang |
| 3 | 06/06/2013 | 798 | Rp 220 / kg | 175.560 300.000 | Tagihan untuk bulan Mei Biaya sewa gudang |
| 4 | 05/07/2013 | 5.398 | Rp 220 / kg | 1.187.560 300.000 | Tagihan untuk bulan Juni Biaya sewa gudang |
| 5 | 06/08/2013 | 0 | Rp 220 / kg | 0 300.000 | Tagihan untuk bulan Juli Biaya sewa gudang |
| 6 | 06/09/2013 | 0 | Rp 220 / kg | 0 300.000 | Tagihan untuk bulan Agustus Biaya sewa gudang |

| No | Tanggal | Jumlah Kompos (kg) | Harga Kompos (kg) | Total Harga (Rp) | Keterangan |
|----|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 7 | 07/10/2013 | 800 | Rp 220 / kg | 176.000 | Tagihan untuk bulan September |
| 8 | 12/11/2013 | 800 | Rp 220 / kg | 176.000 300.000 | Tagihan untuk bulan Oktober Biaya sewa gudang |
| 9 | 12/12/2013 | 10.000 | | 300.000 | Tagihan untuk bulan November kompos dari cieunteung Biaya sewa gudang |
| 10 | 12/01/2014 | 20.000 | | 300.000 | Tagihan untuk bulan Desember kompos matang dari Cieunteung Biaya sewa gudang |
| | TOTAL | 43.768,5 | | 5.729.070 | |

Kendala yang dihadapi dilapangan adanya penanaman lahan penambangan oleh masyarakat sehingga pihak ERC harus membayar pembebasan lahan Rp. 300/ pohon untuk itu pihak

ERC meminta agar tidak ada lagi warga yang menanam di lahan penambangan.

6. TD Sekelimus

Kegiatan yang dilakukan di TD Sekelimus merupakan kegiatan pengolahan sampah menjadi biogas. Sampah yang masuk ke TD Sekelimus adalah sampah organik yang berasal dari sampah pasar Ciroyom, Astana Anyar, lingkungan sekitar, serta Bandung Supermal. Volume sampah yang masuk sekitar 92.400 kg selama tahun 2013 atau sekitar 253, kg/ hari.

7. Pemanfaatan Sampah

Pembentukan usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah adalah upaya mengguna ulang sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu dibuatlah SK Direksi Nomor: 685.1/Kep.3634-PDKBR/2012 tentang Pembentukan Usaha Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah. Untuk pengolahan dan pemanfaatan sampah saat ini baru sampai pada tahap persiapan, dimana saat ini sedang dipersiapkan lahan, barang, peralatan dan sumber daya manusia. Adapun lahan yang sedang dipersiapkan saat ini adalah di Pool Sekelimus. Untuk kedepannya diharapkan setiap kecamatan mempunyai 1 TPS pemilahan sehingga target pengurangan sampah melalui kegiatan 3R sebesar 20% bisa tercapai.

Selama 6 bulan pelaksanaan masih berupa persiapan adapun persiapan yang telah dilakukan adalah persiapan lahan, tenaga kerja dan persiapan sumber barang. Dari 35 truk pengangkut sampah yang telah diperkirakan siap untuk melakukan

pemilahan baru 4 truk yang telah melakukan pemilahan. Adapun sampah yang dipilah berasal pengangkutan sampah wilayah utara dan wilayah selatan. Sedangkan untuk biaya yang telah dikeluarkan kurang lebih telah dibayarkan Rp. 20.800.000,- yang dialokasikan untuk pembelian timbangan 2 biji @ Rp 5.000.000,- dan untuk pembayaran biaya gaji pegawai THL 4 orang @ Rp. 75.000,- hari.

Dari pemilahan yang telah dilakukan telah terpilah barang antara lain :

| Jenis barang | Banyaknya | Satuan |
|--------------|-----------|--------|
| Mn | 1.200 | Kg |
| Aqua gelas | 1.180 | Kg |
| Besi | 2.150 | Kg |
| Pk | 400 | Kg |
| Aluminium | 20 | Kg |
| Duplek | 100 | Kg |
| Emberan | 1.100 | Kg |
| Keresek | 100 | Kg |

Sumber : Hasil wawancara dengan kabid PTU

Dari kegiatan pemilahan tersebut sistem yang dipakai masih berupa mekanisme bandar dimana barang yang telah terpilah lalu dikumpulkan untuk kemudian dijual, walaupun tujuan utamanya adalah menjadi bank sampah. Dari hasil pemilahan tersebut telah didapat hasil penjualan sebesar Rp 20.000.000,-.

Kendala utama dari kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sampah ini adalah :

- Sarana prasarana yang kurang memadai seperti lahan yang kurang luas untuk menampung barang serta bangunan untuk memilah sampah yang kurang layak karena sering bocor sehingga mengakibatkan terhambatnya pemilahan apabila sedang turun hujan.
- Kurangnya tenaga trampil pemilah sehingga mengakibatkan antrian barang yang akan dipilah.
- Kurangnya dana untuk kegiatan pemilahan ini karena dari rencana awal modal yang disetor Rp. 100.000.000 baru disetor Rp. 50.000.000 dari perusahaan sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan pemilahan.

B. Pengurangan Sampah oleh Sektor Informal dan Masyarakat

Pengurangan sampah anorganik juga dilakukan oleh sektor informal atau pemulung yang berada di TPS sedangkan pengurangan sampah di sumber oleh masyarakat meliputi kegiatan pemilahan, pengomposan, pemanfaatan sampah, bank sampah, serta pengolahan sampah organik dengan biomethageen untuk menghasilkan biogas. Pengurangan sampah di sumbernya tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah tinggal namun juga di sekolah, perkantoran & komersil melalui kegiatan pemilahan dan pemanfaatan sampah. Jumlah pengurangan sampah oleh sektor informal dan masyarakat (\pm 891 orang) selama tahun 2013 sekitar 7 - 9% dari timbulan sampah 1500 ton.

Dari paparan diatas, jumlah sampah yang tereduksi di TPS oleh PD Kebersihan di 10 lokasi TPS 3R mencapai \pm 9% dari jumlah sampah yang masuk ke TPS, sedangkan untuk pengurangan sampah di sumbernya (permukiman, daerah komersial, sekolah, pasar,

perkantoran, dll) oleh masyarakat maupun sektor informal, selama tahun 2017 tercapai \pm 7%. Dengan demikian target pengurangan sampah melalui kegiatan 3R pada tahun 2013 sebesar 20 % telah tercapai.

3.6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3R

Pengadaan sarana dan prasarana 3R dilakukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan 3R di baik masyarakat maupun pelaksanaan 3R di TPS yang diselenggarakan oleh PD.Kebersihan.

Selama tahun 2013 dilakukan pengadaan prasarana dan sarana 3R serta pemeliharaan sarana prasarana, antara lain:

1. Penataan TPS 3R dan penambahan beberapa TPS menjadi TPS 3R, antara lain TPS Cibeunying, TD Nyengseret, TPS Cibatu, TPS Subang, TPS Ciwastra, dan TPS Pasar Astana Anyar
2. Penataan dan pemeliharaan Eks TPA Jelekong sebagai tempat pengomposan
3. Pengadaan sarana yang mendukung program 3R selama tahun 2013 antara lain:
 - Pemasangan dan pengadaan tong sampah pejalan kaki 788 buah, tong sampah terpilah 25 lt sebanyak 788 buah.
 - Penyebaran keranjang Takakura sebanyak 42 buah
 - Pengadaan drum komposter sebanyak 40 buah



Gambar 3.1. Sarana Pendukung Kegiatan 3R

3.6.7 Kendala dan Upaya Kegiatan Operasional Pelayanan Pengelolaan Sampah

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah, perusahaan juga mengalami kendala dalam hal kegiatan operasionalnya, antara lain:

- Masih kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana pelayanan sampah, antara lain kurangnya jumlah truk angkutan. Pada tahun 2013 dilakukan penambahan truk angkutan sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yaitu 1 (satu) unit mobil sapu, 2 (dua) unit LH, Compactor 6 m³ 5 (lima) unit, Compactor 10 m³ (lima), merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 4 (empat) unit berasal dari pengadaan sendiri. Total sarana angkutan/truk sampah pada tahun 2013 sebanyak 116 unit dengan rata-rata truk yang jalan setiap harinya sekitar 101 unit. Jumlah tersebut masih kurang memadai ditambah dengan kondisi usia truk yang sudah melebihi umur pakai. Selain itu, jumlah kontiner besi dan TPS juga masih kurang mencukupi.
- Jarak tempuh dari TPS ke TPA Sarimukti yang cukup jauh, yaitu ± 45 km dari pusat Kota Bandung ditambah dengan kendala kemacetan di jalur Padalarang – Cipatat juga mempengaruhi waktu tempuh ± 3 – 4 jam.
- Belum tersedianya TPA / tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan di Kota Bandung. Rencana selanjutnya pemerintah Provinsi akan membangun TPA Regional di Legok Nangka (Tahun 2010 sudah dilakukan pembebasan lahan).

Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penambahan sarana dan prasarana operasional secara bertahap. Penambahan sarana dan prasarana dilakukan baik melalui pengadaan sendiri maupun permohonan bantuan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bandung untuk pengadaan truk angkutan sampah.
- Mengefisiensikan pengangkutan sampah yang dibuang ke TPA melalui Stasiun Peralihan Antara (SPA) dengan menggunakan mesin pengepres sampah.

3.7. Peran Serta Masyarakat

Aspek peran serta masyarakat juga merupakan aspek penting dalam kegiatan pengelolaan sampah karena tanpa peran serta masyarakat maka kegiatan pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal. Masyarakat selaku penghasil sampah harus ikut berperan dalam pengelolaan sampah sebagaimana amanat dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Upaya yang dilakukan PD Kebersihan untuk mendorong peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut :

1. Rutin melakukan kegiatan sosialisasi di baik secara tatap muka langsung dengan masyarakat baik di tingkat sekolah, RW, maupun masyarakat umum, serta di berbagai media baik elektronik maupun media cetak.
2. Mempersiapkan dan membuat sarana sosialisasi baik berupa materi presentasi, leaflet, brosur dan sejenisnya yang disebarakan ke masyarakat baik pada saat pameran atau acara-acara lainnya.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak Akademis, Pemerintah maupun swasta dalam hal pengolahan sampah menjadi biogas maupun pengelolaan kebersihan di unit-unit Pasar Kota Bandung.
4. Memberikan informasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PD Kebersihan serta memberikan respon yang cepat atas pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dilakukan terus menerus dan diprogramkan setiap tahun. Pengelolaan sampah dengan melibatkan pihak swasta melalui kegiatan kerjasama pemanfaatan sampah organik maupun anorganik terus dilaksanakan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi maupun materi yang terdapat di media informasi lainnya meliputi pemaparan pengelolaan sampah di Kota Bandung, sosialisasi untuk membayar jasa pelayanan kebersihan, termasuk pembuatan MoU dengan RW, peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, pengurangan sampah atau pengolahan sampah sederhana yang mudah dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya. Upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat juga dilakukan melalui pemberian bantuan sarana kebersihan berupa tong sampah, penyebaran keranjang komposter dan pemasangan tong sampah untuk pejalan kaki, serta penyuluhan pengolahan sampah sederhana yang dapat dilakukan di masyarakat.

Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di Kecamatan, Kelurahan dan di lingkungan RW. Selama tahun 2013, telah dilakukan sosialisasi di 10 kecamatan, 12 kelurahan, 100 RW, dan 40 RT. Untuk wilayah



yang belum mendapatkan sosialisasi akan dilakukan penjadwalan ulang.

2. Sosialisasi yang dilakukan dilembaga pendidikan adalah di TK Amaliyah dan PAUD Kota Bandung, 7 SD, 1 SMP, 2 SMA dan 12 Perguruan Tinggi.
3. Pengaduan melalui media elektronik sebanyak 205 kali, melalui twitter sebanyak 97 kali dan melalui LAPOR sebanyak 63 kali.
4. Kegiatan talkshow di media elektronik pentingnya kebersihan dan kesadaran membayar jasa pelayanan kebersihan serta pelaksanaan 3 R di telah dilaksanakan sebanyak 24 kali dan melalui televisi sebanyak 15 kali.
5. Sosialisasi dan penayangan di media cetak telah dilaksanakan sebanyak 248 kali.
6. Penyebaran komposter /keranjang takakura sebanyak 42 buah dan 40 buah untuk drum komposter kepada RW, Kelurahan, maupun sekolah yang telah diberi sosialisasi 3R.
7. Pengadaan tong sampah terpilah selama tahun 2013 sebanyak 250 pasang, sedangkan yang telah terealisasi sebanyak 788 pasang dan pengadaan tong sampah pejalan kaki sebanyak 250 buah terealisasi 100 unit.



Saat ini PD Kebersihan pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melakukan kegiatan pengolahan sampah di lingkungannya yang dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS atau TPA melalui dukungan sarana dan prasarana sesuai kemampuan PD Kebersihan. Kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah masih kurangnya peran serta masyarakat dalam hal kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk melakukan

pengurangan sampah disumber, melakukan pembayaran jasa pelayanan kebersihan secara rutin, serta melaksanakan kegiatan 3R.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan terus melakukan upaya-upaya antara lain:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran jasa pelayanan kebersihan
- Melakukan sosialisasi untuk membuang sampah pada tempatnya serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah disumber
- Bermitra dengan masyarakat yang telah melakukan pengurangan sampah di sumber atau di lingkungannya
- Mengembangkan konsep Bank Sampah yang bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga kemasyarakatan

BAB IV

ANALISIS KINERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

4.1. Kinerja Keuangan PD. Kebersihan

Dalam menganalisis kinerja keuangan PD Kebersihan, data yang dipergunakan adalah data laporan keuangan yang telah diaudit selama kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang yaitu dari tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 4.1. Ikhtisar Penerimaan PD Kebersihan Tahun 2013 (Rp)

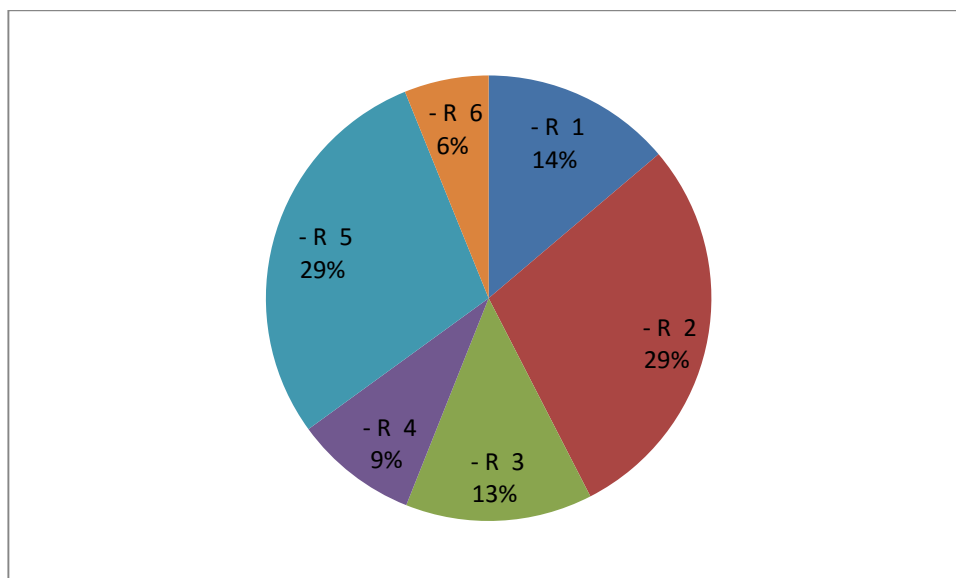
| NO | URAIAN | TAHUN 2013 | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % Pencapaian | Proporsi |
| PENERIMAAN OPERASIONAL | | | | | |
| 1 | Rumah Tinggal | 8,506,844,000 | 9,017,166,275 | 89,7 | 43% |
| 2 | Usaha Komersial | 10,669,757,000 | 10,305,439,311 | 88,1 | 49% |
| 3 | Pedagang Pasar | 3,404,160,000 | 1,543,838,900 | 45,3 | 7% |
| 4 | Angkutan Umum | 426,960,000 | 139,270,000 | 32,6 | 1% |
| 5 | Pelayanan Khusus | 30,000,000 | 18,812,000 | 62,7 | 0% |
| 6 | Kompos | - | 3,158,070 | 100 | 0% |
| Jumlah penerimaan Operasional | | 23,037,721,000 | | 21,027,684,556 | 81,4 |
| PENERIMAAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| 1 | Jasa Bank | 125,000,000 | 96,291,515 | 77 | 0% |
| 2 | Subsidi | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | 100 | 99% |
| 3 | Lainnya | 291,472,000 | 30,315,539 | 165 | 0% |
| Jumlah Penerimaan Non Operasional | | 88,454,193,000 | | 65,578,461,583 | 74 |
| Total Penerimaan | | 88,454,193,000 | | 84,323,787,702 | 95 |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

4.1.1. Database Wajib Bayar dan Kontribusi Terbesar Pendapatan Tarif Jasa Kebersihan

Dari sisi pendapatan operasional, kontribusi terbesar adalah berasal dari usaha komersial yang hampir sebesar 50% nya. Sedangkan dari rumah tinggal hanya menempati urutan kedua atau sebesar 43% nya. Hal ini merupakan gambaran realitas bahwa hanya 51% masyarakat Kota Bandung yang membayar retribusi sampah (Bappeda Kota Bandung, 2014). Hal tersebut seyogyanya ditindaklanjuti baik dari sisi PD Kebersihan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan retribusi serta penyesuaian besaran subsidi dari Pemkot Bandung sebagai kompensasi biaya operasional pengelolaan sampah dari warga Kota Bandung yang tidak membayar retribusi sampah sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 316 tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

Grafik 4.1. Pendapatan Operasional Rumah Tinggal Tahun 2013 (Rp)



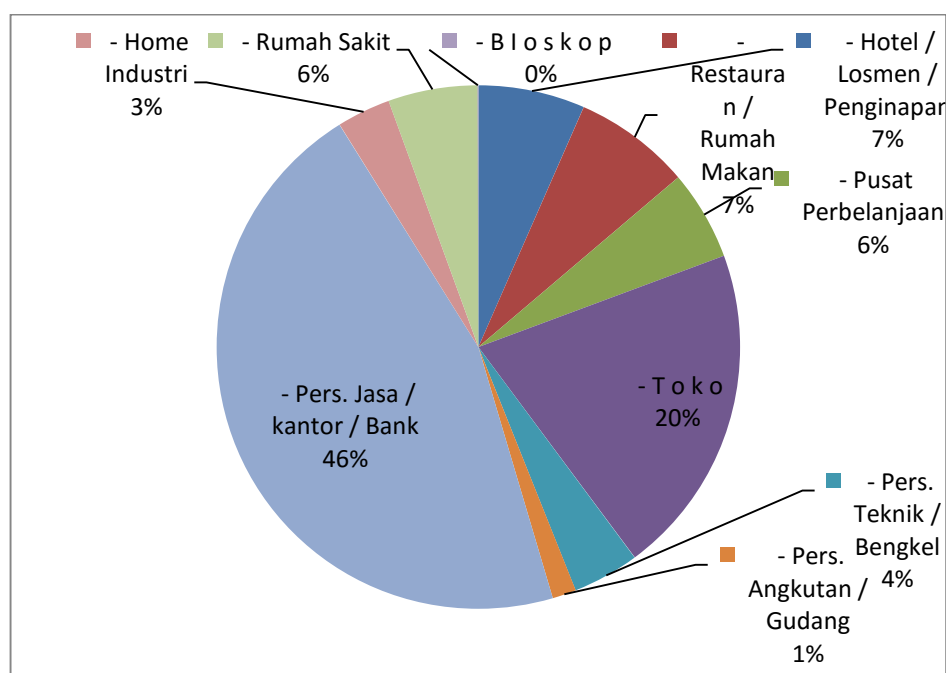
Sumber: PD Kebersihan, 2014

Dari sisi pendapatan rumah tinggal/pemukiman, kelas R2 dan kelas R5 yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan jasa

kebersihan rumah tinggal/pemukiman. Hal ini perlu mendapat konfirmasi khususnya terkait dengan perbandingan jumlah rumah di Kota Bandung untuk tingkatan kelas R2 dan R5 yang memang mendominasi total jumlah rumah di Kota Bandung atau tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa PD Kebersihan dalam upaya penagihan rumah tinggal/pemukiman harus mengacu pada jumlah rumah berdasarkan klasifikasi kelasnya guna mengukur keberhasilan upaya penagihan jasa kebersihan.

Dari sumber penagihan komersial dan non komersial, sumber pendapatan dari perusahaan yang mendominasi sumber pemasukan. Hal ini sama halnya dengan jasa kebersihan rumah tinggal bahwa perlu dikonfirmasi kesesuaian jumlah Wajib Bayar dari sumber komersial dan non komersial dengan realisasi pendapatannya guna mengukur efektivitas penagihan serta yang terpenting adalah sebagai bahan pemetaan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Grafik 4.2. Pendapatan Operasional Rumah Tinggal Tahun 2013 (Rp)



Sumber: PD Kebersihan, 2014

4.1.2. Pencatatan Pos Subsidi Dalam Pendapatan Non-Operasional Serta Urgensi Perhitungan Detail Beban Pengelolaan Sampah Sebagai Dasar Subsidi

Pos subsidi yang ada dalam ikhtisar pendapatan PD Kebersihan di tabel 4.1 merupakan komponen dari biaya penyapuan, pengangkutan, pemrosesan, dan biaya kompensasi (*tipping fee*) ke TPA Sarimukti (lihat tabel 4.2). Penggunaan dana subsidi dalam bentuk *tipping fee* merupakan pembayaran dari Pemerintah Kota Bandung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pencatatan di PD Kebersihan. Disamping itu, biaya penyapuan, pengangkutan, dan pengelolaan di TPA merupakan *Public Service Obligation* yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada PD Kebersihan. Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 41 belanja subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Selain dari itu, sumber pendapatan non operasional tampak masih mendominasi sumber total pendapatan PD Kebersihan. Jumlah ini didominasi oleh pos subsidi Pemerintah Kota Bandung. Pola pelaporan keuangan seperti ini sebenarnya tidak mencerminkan kondisi nyata kinerja PD Kebersihan. Hal ini disebabkan oleh pencatatan keuangan dari *Public Service Obligation* seperti biaya penyapuan dan *tipping fee* seharusnya masuk ke dalam pos pendapatan operasional. Subsidi dapat saja masuk ke dalam pos pendapatan operasional, namun dengan catatan bahwa jumlah nominal yang masuk adalah bersifat subsidi murni yaitu seperti yang telah diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 41 ayat 1 dimana subsidi merupakan “..bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak”. Sehingga selisih biaya jasa pengelolaan sampah

yang tidak dapat dibayarkan oleh masyarakat Kota Bandung dapat menjadi sumber bantuan biaya produksi kepada PD Kebersihan.

Dalam aspek keuangan, pencatatan pendapatan dari Pemkot Bandung seharusnya dicatat sebagai pendapatan operasional PD Kebersihan karena merupakan pendapatan yang berasal dari bisnis utama PD Kebersihan, bukan dari bisnis sampingan. Dalam hal ini pencatatan ekstra telah disediakan oleh PD Kebersihan dalam mendukung kebutuhan Peraturan tersebut khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Namun, disisi PD Kebersihan subsidi tersebut seyogyanya dicatat sebagai salah satu komponen biaya operasional bukan pada pos pendapatan non operasional. Hal ini akan berimplikasi pada PD Kebersihan khususnya terhadap sumber pendapatan operasional yang jauh lebih kecil dibandingkan non operasionalnya.

Tabel 4.2. Alokasi Penggunaan Subsidi Tahun 2013 (Rp)

| URAIAN | BESARAN BIAYA (RP) | REALISASI (RP) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Subsidi kepada PD Kebersihan | | |
| a. Beban Penyapuan | 18.661.605.000 | 19.289.841.773 |
| b. Beban Pengangkutan | 32.314.950.000 | 31.302.472.407 |
| c. Beban Pembuangan | 757.445.000 | 786.074.576 |
| Subsidi untuk Biaya Kompensasi KJP dan KDN ke TPA Sarimukti | 13.266.000.000 | 14.877.319.080 |
| Jumlah | 65.000.000.000 | 66.255.707.836 |

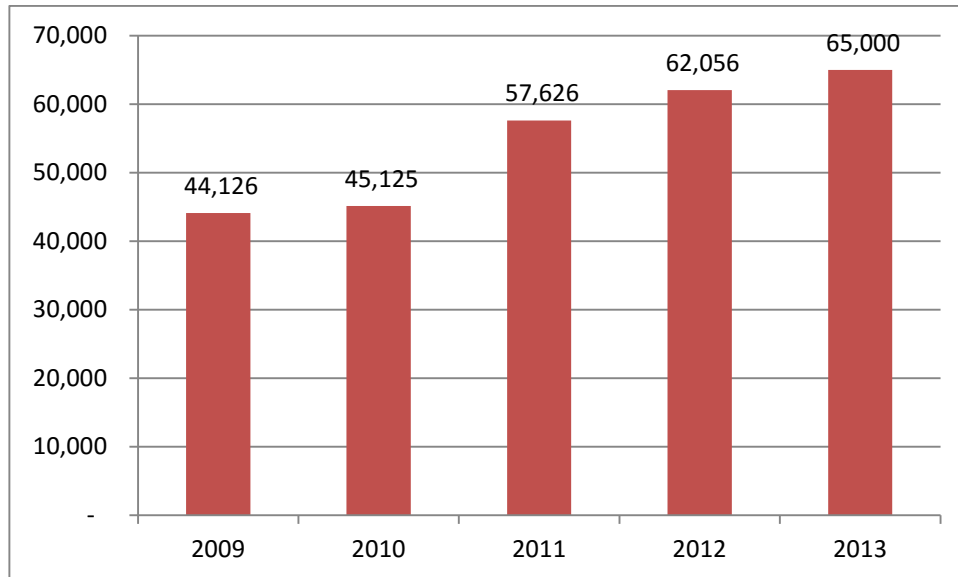
Sumber: PD Kebersihan, 2014

Dari besaran pos *Public Service Obligation* atau dalam hal ini disebut sebagai Subsidi, besaranmya meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa jika pola operasi yang

ada tidak mengalami perubahan, maka trend besaran subsidi akan mengalami peningkatan secara gradual. Selain itu, Pemkot Bandung dan PD Kebersihan secara bersama-sama perlu meninjau kebutuhan Subsidi ini secara spesifik. Sebagai contoh dalam Beban Penyapuan, maka PD Kebersihan perlu memberikan standar pelayanan kepada Pemkot Bandung serta detail perhitungan per *man power* tenaga penyapu yang melayani penyapuan jalan protocol di Kota Bandung yang menjadi dasar tagihan kepada Pemkot Bandung. Contoh lain adalah dalam hal Beban Pengangkutan dan Beban Pembuangan, PD Kebersihan perlu memiliki perhitungan detail terhadap dari beban-beban ini khususnya yang terkait dengan beban operasional yang merupakan tanggung jawab dari Pemkot Bandung yang harus dianggarkan dalam APBD. Seperti yang telah diatur dalam PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pasal 31 dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Adapun kompensasi tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sama halnya tentang urgensi adanya perhitungan detail beban pengelolaan persampahan dari awal hingga akhir adalah sebagai dasar retribusi jasa umum sampah yang menurut Permendagri No 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah terdiri dari:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.

Grafik 4.3. Jumlah Subsidi Pemerintah Kota Bandung 2009 – 2013 (Rp Juta)



Sumber: PD Kebersihan, 2014

4.1.3. Sumber Pendapatan Dari Kompos

Dengan mengacu pada Perda No 14 Tahun 2011, *core business* PD Kebersihan memiliki antara lain:

1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
3. Pelayanan kebersihan;
4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan

Berdasarkan Perda tersebut, pengolahan dan pemanfaatan sampah merupakan aspek sumber pendapatan PD Kebersihan yang perlu ditingkatkan kinerjanya guna menopang kinerja PD Kebersihan secara keseluruhan.

Dari sisi sumber pendapatan lain yang kurang menonjol dan sebenarnya dapat merupakan potensi terbesar dari PD Kebersihan adalah pendapatan yang berasal dari kompos yang hanya berjumlah Rp 3.000.000 selama kurun waktu 1 tahun. Sebagai sumber

pendapatan operasional, PD Kebersihan seyogyanya dapat meningkatkan sumber pendapatan kompos yang berbahan baku sampah organik. Hal ini tentunya harus mendapat dukungan penuh dari aspek operasi khususnya dalam upaya meningkatkan jumlah sampah organik yang terilah dari sumbernya serta aspek bisnis khususnya dalam memasarkan output kompos yang selama ini kurang diminati oleh masyarakat pengguna pupuk.

Terkait dengan hal tersebut, sudah sangat perlu dibangun sebuah struktur organisasi baru melalui direktorat bisnis yang menangani percepatan peningkatan kinerja dan pendapatan dari seluruh *core business* selain dari jasa pelayanan kebersihan kota.

4.1.4.Potensi Peningkatan Pendapatan Dari Rumah Tangga

Jika dibandingkan antara sumber sampah dengan pendapatan operasional jasa sampah, proporsi terbesar sumber sampah adalah berasal dari rumah tinggal/pemukiman yang hampir 66% nya, dan dari sumber usaha komersial hanya hampir 6%. Sedangkan dari sisi pendapatan komposisi terbesar adalah dari sumber komersial dan non komersial.Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian optimalisasi sumber pendapatan khususnya dari rumah tinggal/pemukiman dengan usaha komersil yang dapat disebabkan dari besaran tariff sampah dan atau jumlah masyarakat yang membayar.Dari hal tersebut sebenarnya masih besar potensi pendapatan yang dapat digali lebih jauh dari sumber rumah tinggal.

Tabel 4.3. Sumber Sampah Kota Bandung

| No | Sumber | Ton | % |
|----|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | Pemukiman | 983,40 | 65,56 |
| 2 | Pasar | 281,55 | 18,77 |
| 3 | Jalan | 82,80 | 5,52 |
| 4 | Daerah Komersil | 89,85 | 5,99 |
| 5 | Institusi | 42,15 | 2,81 |
| 6 | Industri | 20,25 | 1,35 |
| | JUMLAH | 1.500,00 | 100 |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

Berdasarkan pada tabel 4.4.dibawah ini, memperjelas kinerja intensifikasi pendapatan dari rumah tinggal perlu terus ditingkatkan dimana sumber dari rumah tinggal mengalami tren yang menurun. Adapun tren yang meningkat pada tahun 2013 diyakini sebagai akibat dari penerapan tariff jasa kebersihan yang baru.Namun belum menjamin terjadinya peningkatan jumlah Wajib Bayar.Sehingga diperlukan kajian yang spesifik tentang peningkatan potensi pendapatan serta mekanisme penagihan yang optimal bagi PD Kebersihan khususnya dari sumber rumah tinggal/pemukiman. Bagaimanapun juga, secara paralal kajian tentang peningkatan potensi pendapatan tersebut harus tetao didukung oleh pengkinian database Wajib Bayar yang akan menjadi dasar pengukuran kinerja PD Kebersihan khususnya dalam hal intensifikasi sumber pendapatan.

Tabel 4.4. Sumber Tagihan PD Kebersihan 2008 – 2013 (Rp)

| TAHUN | SUMBER TAGIHAN | | | JUMLAH |
|-------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| | RUMAH TINGGAL | KOMERSIAL & NON KOMERSIAL | PASAR, PKL & ANGK.UMUM | |
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 2008 | 6,300,558,000 | 5,154,884,560 | 2,120,691,600 | 13,576,134,160 |
| 2009 | 6,114,610,500 | 5,488,962,115 | 2,371,212,400 | 13,974,785,015 |
| 2010 | 5,890,610,000 | 5,990,597,700 | 2,413,069,500 | 14,294,277,200 |
| 2011 | 5,987,838,000 | 6,474,395,250 | 2,401,796,200 | 14,864,029,450 |
| 2012 | 5,774,560,000 | 7,376,896,232 | 1,916,667,100 | 15,068,123,332 |
| 2013 | 9,017,166,275 | 10,305,439,311 | 1,705,078,970 | 21,027,684,556 |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

4.1.5. Efisiensi Operasional Melalui Pemilahan Sampah di Sumber

Dari aspek pengeluaran, komponen terbesar adalah biaya pengangkutan ke TPA. Hal ini mengindikasikan bahwa jika PD Kebersihan tidak mampu mengendalikan jumlah sampah yang terkirim ke TPA maka kondisi keuangan PD Kebersihan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Hal ini dapat dilakukan jika PD Kebersihan dapat mengendalikan dalam pengurangan jumlah sampah yang dikirim ke TPA melalui pemilahan sampah di sumber.

Tabel 4.5. Sumber Sampah Kota Bandung

| Sumber Sampah | Organik | Non-organik |
|-------------------------------|---------|-------------|
| Rumah Tinggal | 56% | 44% |
| Non Rumah Tinggal | 48% | 52% |
| Rata-Rata Sampah Kota Bandung | 52% | 48% |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

Hal ini sangat berdasar jika melihat komposisi sampah Kota Bandung yang memiliki komposisi yang hampir sama antara sampah organik

dengan sampah non organic. Potensi efisiensi ini dapat dijalankan bersamaan dengan peningkatan potensi sumber pendapatan. Efisiensi operasional ini memiliki kondisi yang berat yaitu telah terpilahnya sampah di sumber. Hal ini menuntut kerja keras semua aspek masyarakat yang diharapkan dapat dimotori oleh PD Kebersihan dalam merubah perilaku masyarakat Kota Bandung khususnya dalam memilah sampah di sumbernya.

Tabel 4.6. Pengeluaran Operasional PD Kebersihan Tahun 2013

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % REALISASI | PROPORSI |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| PENGELUARAN OPERASIONAL | | | | |
| BEBAN POKOK | | | | |
| Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan | 19,122,313,000 | 18,189,360,803 | 95 | 22% |
| Beban Penyapuan Dan Kebersihan Pasar | 2,524,895,000 | 1,854,100,818 | 73 | 2% |
| Beban Pembuangan ke TPA/Angkutan | 34,563,900,000 | 31,811,783,858 | 92 | 38% |
| Beban Pengelolaan TPA | 17,107,006,000 | 14,648,784,825 | 86 | 17% |
| Beban Pokok Lainnya | 3,687,075,000 | 2,432,824,614 | 66 | 3% |
| BEBAN USAHA | | | | |
| Beban Penagihan | 3,906,099,000 | 4,827,279,819 | 124 | 6% |
| Beban Adminstrasi Umum | 9,968,322,000 | 8,128,212,966 | 80 | 10% |
| Investasi | 3,040,113,000 | 2,586,230,480 | 85 | 3% |
| Belanja Lain-lain | 3,167,638,649 | 103,563,130 | 17 | 0% |
| JUMLAH PENGELUARAN OPERASIONAL | 97,087,361,649 | 84,582,141,313 | 87 | 100% |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

Sehingga, secara tidak langsung kondisi keuangan PD Kebersihan akan mampu lebih baik jika PD Kebersihan mampu mengefisiensikan biaya-biaya operasional. Selain itu terdapat komponen biaya yang

terbesar kedua dan ketiga adalah biaya penyapuan dan pengelolaan TPA. Program efisiensi yang harus dilakukan oleh PD Kebersihan haruslah mencerminkan kondisi proses bisnis utama yang ada pada Kebersihan, selain dari upaya-upaya peningkatan potensi pendapatannya secara simultan.

4.1.6. Kesesuaian Tarif Jasa Dengan Kondisi Riil Biaya Pengelolaan Sampah

Dari aspek sumber tagihan, hal yang perlu dicermati dalam menganalisis sumber kerugian PD Kebersihan khususnya dari aspek keuangan adalah besaran tariff yang saat ini berlaku di Kota Bandung. Sesuai dengan Perwal 316 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah sesuai Perwal 316 Tahun 2013

| No | Golongan Wajib Bayar Jasa Pengelolaan Sampah | Besaran Tarif (Rp) |
|------|---|--------------------------|
| I | Rumah Tinggal : | |
| | Kelas 1 (DL. 450 VA, LT. 60 M ² , LB. 27 M ²) | 3.000,00/bulan |
| | Kelas 2 (DL. 900-1300 VA, LT. >60-100 M ² , LB. >27-60 M ²) | 5.000,00/bulan |
| | Kelas 3 (DL. >1300-2200 VA, LT. >100-200 M ² , LB. >60-150 M ²) | 7.000,00/bulan |
| | Kelas 4 (DL. >2200-3600 VA, LT. >200-350 M ² , LB. >150-250 M ²) | 10.000,00/bulan |
| | Kelas 5 (DL. >3600-6600 VA, LT. >350-500 M ² , LB. >250-350 M ²) | 15.000,00/bulan |
| | Kelas 6 (DL. >6600 VA, LT. >500 M ² , LB. >350 M ²) | 20.000,00/bulan |
| II. | Komersial | 60.000,00/M ³ |
| III. | Non Komersial | 50.000,00/M ³ |
| IV. | Sosial | 45.000,00/M ³ |
| V. | Pedagang Sektor Informal | 1.000,00/hari |

| | | |
|-----|-----------------|----------------|
| VI. | Angkutan Umum : | |
| | Angkot | 1.000,00/hari |
| | Taxi | 1.000,00/hari |
| | Minibus/non bus | 3.000,00/hari |
| | Bus Umum | 5.000,00/hari |
| | Bus Pariwisata | 10.000,00/hari |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

Berdasarkan besaran tariff yang baru ditetapkan tahun 2013 setelah aturan sebelumnya yang baru dikinikan dari tahun 2002, tariff tersebut masih belum mencerminkan biaya pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan sampah akhir. Adapun acuan dari pernyataan tersebut adalah dari kajian yang tengah dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung yang memberikan informasi untuk besaran tahun 2014 adalah dengan rata-rata tariff Rp 20,562 per bulan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.8. Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah sesuai Biaya Operasional

| No | Golongan Wajib Bayar Jasa Pengelolaan Sampah | Besaran Tarif (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| I | Rumah Tinggal : | |
| | Kelas 1 (DL. 450 VA, LT. 60 M ² , LB. 27 M ²) | 8,017,00/bulan |
| | Kelas 2 (DL. 900-1300 VA, LT. >60-100 M ² , LB. >27-60 M ²) | 16,034,00/bulan |
| | Kelas 3 (DL. >1300-2200 VA, LT. >100-200 M ² , LB. >60-150 M ²) | 24,051,00/bulan |
| | Kelas 4 (DL. >2200-3600 VA, LT. >200-350 M ² , LB. >150-250 M ²) | 32,067,00/bulan |
| | Kelas 5 (DL. >3600-6600 VA, LT. >350-500 M ² , LB. >250-350 M ²) | 40,084,00/bulan |
| | Kelas 6 (DL. >6600 VA, LT. >500 M ² , LB. >350 M ²) | 48,101,00/bulan |

Sumber: Bappeda Kota Bandung, 2014

Berdasarkan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan di atas 2 (dua) kali lipat dari tarif yang baru berlaku 1 (satu) tahun tersebut. Sebagai implikasinya maka Pemkot Bandung dapat menutup selisih tarif yang seharusnya dibayarkan oleh warga Kota Bandung kepada PD Kebersihan dalam pos subsidi yang disebabkan oleh keengganan warga dalam membayar iuran sampahnya.

4.1.7. Kondisi Hutang Luar Negeri

Disamping dari aspek operasional maupun non operasional, masih terdapat salah satu komponen keuangan yang memberatkan kondisi keuangan PD Kebersihan yaitu kondisi utang luar negeri. Meskipun posisi utang tersebut telah berhenti, namun proses penyelesaian utang luar negeri yang berawal dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dalam bentuk barang modal ke PD Kebersihan masih tetap harus dilaksanakan oleh PD Kebersihan guna penyehatan kondisi laporan keuangan PD Kebersihan yang setiap tahunnya menjadi poin komentar dari pihak Internal Audit.

Kondisi utang luar negeri PD Kebersihan yang berasal dari ADB tersebut yang telah ada sejak pendirian PD Kebersihan, saat ini laju jumlah tunggaknya sudah terhenti sejak dilakukan rekonsiliasi terakhir pada tahun 2010. Restrukturisasi utang tersebut awalnya ditargetkan dapat lunas pada tahun 2020 dengan skema pembayaran sebesar Rp 3 Milyar per tahun. Namun, saat ini kondisi pembayaran skema utang tersebut baru dapat dibayarkan pada tahun 2011 dengan jumlah Rp 1,5 Milyar yang mana seharusnya adalah sebesar Rp 3 Milyar per tahun. Pada tahun 2012 dan 2013, PD Kebersihan tidak dapat membayar dikarenakan beban operasi yang membengkak sebagai akibat eskalasi harga-harga pada saat kenaikan harga BBM.

Disisi lain, anggaran pembayaran skema utang ini tidak tampak dalam anggaran PD Kebersihan. Hal tersebut mengakibatkan tidak terjustifikasinya pembayaran terhadap sejumlah pos tertentu yang tidak dianggarkan oleh PD Kebersihan. Sehingga, beban utang yang diikutsertakan sejak berdirinya PD Kebersihan tersebut dapat segera dibantu proses penyelesaiannya dengan didukung penuh oleh Pemkot Bandung sebagai pemilik PD Kebersihan.

4.1.8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Melalui Sinergitas dengan Instansi Terkait

Saat ini, PD Kebersihan mendapat sumber pendanaan utama selain dari tariff jasa sampah dari masyarakat juga dari sumber usaha-usaha lain seperti sewa alat, gedung, perbengkelan, dan kompos yang meski kurang diminati oleh pasar. Disamping itu, kondisi penagihan jasa sampah masih di angka 51% (Bappeda, 2014). Berdasarkan hal tersebut, PD Kebersihan harus segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan seperti halnya intensifikasi penagihan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki infrastruktur memadai dalam hal penagihan. Hal ini sebenarnya sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh PD Kebersihan saat menggandeng PLN dalam pembayaran tariff jasa sampah. Namun, dengan perkembangan teknologi loket pembayaran PLN berkembang dari bersifat loket menjadi beberapa channel pembayaran yang belum diikuti oleh mekanisme pembayaran tariff jasa sampah kepada PD Kebersihan. Penjajagan dengan BUMD lain seperti PDAM perlu dilakukan kajian secara spesifik khususnya dalam hal penagihan dengan tetap memberhatikan skema bisnis yang memberikan bagi dua belah pihak (PD Kebersihan dan PDAM). Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah kemungkinan pembayaran tariff jasa kebersihan dengan menggandeng Dispenda khususnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sinergitas dalam hal pembayaran

tagihan jasa sampah tidak saja akan mendapatkan manfaat efisiensi dari sisi biaya penagihan yang pada tahun 2013 menghabiskan biaya sekitar Rp 4,8 Milyar, namun juga dapat meningkatkan tingkat kolektibilitas Wajib Bayar yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh tim penagihan PD Kebersihan.

4.2. Analisis Kinerja Operasional

Aspek operasional merupakan aspek kunci terlaksananya proses bisnis yang efisien dan efektif. Berdasarkan dari analisis aspek keuangan yang telah dibahas sebelumnya, maka akan dapat dilihat aspek-aspek turunan yang masuk dalam aspek operasional sebagai upaya penyehatan kondisi keuangan PD Kebersihan.

4.2.1. Proses Pemilahan Sampah di Sumber

Bahan evaluasi dari kondisi eksisting dimana sumber sampah terbesar dari Rumah Tinggal/Pemukiman yang saat ini menjadi tanggung jawab warga setempat memiliki implikasi terhadap sulitnya pengendalian proses pemilahan sampah dari sumbernya. Hal ini sebenarnya disebabkan karena bukan menjadi tanggung jawab PD Kebersihan. Guna pengaktifan proses pemilahan sampah dari sumber, kebijakan penjadwalan pengambilan sampah berdasarkan jenis sampah dapat dilakukan dan disosialisasikan secara berkelanjutan kepada pengelola sampah di RW. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah khususnya dalam merubah budaya masyarakat yang telah terbiasa mencampur sampahnya. Implementasi kebijakan Pemkot Bandung secara konsisten dan berkelanjutan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan keseriusan proses pemilahan sampah dari sumber. Jika proses yang akan bersifat gradual ini berhasil, maka akan berdampak pada efisiensi operasional dan juga meningkatkan potensi pendapatan dari sampah yang telah terpisahkan di sumbernya.

Dari sisi efisiensi pengangkutan sampah ke TPA, sampah organik yang diambil dengan jadwal berbeda hari dengan sampah non organik dapat langsung diproses ke TPA organik sedangkan sampah non organik diambil dengan jadwal hari yang berbeda dan langsung diproses terlebih dahulu sebelum diangkut ke TPA. Sehingga dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan jumlah sampah organik akan berdampak pada peningkatan jumlah output hasil pemrosesan sampah organik begitu juga halnya dengan hasil sampah non organik. Terkait dengan hal tersebut, kajian yang spesifik terhadap penjadwalan serta mekanisme pengumpulan sampah yang efektif harus menjadi prioritas selain dari peningkatan kesadaran masyarakat yang harus selalu dibangun baik secara persuasif maupun tindakan tegas sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Tabel 4.9. Sumber Sampah Berdasarkan Jenis Sampahnya

| Sumber sampah | Organik | Non organik |
|-------------------------------|---------|-------------|
| Rumah Tinggal | 56% | 44% |
| Non Rumah Tinggal | 48% | 52% |
| Rata-Rata Sampah kota Bandung | 52% | 48% |

Sumber: PD Kebersihan, 2014

4.2.2. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Terkait dengan evaluasi operasional PD Kebersihan, penggunaan sarana prasarana yang diperlukan dievaluasi seperti diantaranya:

- Jumlah serta kondisinya dari 120 unit truk yang ada hanya 105 unit truk yang dapat beroperasi menyebabkan ketidakefisienan dari sisi asset PD Kebersihan khususnya terhadap biaya penyusutan truk-truk tersebut. Disamping itu, biaya operasional PD Kebersihan akan semakin meningkat

khususnya mengingat jarak tempuh dari Kota Bandung ke TPA berjarak sekitar 40 km.

- Container 190 unit yang perlu dikaji bentuk dan modifikasinya agar dapat menampung sampah yang lebih optimal.
- Mobil Pick Up 7 unit yang perlu dikaji optimalisasi operasionalnya.
- Motor sampah 60 unit yang perlu dikaji tingkat utilitas serta efisiensi operasi jika dibandingkan dengan alternative moda angkut sampah lainnya yang memiliki tingkat daya angkut lebih besar yan lebih efisien.
- Kontainer hijau 6 unit yang perlu dikaji optimalisasi utilitasnya.
- Gerobak 15 unit
- Mesin pencacah sampah organik 5 unit
- KeranjangKomposter telah didistribusikan ± 1542 buah (2009-2013) yang perlu dikaji kondisi dan tingkat daya gunanya di masyarakat.
- Tong Komposter 120 liter 90 unit

Setiap kajian dan inovasi dari utilisasi masing-masing sarana prasarana pengelolaan yang dimiliki diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasi PD Kebersihan baik dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun panjang.

4.2.3. Proses Penyapuan dan Pengangkutan Hasil Penyapuan

Pada aspek operasional, penyapuan jalan memiliki komponen biaya terbesar kedua setelah pengangkutan. Identifikasi penyapuan jalan protocol yang menjadi beban Pemkot Bandung serta beban kerja penyapu jalan sebaiknya menjadi prioritas dalam upaya mengukur kinerja serta kebutuhan SDM penyapu serta sebagai dasar penagihan kepada Pemkot Bandung. Hal ini akan berimplikasi terhadap jumlah

kebutuhan penyapu yang harus diberdayakan guna menjaga kebersihan Kota Bandung. Dukungan lain yang perlu menjadi perhatian yang belum dimiliki saat ini adalah standar pelayanan kebersihan khususnya di aspek penyapuan masih belum dimiliki oleh PD Kebersihan. Jika standar tersebut dimiliki, maka dasar yang lebih kuat dalam penentuan tagihan kepada Pemkot Bandung dalam kaitannya dengan *Public Service Obligation* bidang penyapuan dapat lebih berdasar.

Selain itu, hal lainnya yang perlu dikaji yaitu dari perspektif peningkatan efisiensi operasi khususnya dalam hal proses penyapuan dan pengangkutan hasil penyapuan jalan. Pilihan yang ada dapat tertuju pada penggunaan mesin penyapu jalan atau dengan menggunakan jasa penyapu. Selain itu pilihan pengangkutan hasil penyapuan dapat tertuju pada penggunaan Trida yang banyak atau penggunaan kendaraan pick up yang jauh lebih sedikit namun memiliki kapasitas yang besar serta dapat dikaji guna meminimalkan penggunaan TPS. Hal tersebut sebaiknya dapat didukung oleh identifikasi jalan, fasum, dan fasus khususnya yang dapat difasilitasi oleh Trida, pick up, ataupun bahkan truk besar.

Sehingga, perbandingan dari sisi operasional antara efisiensi serta efektivitas harus menjadi bahan kajian dan peningkatan inovasi sebagai dasar ukuran kinerja PD Kebersihan dan juga sebagai dasar tagihan kepada Pemkot Bandung khususnya dalam hal *Public Service Obligation*.

4.2.4. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Dalam Pengelolaan Sampah

Saat ini, ekstensifikasi sumber pendapatan telah dilakukan dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari

beberapa perusahaan. Sebagai bukti nyata, beberapa bantuan telah didapatkan dari Bank BTN, PTPN VIII, dan Kagum Group yang bersifat *in kind*. Di samping itu, penggalan potensi kerjasama yang berimplikasi pada pendanaan operasional PD Kebersihan masih belum ditangani secara khusus dalam sebuah bidang. Beberapa aspek operasional yang dapat didanai oleh CSR seperti halnya yang bersifat inovasi, pendidikan, dan sosialisasi pengelolaan persampahan dimasa selama ini hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah. Sehingga proses sosialisasi pemilhan sampah diharapkan dapat konsisten dan berkelanjutan dalam merubah pola kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampahnya.

Sebagai contoh dalam kaitan dengan perubahan budaya masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tinggal khususnya, maka diperlukan sebuah dukungan media dan pendanaan yang sangat memadai dan berkesinambungan agar pola kebiasaan masyarakat dapat menjadi yang diharapkan. Hal ini, sebenarnya dapat memanfaatkan perusahaan yang berbasis media maupun ICT dalam mensosialisasikan pemilhan sampah beserta dengan program yang jelas serta terukur dari program inovasi, pendidikan, dan sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Namun, sebagai kondisi prasyarat dibutuhkan adanya bidang khusus yang akan menggali tupoksi kerjasama tersebut.

4.2.5. Penjadwalan Pengumpulan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Pada aspek pengumpulan sampah, seperti yang telah dipaparkan dalam analisis aspek keuangan, pengumpulan sampah saat ini di RT RW dikelola oleh warga dengan pertimbangan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dampak positif bagi PD Kebersihan adalah dapat meminimalkan biaya pengangkutan dari sumber dan juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar, Namun, dampak

negative yang timbul adalah sulitnya bagi PD Kebersihan untuk mengendalikan jenis sampah yang terpilah dari sumber. Dalam jangka panjang, jika hal tersebut masih terjadi maka dukungan terhadap pemilahan sampah dari sumber akan sulit terealisasi. Dalam mengantisipasi hal tersebut, PD Kebersihan melalui Bidang Operasional Wilayah yang terdapat di 4 wilayah dapat tetap memberikan tanggung jawab kepada aparat kewilayahan terendah (RT RW) dalam mengumpulkan sampah dari sumber dengan kondisi penjadwalan dalam pengambilan sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu, Kabercam yang ada di masing-masing wilayah diharapkan dapat menjadi sumber informasi khususnya terkait dengan proses pembelajaran dan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini tentu perlu upaya segenap pihak termasuk kerjasama dengan Pemkot Bandung, sekolah-sekolah, masyarakat, RT RW, dan instansi pemerintah dan swasta dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Sehingga dalam jangka waktu menengah dan panjang diharapkan kebijakan tersebut telah dapat dirasakan dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang terkirim ke TPA serta meningkatkan potensi pendapatan dari sampah organik maupun non organik yang terpisahkan dari sumbernya.

4.2.6. Sosialisasi Pemilahan Sampah di Sumber

Aspek sosialisasi yang berkelanjutan merupakan hal yang penting khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tinggal/pemukiman yang mendominasi hampir 60% dari total jumlah sampah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dalam jangka menengah dan panjang dapat terasa dampaknya dalam pengurangan jumlah sampah yang terkirim ke TPA karena telah terpilah dan terproses sebelum masuk ke TPA. Peran serta aktif masyarakat dan aparat kewilayahan terendah serta dorongan dari Pemkot Bandung menjadi faktor kunci dalam keberhasilan output sosialisasi tersebut.

Saat ini sosialisasi ke masyarakat telah dilakukan oleh PD Kebersihan hingga ke kelurahan-kelurahan. Demikian halnya juga surat edaran dari Walikota Bandung terkait dengan pola kebiasaan masyarakat telah tersampaikan hingga ke kecamatan-kecamatan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah pada sosialisasi tariff, peningkatan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, dan pengolahan sampah di sumber. Selain itu, sosialisasi telah dilakukan seperti:

- Mobil patroli untuk masyarakat pengguna jalan
- Sosialisasi di Radio PR FM dan IM TV
- Sosialisasi kepada guru-guru
- Pemberian tong sampah dan keranjang komposter
- Sosialisasi bersama mahasiswa Unpad

Terkait dengan program sosialisasi, langkah ideal yang dapat dilakukan adalah program sosialisasi yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat yang diinisiasi oleh PD Kebersihan sebagai motor pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hal ini merupakan langkah guna mengurangi jumlah sampah seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Terkait dengan hal ini, indikator keberhasilan sosialisasi perlu ditinjau secara berkala guna mengukur efektivitas program sosialisasi yang dilakukan secara komprehensif. Dalam hal dukungan pendanaan agar terjadi keberlanjutan program sosialisasi, PD Kebersihan dapat mengaktifkan lebih dalam lagi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki dana CSR.

4.2.7. Implementasi Inovasi Proses Melalui Business Process Reengineering(BPR)

Pengelolaan sampah tidak saja penyapuan dan pengangkutan, namun juga pemrosesan sampah di TPA. Dari aspek biaya, komponen penyapuan dan pengangkutan merupakan komponen terbesar setiap tahunnya. Kaitannya dengan hal tersebut, secara keseluruhan aspek penyapuan dan pengangkutan sampah, baik dari rumah tinggal maupun ke TPA, perlu dilakukan kajian spesifik tentang *Business Process Reengineering(BPR)* yang menfokuskan pada inovasi peningkatan efisiensi operasional PD Kebersihan. Selain dari aspek penyapuan dan pengangkutan, BPR dapat juga diterapkan kepada seluruh aspek operasional lainnya. Sehingga secara umum dapat dihasilkan sebuah proses bisnis yang lebih berorientasi pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas PD Kebersihan.

4.3. Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia

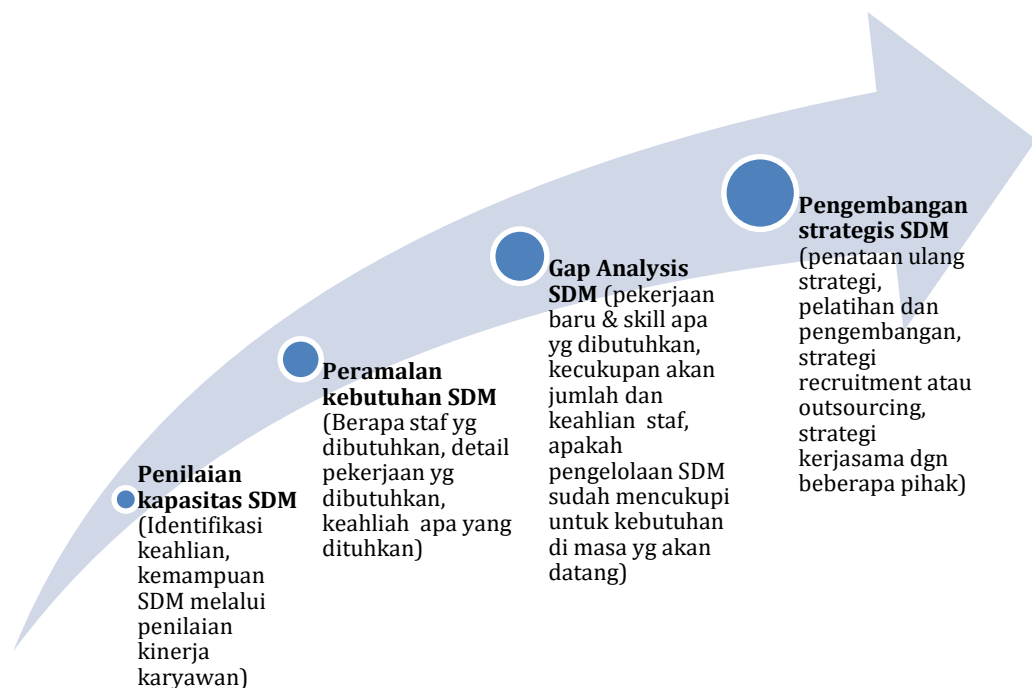
Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari komponen manajemen sumber daya manusia. Perencanaan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap strategi perencanaan suatu perusahaan. Berdasarkan perencanaan strategis tersebut suatu perusahaan dapat mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang akan mendukung arah serta tujuan dari suatu organisasi.

Untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia maka digunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Schwind, Wagner, Johnson, DeRue, & Ilgen, . 2007 dalam bukunya yaitu : *Human Resource Management: A Strategic Approach*. Pendekatan tersebut dipilih karena secara komprehensif membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, maka peneliti membandingkan pengelolaan sumber daya manusia

dan organisasi saat ini yang terjadi di dalam PD. Kebersihan melalui serangkaian wawancara dari *owner process*. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi serta memberikan rekomendasi untuk inovasi dan pengembangan selanjutnya.

Pendekatan yang dilakukan oleh Schiwind et al, 2007, membagi proses strategi perencanaan sumber daya manusia dalam 4 (empat) tahap, yaitu : penilaian kapasitas sumber daya manusia, peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia, *gap analysis* dan pengembangan strategis sumber daya manusia. Dengan membandingkan kinerja aktual yang telah dilakukan oleh PD. Kebersihan, maka dapat di ilustrasikan secara umum dalam gambar berikut ini :

Gambar 4.1. Proses Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia



Secara detail uraian kondisi sumber daya manusia yang berada pada PD. Kebersihan jika di hubungkan dengan perencanaan sumber daya manusia (Schwind et.al, 2007) dapat di tampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.10. Evaluasi Kondisi Aktual Aspek SDM PD Kebersihan

| Empat Tahap Strategi Perencanaan SDM | Komponen Strategi Perencanaan SDM (Schwind et.al, 2007) | Kondisi Saat ini PD. Kebersihan |
|---|--|---|
| Penilaian Kapasitas SDM | Identifikasi keahlian & kemampuan, pendidikan, sertifikasi karyawan | Belum tertata dengan baik |
| Peramalan kebutuhan SDM | Berapa banyak karyawan yang akan dibutuhkan | Belum dilakukan optimal |
| | Pekerjaan spesifik dan keahlian yang akan dibutuhkan | Belum dilakukan optimal |
| Gap Analysis | Fungsi/peran baru dalam organisasi berkaitan dengan strategi perusahaan kedepannya | Adanya direktur bisnis |
| | Apakah karyawan yang ada sekarang ini sudah menggunakan kemampuannya? | Belum ada indikator pengukurannya |
| | Kompensasi materi dan benefit yang diterima karyawan | Umumnya masih dibawah UMK, asuransi kesehatan dikelola mandiri |
| Strategi Pengembangan SDM | Strategi restrukturisasi 1. Efisiensi/mengurangi jumlah karyawan 2. Menggabungkan beberapa tugas agar mencapai desain pekerjaan yang baik 3. Re-organisasi unit | 1. Sudah dilakukan 2. Belum dilakukan secara optimal 3. Belum dilakukan |

| Empat Tahap Strategi Perencanaan SDM | Komponen Strategi Perencanaan SDM (Schwind et.al, 2007) | Kondisi Saat ini PD. Kebersihan |
|--------------------------------------|---|--|
| | pekerjaan agar lebih efisien | secara optimal |
| | Pelatihan dan strategi pengembangan karyawan 1. Menyediakan karyawan melalui pelatihan untuk jabatan yang baru 2. Menyediakan karyawan aktif dengan kesempatan pengembangan (pelatihan, dll) untuk mempersiapkan organisasi perusahaan di masa yang akan datang | 1. Sudah dilakukan namun tidak semua bagian 2. Sudah dilakukan namun tidak semua bagian |
| | Strategi rekrutment karyawan 1. Penerimaan staf baru dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan keahliannya 2. Mempertimbangkan segala alternatif untuk strategi promosi baik dari eksternal maupun internal | 1. Sudah dilakukan namun tidak semua bagian 2. Sudah dilakukan namun tidak semua bagian |
| | Strategi outsourcing, menggunakan external karyawan / organisasi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan | Dilakukan di beberapa pekerjaan |
| | Strategi kolaborasi, 1. Bekerjasama dgn beberapa institutsi pendidikan tinggi untuk menyediakan beberapa | a) Sudah dilakukan secara terbatas |

| Empat Tahap Strategi Perencanaan SDM | Komponen Strategi Perencanaan SDM (Schwind et.al, 2007) | Kondisi Saat ini PD. Kebersihan |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| | kursus 2. Perusahaan/karyawan menyediakan atau mengizinkan aktifitas untuk meningkatkan kemampuannya | b) Sudah pernah di laksanakan |

Sumber: Hasil Wawancara dan Analisis, 2014

Secara khusus perbaikan yang dapat dilakukan oleh PD. Kebersihan dengan mengaitkan pendekatan (Schwind et.al, 2007) melalui 4 (empat) tahap strategi perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

a) Penilaian Kapasitas SDM

Penilaian kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pemetaan dari keahlian, pendidikan serta sertifikasi dari training yang diikuti oleh karyawan PD. Kebersihan. Penilaian tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam sebuah kartu dan akan lebih baik jika di integrasikan dalam *on-line system*. Sehingga pengelola SDM dengan mudah untuk mengakses data tersebut jika terjadi promosi atau penyederhanaan beberapa tugas.

b) Peramalan Kebutuhan SDM

Salah satu hal yang paling penting dalam perencanaan SDM adalah : bagaimana suatu perusahaan dapat merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan. Dengan semakin bertambahnya populasi dan rumah tangga maka akan mengakibatkan volume sampah per-orang atau per-rumah tangga akan semakin meningkat. Sehingga, diperlukan proyeksi secara detail atas kebutuhan SDM untuk jangka pendek/menengah serta jangka

panjang. Dengan adanya peramalan akan kebutuhan SDM, maka di awal tahun PD. Kebersihan dapat melakukan rekrutmen karyawan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan.

c) Gap Analysis

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PD. Kebersihan untuk mereduksi kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan adalah sebagai berikut : melakukan identifikasi untuk fungsi-fungsi baru dalam organisasi berkaitan dengan strategi PD. Kebersihan untuk jangka menengah/panjang, melakukan penilaian kinerja bahwa karyawan sudah menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara optimal, serta kompensasi / benefit yang diterima oleh karyawan sudah sesuai dengan kinerjanya.

Namun, sebelum memperbaiki 3 (tiga) hal tersebut ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh PD. Kebersihan yaitu : adanya uraian jabatan/indikator kinerja karyawan, dan standar produktivitas karyawan per jabatan/fungsi. Analisis uraian jabatan dan indikator kinerja karyawan sudah dilakukan oleh PD. Kebersihan akan tetapi standar produktivitas karyawan belum dilakukan penelitiannya.

Saat ini, untuk mengetahui kinerja karyawan, PD. Kebersihan melakukan penilaian melalui DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang mengadopsi dari pendekatan penilaian PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan uraian jabatan yang telah dibuat. Pendekatan penilaian DP3 tersebut sebaiknya dikembangkan lebih baik lagi melalui indikator kinerja kuantitatif.

Melalui standar produktivitas kerja, PD. Kebersihan dapat mengetahui apakah kinerja karyawan dari setiap fungsi sudah memenuhi dari angka kecukupan produktivitasnya. Kemudian, dapat juga berfungsi sebagai identifikasi awal untuk

pengembangan karyawan melalui training jika kinerjanya dibawah standar produktivitas serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan insentif (bonus) atau-pun dis-insentif (mis. teguran lisan / surat peringatan) jika kinerja karyawan di bawah standar produktivitas.

Selain itu, dengan adanya standar produktivitas yang jelas, maka memungkinkan PD. Kebersihan melakukan substitusi dari faktor inputnya, misalnya :untuk penyapuan jalan, memungkinkan untuk melakukan pergeseran dari tenaga kerja ke mobil sapu jalan.

Jika standar produktivitas sudah terimplentasi dengan baik, *gap* selanjutnya adalah meminimalisasi kesenjangan antara kompensasi dengan prestasi kerja. Saat ini, untuk gaji pokok juru sapu jalan/pasar berkisar antara Rp. 1 juta sd. 1.7 juta dengan rata-rata gaji pokok dari 682 juru sapu jalan/pasar sebesar Rp. 1.4 juta. Dengan membandingkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk Kota Bandung, maka gaji pokok yang diterima oleh juru sapu sebaiknya di tingkatkan.Salah satu dampak dari rendahnya gaji yang diterima oleh juru sapu jalan adalah hilangnya motivasi dalam bekerja serta kemungkinan adanya penyimpangan saat bertugas di lapangan.

Selain itu, PD. Kebersihan juga telah memberikan beberapa *benefit* atau tunjangan dan asuransi bagi karyawan, diantaranya : kesehatan (sistem re-imburse), kecelakaan kerja, kematian dan pensiun (dikelola oleh BNI – Dana Pensium Lembaga Keuangan). Namun, untuk tunjangan kesehatan dan kecelakaan kerja masih dikelola sendiri. Untuk jangka panjang sebaiknya *benefit* untuk dana kesehatan dan kecelakaan kerja dikelola oleh pihak ketiga, agar cash-flow dari sisi keuangan terjaga ketiga resiko kecelakaan kerja terjadi. Kemudian, penerima manfaat (karyawan)

mendapatkan nilai yang sama dengan karyawan lainnya ketika resiko tersebut terjadi.

d) Strategi Pengembangan SDM

Untuk strategi pengembangan SDM ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PD. Kebersihan, yaitu :

- 1) *Strategi re-sktrukturisasi / re-organisasi karyawan*, dengan cara menggabungkan beberapa pekerjaan yang sejenis atau mempunyai kemiripan sehingga akan berdampak kepada efisiensi perusahaan.
- 2) *Strategi penerimaan karyawan*, sebaiknya PD. Kebersihan membuka penerimaan secara terbuka (luas) melalui media cetak, dsb. Dengan demikian, PD. Kebersihan akan mendapatkan SDM terbaik dari hasil kompetisi diantara pelamar.
- 3) *Strategi pelatihan dan pengembangan karyawan*. Perusahaan yang selalu memberikan kinerja organisasi terbaik meletakkan karyawan dalam posisi terpenting di dalam organisasinya. Sehingga, pengembangan karyawan melalui : pelatihan yang sesuai dengan perannya sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk pengembangan karyawan adalah kejelasan karir (*career path*) di dalam organisasi tersebut. Hal ini sangat penting untuk memberikan tujuan yang jelas serta motivasi yang tinggi jika seseorang karyawan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini, PD. Kebersihan belum secara optimal untuk memberikan *training* serta *career path*. Proses pembinaan karyawan yang mempunyai kinerja buruk hanya dilakukan sebatas teguran lisan (pemanggilan).
- 4) *Strategi outsourcing*, langkah ini lazim digunakan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pengeluaran dari

gaji/honor. Selain itu, *outsourcing* diyakini memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam proses penerimaan karyawan karena terdapat lembaga/penyedia/agen yang menyalurkan calon karyawannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pada umumnya, *outsourcing* dapat dilakukan untuk fungsi-fungsi *clerical* yang bersifat reguler/periodik di mana mempunyai SOP yang jelas, seperti :staf dokumen kontrak, pengarsipan, pengemudi, juru sapu, dll.

5) *Strategi kolaborasi*. Di dalam konteks sumber daya manusia, kolaborasi penting dilakukan seperti :pelatihan untuk memperkuat keahlian, penilaian (*assesstment*) untuk seluruh fungsi, dll. Beberapa universitas/institusi pendidikan tinggi dapat dijadikan *partner* bagi PD. Kebersihan untuk memperkuat strategi sumber daya manusia.

4.3.1.ASPEK PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan organisasi akan menciptakan *roadmap* menuju kesuksesan perusahaan. Tanpa adanya pengembangan organisasi yang jelas, keberhasilan organisasi serta individu/karyawan akan mengalami perlambatan. Pengembangan organisasi juga berarti perbaikan sistem organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari sub-sistem yang saling berkaitan. Keuntungan dari implementasi pengembangan organisasi di dalam perusahaan adalah adanya celah untuk melakukan pengembangan di dalam perusahaan, dapat menilai kondisi saat ini dan rencana yang akan datang dari suatu perusahaan serta dapat mengembangkan rencana strategis untuk antisipasi perubahan yang akan terjadi. Gambar berikut ini adalah ilustrasi dimana area utama di dalam pengembangan organisasi



Dengan membandingkan kondisi PD. Kebersihan saat ini dalam konteks pengembangan organisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11. Evaluasi Area Pengembangan Organisasi PD Kebersihan

| Area Pengembangan Organisasi | Kondisi Saat ini PD. Kebersihan |
|--------------------------------------|--|
| Visi dan Misi Perusahaan | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| Tujuan dan Sasaran | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| Strategi & Kebijakan Perusahaan | Sudah ada namun belum detail |
| Budaya Kerja | Belum dilakukan dengan optimal |
| Struktur Organisasi | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| Standar Operasional Perusahaan (SOP) | Sudah ada, namun belum lengkap |
| Analisa Jabatan / Uraian Kerja / Job | Ada dan terdokumentasi dengan baik |

| | |
|--|-------------------------|
| Description | |
| <i>Change Management / Innovation / Continuous Improvement</i> | Belum dilakukan optimal |
| Standar Produktivitas per jabatan | Belum dilakukan optimal |
| Indikator Kinerja Karyawan | DP 3 |

Sumber: Hasil Wawancara dan Analisis, 2014

Untuk mengetahui secara detail kemungkinan area pengembangan organisasi PD. Kebersihan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Strategi & Kebijakan Perusahaan / rencana strategis, sebaiknya terdapat indikator kuantitatif yang merupakan target PD. Kebersihan. *Key Performance Indicator* (KPI) adalah salah satu *tools* untuk bisa melihat indikator kesuksesan dari suatu perusahaan. Beberapa KPI untuk PD. Kebersihan sebaiknya ditata kembali agar dapat mengakomodir visi dan misi serta tidak adanya indikator yang saling berkaitan.
- 2) Budaya Kerja, beberapa perusahaan dalam skala daerah/nasional mempunyai ciri khas (*value*) yang dapat dilihat dari bagaimana karyawan melakukan aktivitas pekerjaannya. Beberapa contoh budaya kerja adalah : *integrity, customer satisfaction, teamwork*, dsb. Ciri khas tersebut adalah identitas perusahaan, di mana secara langsung dapat mempengaruhi sikap keseharian karyawan yang pada akhirnya akan menjadi budaya kerja.
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP), mutlak untuk dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya. BPR (*Business Process Reengineering*) sebaiknya dilakukan oleh PD. Kebersihan untuk melihat lebih detail lagi proses bisnis

yang ada sekaligus menemukan adanya perbaikan, penyempurnaan dan efisiensi dari setiap unit proses.

- 4) *Change Management / Innovation / Continuous Improvement*, merupakan komponen terpenting dalam perusahaan. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Saat ini, PD. Kebersihan hanya mengandalkan *processbusiness as usual* saja, sehingga di khawatirkan akan mengalami perlambatan adaptasi di dalam proses bisnisnya. Jika kondisi BAU (*business as usual*) dibiarkan secara terus-menerus memungkinkan PD. Kebersihan mengalami kerugian dalam jangka panjang. *Six Sigma Approach/Total Quality Management* adalah suatu *tools* untuk mengembangkan *Innovation/Continuous Improvement*. Gagasan untuk melakukan inovasi dan perbaikan proses di dalam suatu perusahaan tidakhanya dimiliki oleh *top management* saja. Peran dari tingkatan yang paling rendah juga dapat memberikan gagasan inovasi untuk efisiensi, penyerhanaan proses yang berujung kepada kepuasan pelanggan.
- 5) Indikator standar produktivitas karyawan adalah syarat yang harus dipenuhi bagi PD. Kebersihan untuk menilai kinerja karyawan per jabatan. Dengan indikator tersebut, PD. Kebersihan dapat menentukan apakah karyawannya bekerja di atas standar produkvtas atau sebaliknya. Sehingga mempunyai implikasi bagi HRD untuk dapat mengimplementasikan pengelolaan sistem *reward/punishment* dengan baik.
- 6) Indikator kinerja karyawan, saat ini PD. Kebersihan menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diambil dari sistem penilaian kinerja PNS dimana

penilaian hanya dilakukan oleh atasan. Sebaiknya PD. Kebersihan mencoba untuk memasukan pendekatan indikator kinerja yang lain, dimana penilaian seorang karyawan dilakukan tidak hanya oleh atasan, namun rekan kerja (satu level) dan bawahannya.

BAB V

RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN

Rencana Pencapaian Target Per tahun disusun dalam bentuk matrik dengan target yang terinci yang mengacu pada rencana strategis PD Kebersihan yang lebih operasional dan lebih menitik berat kan pada pemecahan masalah.

Adapun matrik rencana pencapaian target 2014-2018 adalah sebagai berikut :

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1. | Aspek Kelembagaan dan SDM | 1. Kualitas SDM yang belum optimal dalam pemahaman pengelolaan sampah kota. | Kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan | Mengikut sertakan pegawai dalam acara seminar, lokakarya dan pelatihan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah dan administrasi perusahaan dengan mengacu pada hasil <i>training meet analysis</i> | Mengikutsertakan pelatihan sebanyak 75 orang sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. | Mengikutsertakan pelatihan sebanyak 85 orang sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. | Mengikutsertakan pelatihan sebanyak 95 orang sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. | Mengikutsertakan pelatihan sebanyak 105 orang sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. | Mengikutsertakan pelatihan sebanyak 188 orang sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. | SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan kebersihan • percepatan perbaikan kendaraan operasional • Efisiensi pengeluaran • Meningkatkan pendapatan |
| | | 2. Penilaian kapasitas SDM belum optimal. | Belum tertata dengan baiknya penilaian kapasitas SDM | Menyusun alat pengukur kapasitas SDM | Assessment dan konseling untuk kepala bidang dan kepala seksi | Assessment dan konseling untuk kepala urusan | Assessment dan konseling untuk pelaksana | Assessment dan konseling untuk pelaksana | Assessment dan konseling untuk pelaksana | SDM | Menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya |
| | | 3. Jumlah kebutuhan SDM yang belum sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja optimal. | Belum dilakukan secara optimal perencanaan kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan | Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja untuk menentukan perencanaan kebutuhan jumlah dan kualifikasi | Pengurangan pegawai sebesar 30% untuk staff dan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan melalui jalur pensiun = 32 orang | Pengurangan pegawai sebesar 30% untuk staff dan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan melalui jalur pensiun = 34 orang | Pengurangan pegawai sebesar 30% untuk staff dan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan melalui jalur pensiun = 39 orang | Pengurangan pegawai sebesar 30% untuk staff dan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan melalui jalur pensiun = 34 orang | Pengurangan pegawai sebesar 30% untuk staff dan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan melalui jalur pensiun = 61 orang | SDM | Jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | beban kerja. | SDM yang didasarkan pada SOTK dan desain proses pekerjaan yang sesuai. | | | | | | | |
| | | 4. Belum optimalnya fokus perusahaan terhadap penguatan aspek bisnis. | SOTK yang ada belum berpedoman kepada Perda No. 14 Tahun 2011 seperti halnya belum dimilikinya Direktorat Bisnis yang berperan strategis dalam organisasi terkait dengan strategi bisnis | Membentuk Direktorat Bisnis Mengevaluasi struktur yang ada dengan mengacu pada Perda No 14 Tahun 2011. | <ul style="list-style-type: none"> Membentuk SOTK sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2014. Membuat kajian kelayakan bisnis di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011. | <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan SOTK yang baru. Penguatan bisnis di bidang pemanfaatan sampah Penguatan bisnis di bidang perbengkelan Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan | <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan SOTK yang baru. Penguatan bisnis di bidang pemanfaatan sampah Penguatan bisnis di bidang perbengkelan Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan | <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan SOTK yang baru. Penguatan bisnis di bidang pemanfaatan sampah Penguatan bisnis di bidang perbengkelan Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan | <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan SOTK yang baru. Penguatan bisnis di bidang pemanfaatan sampah Penguatan bisnis di bidang perbengkelan Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan | SDM | Meningkatnya pendapatan dengan adanya direktorat bisnis. |
| | | 5. Penilaian kinerja karyawan masih mengikuti pola PNS (DP3) yang berbeda pola dengan | Belum dimilikinya indikator pengukuran kinerja karyawan yang | Menyusun indikator kinerja karyawan dengan mengacu pada desain proses bisnis yang | Menyusun indikator kinerja karyawan dengan mengacu pada | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun indikator kinerja karyawan dengan mengacu pada desain proses bisnis yang | Melaksanakan penilaian kinerja kepala urusan dan pelaksana sesuai | Melaksanakan penilaian kinerja tenaga kontrak sesuai indikator kinerja yang | Telah terukurinya kinerja seluruh pegawai | SDM | Tercapainya produktivitas kinerja pegawai. |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | perusahaan bisnis yang berorientasi pada profit. | disesuaikan dengan posisi perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis. | efisien. | desain proses bisnis yang efisien. | efisien. • Melaksanakan penilaian kinerja kepala bidang dan seksi sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. | indikator kinerja yang telah ditetapkan. | telah ditetapkan. | | | |
| | | 6. Budaya Kerja belum nampak di dalam organisasi. | Belum dimiliki dan dilakukannya Budaya Kerja dan <i>Change Management</i> serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. | Menyusun Budaya Kerja | Membuat komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan melalui budaya kerja dan etika kerja | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kode etik berkenaan dengan budaya kerja. Implementasi dan pengawasan | Mengimplemen tasikan budaya kerja yang terintegrasi dengan indikator kinerja pegawai | Mengimplemen tasikan budaya kerja yang terintegrasi dengan indikator kinerja pegawai | Mengimplemen tasikan budaya kerja yang terintegrasi dengan indikator kinerja pegawai | SDM | <ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelayanan meningkat. Pendapatan meningkat. |
| | | | | Mengimplementasikan <i>Change Management</i> dalam merubah persepsi karyawan secara keseluruhan | Menyusun <i>Change Management</i> sesuai dengan <i>Eco Office</i> . Menyusun <i>Road Map Eco Office</i> PD. | Melakukan sosialisasi dan desiminasi <i>Change Management</i> sesuai dengan <i>Eco Office</i> . | Mengimplemen tasikan <i>Change Management</i> sesuai dengan <i>Eco Office</i> . | Mengimplemen tasikan <i>Change Management</i> sesuai dengan <i>Eco Office</i> . | Mengimplemen tasikan <i>Change Management</i> sesuai dengan <i>Eco Office</i> . | SDM | Meningkatkan kualitas layanan Meningkatkannya efisiensi operasional perusahaan Presentasi |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | Kebersihan | | | | | | tingkat kehadiran pegawai meningkat. |
| | | | | Meningkatkan kesejahteraan pegawai secara bertahap guna mengimbangi kenaikan UMK | <ul style="list-style-type: none"> •Memperbaiki komponen penggajian dan kenaikan gaji pokok, rata-rata naik 8% •Gaji ke 13 •THR | <ul style="list-style-type: none"> •Kenaikan gaji 8 % •Gaji ke 13 satu kali gaji •THR satu kali gaji | <ul style="list-style-type: none"> •Kenaikan gaji Naik 10% •Gaji ke 13 satu kali gaji •THR satu kali gaji | <ul style="list-style-type: none"> •Kenaikan gaji Naik 12% •Gaji ke 13 satu kali gaji •THR satu kali gaji | <ul style="list-style-type: none"> •Kenaikan gaji Naik 15% •Gaji ke 13 satu kali gaji •THR satu kali gaji | SDM | Meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan UMK |
| | | | | Peningkatan jaminan kesehatan pegawai | •0,73 % dari anggaran | •0,73 % dari anggaran | •0,73 % dari anggaran | •0,73 % dari anggaran | •0,73 % dari anggaran | SDM | Produktivitas kinerja meningkat. Presentasi tingkat kehadiran pegawai meningkat. |
| | | | | Tunjangan pensiun | <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan pensiun naik dari 17 juta menjadi 20 juta •Uang penghargaan tergantung masa kerja | <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan pensiunnaik dari 17 juta menjadi 20 juta •Uang penghargaan tergantung masa kerja | <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan pensiunnaik dari 20 juta menjadi 22 juta •Uang penghargaan tergantung masa kerja | <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan pensiunnaik dari 22 juta menjadi 25 juta •Uang penghargaan tergantung masa kerja | <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan pensiunnaik dari 25 juta menjadi 28 juta •Uang penghargaan tergantung | SDM | Produktivitas kinerja meningkat |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | masa kerja | | |
| | | 7. Standar Operasional Prosedur belum menyeluruh dan belum menjadi acuan kerja seluruh unit. | Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur | Menyusun seluruh Standar Operasional Prosedur dari seluruh proses bisnis yang berorientasi pada proses kerja yang efisien pada setiap bidang. | <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir SOP yang harus disusun Menyusun dan Menyempurnakan penyusunan SOP bidang teknik dan Operasional pengelolaan sampah dan SOP dibidang manajemen perusahaan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Mendesiminasikan SOP kepada pegawai SOP sebagai pedoman ketercapaian kinerja Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) | Mengimplemen tasikan SOP dan SPP sebagai pedoman kerja oleh seluruh unit | Mengimplemen tasikan SOP dan SPP sebagai pedoman kerja oleh seluruh unit | Mengimplementasikan SOP dan SPP sebagai pedoman kerja oleh seluruh unit | Satuan Peneliti | Produktivitas dan kualitas pelayanan meningkat Pendapatan meningkat Efisiensi beban operasional |
| 2. | Aspek Peraturan | 1. Penegakan sanksi hukum yang belum optimal. | Belum adanya dorongan aktif pemerintah dan aspek masyarakat terhadap penerapan dan penegakan sanksi yang ada pada Perda. | Mendorong peran aktif Pemerintah Kota Bandung serta lapisan masyarakat dalam hal sosialisasi | Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | HH | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan Meningkatnya kinerja Meningkatnya pendapatan Meningkatnya potensi wajib bayar. |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|---|--|---|--|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | Mendorong penegakan Perda melalui kajian dan kerjasama aktif dengan instansi terkait. | Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | Pendampingan pelaksanaan penegakan hukum kaitan dengan Perda | HH | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan. • Meningkatnya kinerja. • Meningkatnya pendapatan. • Meningkatnya potensi wajib bayar. |
| | | 2. Pengelolaan sampah yang belum optimal. | Belum adanya Perwal atau juknis pelaksanaan Perda No. 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. | Mengusulkan rancangan Peraturan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah No.09 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, diantaranya telah tersusun Peraturan Walikota No.316 Tahun 2013 tentang tarif jasa | Penyusunan draft rancangan Perwal dan kepwal tentang pengelolaan sampah | Finalisasi dan pengajuan usulan Perwal dan Kepwal | Sosialisasi dan implementasi | Sosialisasi dan implementasi | Sosialisasi dan implementasi | HH | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan. • Meningkatnya produktivitas kinerja. • Efisiensi beban operasional. • Meningkatnya pendapatan dari sumber pendapatan lainnya. |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja /RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | pengelolaan sampah dan menyusun draft rancangan Keputusan Direksi mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknis operasional pengelolaan sampah. | | | | | | | |
| | | 3. Belum dimilikinya standar bersih untuk fasilitas umum sebagai dasar perhitungan detail biaya operasional persampahan | Kebutuhan biaya operasional persampahan tidak diimbangi dengan penerimaan jasa pelayanan kebersihan khususnya belum dimilikinya detail perhitungan biaya operasional | Menyusun detail biaya operasional persampahan dari hulu ke hilir sebagai dasar penetapan biaya per unit. | Menyusun keputusan/peraturan direksi berkaitan dengan standar bersih | Sosialisasi dan implementasi pelaksanaan keputusan/peraturan direksi berkaitan dengan standar bersih | Sosialisasi dan implementasi pelaksanaan keputusan/peraturan direksi berkaitan dengan standar bersih | Sosialisasi dan implementasi pelaksanaan keputusan/peraturan direksi berkaitan dengan standar bersih | Terpenuhinya standar bersih | HH | Pendapatan <i>public obligation</i> lebih optimal |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|----------------|--|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | sampah. | | | | | | | | |
| 3. | Aspek Keuangan | 1. Potensi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan belum optimal. | Belum memiliki database pelanggan yang jelas sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar jasa pengelolaan sampah masih kurang. | Mengoptimalkan penagihan jasa pengelolaan sampah sesuai Peraturan Walikota Nomor 316 Tahun 2013 yang mulai berlaku per tanggal 1 Mei 2013 | Meningkatkan presentasi hasil penagihan sebesar rata-rata 17 % (adanya kenaikan tarif jasa pengelolaan sampah sesuai Peraturan Walikota Nomor 316 Tahun 2013 yang mulai berlaku per tanggal 1 Mei 2013) | Presentasi kenaikan rata-rata 3 % tingkat penagihan | Presentasi kenaikan rata-rata 3 % tingkat penagihan | Presentasi kenaikan rata-rata 3 % tingkat penagihan | Presentasi kenaikan rata-rata 3 % tingkat penagihan | Keuangan dan penagihan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan • Meningkatnya produktivitas kinerja • Meningkatnya pelayanan. • Meningkatnya potensi wajib bayar |
| | | | | Kerjasama dengan pihak ketiga yang efektif | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kerjasama dengan RW dan pihak pengusaha. • Intensifikasi penagihan 35 % tingkat penagihan. • Penjajakan | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kerjasama dengan RW dan pihak pengusaha. • Intensifikasi penagihan 35 % tingkat penagihan • Penyusunan | <ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi penagihan 35 % tingkat penagihan • Kerjasama dengan PDAM dan RWNET. | Intensifikasi penagihan 35 % tingkat penagihan | Intensifikasi penagihan 35 % tingkat penagihan | Penagihan | Meningkatnya pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | kerjasama penagihan kategori rumah tinggal melalui PDAM dan RWNET. | kajian kerjasama penagihan kategori rumah tinggal melalui PDAM dan RWNET. • Kerjasama dengan PDAM dan RWNET. | | | | | |
| | | | | Pembuatan database wajib bayar Rumah Tinggal dan pengkinian database non Rumah Tinggal yang. | › Menyusun proposal pembuatan data base Rumah Tinggal › Penginventarisir kembali data base non Rumah tinggal melalui pendataan | › Survey untuk penyusunan data base rumah tinggal › Tersedianya data base rumah tinggal non rumah tinggal yang telah di update | Telah tersedianya dokumen data base pelanggan rumah tinggal dan non rumah tinggal | Telah tersedianya dokumen data base pelanggan rumah tinggal dan non rumah tinggal | Telah tersedianya dokumen data base pelanggan rumah tinggal dan non rumah tinggal | Bidang keuangan /sie pendataan dan Satlit | Meningkatkannya pendapatan |
| | | | | Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media yaitu melalui tatap muka, media elektronik (radio, | • Persentase biaya sosialisasi 0.63% | • Persentase kenaikan biaya sosialisasi 15% | • Persentase kenaikan biaya sosialisasi 20% | • Persentase kenaikan biaya sosialisasi 25% | • Persentase kenaikan biaya sosialisasi 30% | Bidang HH | Berkurangnya pengaduan setiap tahun Meningkatnya pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|---|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | TV lokal), internet (web site), media cetak | | | | | | | |
| | | | | Mengembangkan usaha sesuai amanat Perda No. 14 Tahun 2011 | <ul style="list-style-type: none"> Membuat kajian usaha yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011 Menetapkan usaha yang akan dilaksanakan sesuai Perda 14 tahun 2011 | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun keputusan Direksi untuk menetapkan usaha yang akan dilaksanakan oleh PD kebersihan Menjalankan Usaha sesuai keputusan Direksi | Menjalankan Usaha sesuai keputusan Direksi | Menjalankan Usaha sesuai keputusan Direksi | Menjalankan Usaha sesuai keputusan Direksi | Bid HH, Satlit dan Unit Usaha | Terbentuknya unit usaha |
| | | 2. Minimnya kontribusi terhadap PAD karena masih diperlukannya subsidi dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dari Pemerintah Kota . | Perbedaan yang signifikan antara tariff jasa kebersihan saat ini dengan kondisi biaya riil. | Mendorong peningkatan tariff sesuai dengan kondisi riil melalui kajian-kajian akademis. | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian peningkatan tarif jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan biaya kebutuhan pelayanan umum Mengusulkan tarif progresif sebesar 2 % | Melakukan kajian secara berkala guna mendapatkan dokumen yang dijadikan pedoman untuk penagihan pelayanan umum (PSO) dan subsidi | Melakukan kajian secara berkala guna mendapatkan dokumen yang dijadikan pedoman untuk penagihan pelayanan umum (PSO) dan subsidi | Melakukan kajian secara berkala guna mendapatkan dokumen yang dijadikan pedoman untuk penagihan pelayanan umum (PSO) dan subsidi | Melakukan kajian secara berkala guna mendapatkan dokumen yang dijadikan pedoman untuk penagihan pelayanan umum (PSO) dan subsidi | Satlit dan Bidang Keuangan | Optimalnya penagihan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | 3. Terbatasnya anggaran penanganan sampah dan penerimaan jasa pengelolaan sampah. | Belum adanya detail perhitungan operasional persampahan khususnya yang terkait dengan Public Service Obligation sebagai dasar penagihan dan subsidi ke Pemkot Bandung serta belum memiliki mekanisme penagihan yang efektif. | Menyusun detail biaya operasional per aktivitas yang dijadikan dasar dalam pembuatan anggaran penanganan pengelolaan persampahan Pemerintah Kota Bandung yang berdasar pada perhitungan detail biaya pengelolaan sampah per unit. | Melaksanakan sistem akutansi dengan perhitungan biaya operasional per aktivitas kegiatan penanganan sampah (SAKETAP) | Melaksanakan sistem akutansi dengan perhitungan biaya operasional per aktivitas kegiatan penanganan sampah (SAKETAP) | Melaksanakan sistem akutansi dengan perhitungan biaya operasional per aktivitas kegiatan penanganan sampah (SAKETAP) | Melaksanakan sistem akutansi dengan perhitungan biaya operasional per aktivitas kegiatan penanganan sampah (SAKETAP) | Melaksanakan sistem akutansi dengan perhitungan biaya operasional per aktivitas kegiatan penanganan sampah (SAKETAP) | Bidang keuangan | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai SAKETAP |
| | | | Belum adanya program intesifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara optimal melalui | Ekstensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan unit bisnis lainnya yang masih belum memberikan | • Meningkatkan pemanfaatan dan penjualan hasil pengomposan kerjasama dengan PT. ERC dan pihak ketiga | • Meningkatkan pemanfaatan dan penjualan hasil pengomposan kerjasama dengan PT. ERC dan pihak ketiga | Meningkatkan pemanfaatan sampah organik dan non organik dengan pihak ketiga | Meningkatkan pemanfaatan sampah organik dan non organik dengan pihak ketiga | Meningkatkan pemanfaatan sampah organik dan non organik dengan | Bidang TPA dan bidang bisnis | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi pengomposan • Meningkatnya pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur | |
|----|-------|--------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | | sinergitas dengan pihak (instansi) lain serta belum termanfaatkan secara optimal dana <i>Corporate Social Responsibility</i> dari beberapa instansi besar. | kontribusi secara riil serta mencari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> dari beberapa instansi besar untuk meningkatkan pelayanan. | lainnya <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan sampah di <i>ex. Landfill</i> TPA Cieunteung dan Jelekong untuk lahan pengomposan kerjasama dengan PT. ERC Meningkatkan pelayanan penanganan sampah melalui bantuan prasarana dan sarana serta pengolahan dari para pengusaha melalui dana CSR | lainnya <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan sampah di <i>ex. Landfill</i> TPA Cieunteung dan Jelekong untuk lahan pengomposan kerjasama dengan PT. ERC Meningkatkan pemanfaatan sampah non organik dengan pihak ketiga | | | | pihak ketiga | | |
| | | | Belum optimalnya pendapatan dari sumber lain | Meningkatkan pelayanan pengumpulan sampah melalui pelayanan khusus | Persiapan pelayanan pengumpulan sampah melalui pelayanan khusus. | Embrio bisnis pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. | Unit bisnis pengelolaan sampah melalui pengumpulan | Sebagai sumber pendapatan perusahaan | Sebagai sumber pendapatan perusahaan | Unit bisnis | Meningkatnya pendapatan | |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|---|---|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | Membentuk unit bisnis | Sudah terbentuk usaha pemanfaatan sampah | Meningkatkan usaha pemanfaatan sampah | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis di bidang pemanfaatan sampah dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Bisnis di bidang Perbengkelan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis di bidang pemanfaatan sampah dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Bisnis di bidang Perbengkelan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba | <ul style="list-style-type: none"> Bisnis di bidang pemanfaatan sampah dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Bisnis di bidang Perbengkelan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba Penguatan bisnis di bidang pengelolaan kebersihan dapat memberikan keuntungan 40 % dari laba | Unit Bisnis | Meningkatnya pendapatan |
| | | 4. Adanya hutang Luar Negeri yang macet yang membebani keuangan perusahaan | Belum berakhirnya proses penyelesaian Hutang Luar | Pembentukan tim ad hoc yang khusus menangani hutang luar negerikepada | Pelaksanaan pembayaran sesuai penjadwalan | Pelaksanaan pembayaran sesuai penjadwalan | Pelaksanaan pembayaran sesuai penjadwalan | Pelaksanaan pembayaran sesuai penjadwalan | Pelaksanaan pembayaran sesuai penjadwalan | Keuangan | Penyehatan kinerja keuangan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | Negeri yang selalu membebani kondisi keuangan perusahaan. | Kementerian Keuangan melalui <i>system cut off, re-scheduling</i> , dan <i>take over</i> . | | | | | | | |
| | | 5. Nilai asset perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. | Belum optimalnya penataan asset yang ada yang disesuaikan dengan kondisi riil asset tersebut. | Penilaian ulang asset-asset yang dimiliki | Tersusunnya program restrukturisasi asset | Sertifikasi asset secara bertahap | Penertiban administrasi asset | Penertiban administrasi asset | Kepemilikan asset sesuai sertifikasi | Keuangan dan PTU | Jelasnya status kepemilikan asset perusahaan |
| 4. | Aspek Teknik dan Operasional 4.1. Penyapuan dan pengumpulan Sampah Jalan Utama | 1. Belum ada standar bersih terhadap penyapuan jalan dan fasilitas umum. | Belum dimilikinya perhitungan detail beban kerja penyapuan jalan yang akan menjadi dasar perhitungan tagihan <i>Public Service Obligation</i> | Menyusun detail biaya operasional penyapuan sampah dari hulu ke hilir sebagai dasar penetapan biaya per unit. | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penelitian terhadap penyapuan jalan untuk mengetahui biaya operasional penyapuan jalan per unit Mengusulkan ke Bappeda untuk mengakomodir standar penyapuan jalan per Km kedalam | <ul style="list-style-type: none"> Telah tersedianya standar biaya penyapuan jalan per unit Penagihan Publik service sesuai dengan panjang jalan yang di sapu dan dibersihkan | <ul style="list-style-type: none"> Telah tersedianya standar biaya penyapuan jalan per unit Penagihan Publik service sesuai dengan panjang jalan yang di sapu dan dibersihkan | <ul style="list-style-type: none"> Telah tersedianya standar biaya penyapuan jalan per unit Penagihan Publik service sesuai dengan panjang jalan yang di sapu dan dibersihkan | <ul style="list-style-type: none"> Telah tersedianya standar biaya penyapuan jalan per unit Penagihan Publik service sesuai dengan panjang jalan yang di sapu dan dibersihkan | <ul style="list-style-type: none"> Satlit Bidang keuangan Bidang Operasional SPI | Optimalnya penagihan PSO |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | kepada Pemkot Bandung. | | Harga Satuan Pemerintah Kota | | | | | | |
| | | 2. Teknis operasi penyapuan jalan belum optimal. | Belum dilakukannya perbaikan mekanisme sebagai upaya optimalnya efisiensi teknis operasional penyapuan jalan. | Melakukan perbaikan mekanismepada operasional. | Meningkatkan kualitas penyapuan jalan protokol dan kolektor | Meningkatkan kualitas penyapuan jalan protokol dan kolektor | Meningkatkan efektivitas penyapuan yang sesuai dengan SOP | Meningkatkan efektivitas penyapuan yang sesuai dengan SOP | Meningkatkan efektivitas penyapuan yang sesuai dengan SOP | Operasional | Kondisi Jalan bersih |
| | | 3. belum semua jalan kolektor dilakukan penyapuan. | kurangnya sarana mobil sapu yang sesuai dengankarakter jalan (lebar jalan, aktivitas di jalan tersebut). | Menambah jalur jalan yang disapu Meningkatkan kualitas penyapuan dan kebersihan jalan yang sudah dilakukan penyapuan maupun belum. | Jumlah mobil sapu eksisting 2 buah | Penambahan jumlah mobil sapu 2 buah | Penambahan jumlah mobil sapu 2 buah | Penambahan jumlah mobil sapu 2 buah | Tersedianya mobil sapu untuk setiap wilayah | Keuangan, PTU dan Operasional | Kondisi Jalan bersih |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | 4. Pembagian beban penyapuan jalan belum proposional. | <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga penyapu Belum dimilikinya standar beban kerja penyapu untuk masing-masing jalan yang menjadi beban <i>Public Service Obligation</i>. | Menyusun standar beban kerja penyapu untuk masing-masing jalan yang menjadi beban <i>Public Service Obligation</i> . | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenaga kerja penyapu Meningkatkan beban operasional penyapuan melalui dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenaga kerja penyapu Meningkatkan beban operasional penyapuan melalui dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenaga kerja penyapu Meningkatkan beban operasional penyapuan melalui dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenaga kerja penyapu Meningkatkan beban operasional penyapuan melalui dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenaga kerja penyapu Meningkatkan beban operasional penyapuan melalui dana CSR | Operasional | Kondisi Jalan bersih |
| | | 5. Sampah yang terkumpul masih tercampur antara sampah organik dengan sampah anorganik | Belum terpilahnya sampah di sumber, belum adanya penjadwalan pengumpulan sampah berdasarkan jenisnya, dan belum optimalnya sosialisasi pemilahan sampah di | Melakukan sosialisasi pentingnya pemilahan sampah di sumber secara konsisten dan berkembang. | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan dan melengkapi program penjadwalan pengumpulan sampah. Pemasangan papan pemberitahuan jadwal pengumpulan sampah di setiap TPS dan sosialisasinya. | Tertib pengumpulan dan pengangkutan di setiap TPS | Tertib pengumpulan dan pengangkutan di setiap TPS | Tertib pengumpulan dan pengangkutan di setiap TPS | TPS Bersih | Operasional dan HH | <ul style="list-style-type: none"> Pengangkutan efisien Meningkatnya pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|------|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | jalan. | | | | | | | | |
| | | 6. Kurangnya sarana dan prasarana pengumpulan sampah jalan. | Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengumpulan sampah (motor trida, tempat sampah). | Menambah jumlah sarana dan prasarana pengumpulan sampah (motor trida, tempat sampah, gerobak) secara bertahap | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksisting motor trida 43 unit Jumlah eksisting tempat sampah: 370 buah | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan motor trida untuk pengangkutan sampah hasil sapuan jalan Penambahan tempat sampah sebanyak 100 buah dan kekurangannya bantuan dari dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan motor trida untuk pengangkutan sampah hasil sapuan jalan Penambahan tempat sampah sebanyak 100 buah dan kekurangannya bantuan dari dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan motor trida untuk pengangkutan sampah hasil sapuan jalan Penambahan tempat sampah sebanyak 100 buah dan kekurangannya bantuan dari dana CSR | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan motor trida untuk pengangkutan sampah hasil sapuan jalan Penambahan tempat sampah sebanyak 100 buah dan kekurangannya bantuan dari dana CSR | Keuangan, PTU dan tehnik | Kondisi jalan bersih |
| 4.2. | Pemindahan Sampah | 1. Kurangnya lokasi TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara). | Keterbatasan lahan guna menjadi TPS. | Kerjasama/membrikan rekomendasi kepada pihak ketiga yang akan melakukan pengembangan area perumahan maupun komersial | Perbaikan 5 lokasi TPS | Perbaikan 5 lokasi TPS | Perbaikan 5 lokasi TPS | Perbaikan 5 lokasi TPS | Perbaikan 5 lokasi TPS | PTU dan tehnik | <ul style="list-style-type: none"> Tersedia lahan TPS TPS bersih dan tertata |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja /RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | untuk menyediakan TPS sendiri. | | | | | | | |
| | | 2. Meningkatkan volume sampah yang dikumpulkan di TPS. | Kurangnya lokasi SPA (Stasiun Peralihan Antara) dengan teknologi dalam proses pemindahan/ mesin press dan terbatasnya luas lahan TPS | Menambah lokasi SPA dengan teknologi mesin press sampah di TPS terhadap TPS yang luas lahannya memungkinkan. | Jumlah eksisting SPA: 2 | Penambahan 2 SPA menjadi 4 | Optimalisasi SPA | Optimalisasi SPA | Optimalisasi SPA | PTU dan teknik | <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya Ritasi Efisiensi beban pengangkutan |
| | | 3. Sampah yang dikumpulkan di TPS berserakan. | Kurangnya sarana container di TPS serta tidak tertibnya masyarakat dalam mengumpulkan sampahnya ke dalam | Pengadaan Container secara bertahap | Eksisting container 227 unit | Kebutuhan container: 280 | Kebutuhan container: 282 | Kebutuhan container: 286 | Kebutuhan container: 290 | PTU | TPS bersih dan tertata |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | container di TPS. | | | | | | | | |
| | | 4. Belum optimalnya pemilahan sampah di TPS | Belum diketahui secara pasti jumlah pengurangan sampah | Memperbaharui data jumlah pengurangan sampah di TPS | Melakukan survei timbulan sampah di TPS | Tersedianya data timbulan sampah yang dikelola PD. Kebersihan | Tersedianya data timbulan sampah yang dikelola PD. Kebersihan | Tersedianya data timbulan sampah yang dikelola PD. Kebersihan | Tersedianya data timbulan sampah yang dikelola PD. Kebersihan | Satlit | Terukuranya jumlah sampah yang dikelola |
| | | | Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat ke TPS masih tercampur. | Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik | Jumlah eksiting mesih pencacah: 5 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 10 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 15 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 20 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 25 buah | PTU dan operasional | Efisiensi beban operasional |
| | | | | Memfasilitasi pemulung di TPS. | Memfasilitasi pemulung di TPS.untuk melakukan pemilahan sampah | Memfasilitasi pemulung di TPS.untuk melakukan pemilahan sampah | Memfasilitasi pemulung di TPS.untuk melakukan pemilahan sampah | Memfasilitasi pemulung di TPS.untuk melakukan pemilahan sampah | Memfasilitasi pemulung di TPS.untuk melakukan pemilahan sampah | Unit bisnis | Efisiensi beban operasional |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja /RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | 5. Belum optimalnya penataan TPS | Keterbatasan pembiayaan untuk penataan TPS. | Melakukan penataan TPS menjadi TPS 3R. | Jumlah eksisting TPS 3R: 5 | Penambahan TPS 3R menjadi 10 | Penambahan TPS 3R menjadi 15 | Penambahan TPS 3R menjadi 20 | Penambahan TPS 3R menjadi 25 | Teknik dan TPA | Efisiensi beban operasional |
| | | | | Meningkatkan teknologi yang digunakan pencacahan, komposting dan biodigester. | Jumlah eksisting mesin pencacah: 5 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 10 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 15 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 20 buah | Penambahan mesin pencacah menjadi 25 buah | TPA | Efisiensi beban operasional |
| | 4.3. Pengolahan Sampah | 1. Detail perhitungan biaya operasional pengolahan sampah yang belum terukur secara pasti. | Belum adanya detail perhitungan biaya operasional pengolahan sampah secara khusus. | Menyusun detail biaya operasional pengolahan sampah dari hulu ke hilir sebagai dasar penetapan biaya per unit. | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam pengolahan sampah yaitu pengomposan, pencacahan dan biodigester Menetapkan penambahan lokasi pengolahan sampah atau 3R | Kajian biaya pengolahan | Terimplementasinya perhitungan biaya pengolahan | Terimplementasinya perhitungan biaya pengolahan | Terimplementasinya perhitungan biaya pengolahan | Satlit | Terukurnya biaya pengolahan sampah |
| | | 2. Hasil kompos belum dijadikan | Belum terpilahnya | Aktivasi penjadwalan | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana untuk sampah | <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi pasar kompos Intensifikasi | <ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi pemasaran kompos Menambah | <ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi pemasaran kompos Menambah | <ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi pemasaran kompos | Unit Bisnis | Meningkatnya pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | komoditi bisnis perusahaan | sampah secara optimal sebagai salah satu syarat pembuatan kompos yang baik. | pengumpulan sampah terpilah yang dapat memudahkan proses pengolahan sampah. | organik dan atau komposter di TPS 3R di 5 lokasi • Optimalisasi pengomposan di TPS 3R di 5 lokasi | pemasaran kompos • Menambah TPS 3R 5 Lokasi | TPS 3R 5 Lokasi | TPS 3R 5 Lokasi | • Menambah TPS 3R 5 Lokasi | | |
| | | | | Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat yang telah melakukan pengolahan sampahnya di sumber. | Memfasilitasi masyarakat yang telah melakukan pengomposan | Kerjasama pemasaran hasil kompos | Kerjasama pemasaran hasil kompos | Kerjasama pemasaran hasil kompos | Kerjasama pemasaran hasil kompos | Unit Bisnis | Meningkatnya pendapatan |
| | | 3. Terbatasnya tempat pengolahan sampah yang ada sebelum dikirim ke TPA. | Ketidak seimbangan jumlah sampah yang diolah dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang terbatas. | Memenuhi sarana dan prasarana pengolahan sampah dan meningkatkan pengelolaan 3R (Membuat Bank Sampah skala Kota) | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan kegiatan pemanfaatan sampah anorganik di TD Sekelimus Memfasilitasi pemulung terhadap kegiatan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis di TPS | <ul style="list-style-type: none"> Membuat Bank Sampah skala kota yang diintegrasikan dengan bank sampah skala RW dalam pemanfaatan sampah anorganiknya Mengadakan alat pencacah | <ul style="list-style-type: none"> Telah terbangunnya Bank sampah dan pemanfaatan sampah anorganik lebih optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah di TPS Telah termanfaatkannya Bank Sampah | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Bank Sampah Memperluas jangkauan nasabah bank sampah Mencari model pengolahan sampah anorganik yang efektif agar mendapat nilai lebih | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Bank Sampah Memperluas jangkauan nasabah bank sampah Mencari model pengolahan sampah anorganik yang efektif agar mendapat | TPA | <ul style="list-style-type: none"> Sampah yang dibuang ke TPA menurun Meningkatkan volume sampah yang diolah |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|------|-------------|---|-------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> sampah plastik 1 unit Mengoptimalkan mesin pengepresan sampah plastik di TPS Subang Mencari tempat pengolahan plastik/pabrik yang dapat membeli plastik hasil cacahan dan presan | <ul style="list-style-type: none"> nya mesin pencacah sampah plastik Dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan dari kontribusi pemanfaatan sampah anorganik | <ul style="list-style-type: none"> nilai lebih Meningkatkan pendapatan dari kontribusi pemanfaatan sampah anorganik | | |
| | | | | Pengintegrasian Bank Sampah kepada masyarakat luas yang menggunakan media kerjasama dengan pihak ketiga. | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi Bank Sampah skala RW Melakukan sosialisasi Bank sampah kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti sertakan pelatihan Bank sampah bagi pengelola bank sampah kota Mengintergrasikan Bank Sampah skala RW ke Skala Kota | Meningkatkan nasabah bank sampah skala kota | Meningkatkan nasabah bank sampah skala kota | Meningkatkan nasabah bank sampah skala kota | TPA | Terukuranya Jumlah sampah yang dimanfaatkan |
| 4.4. | Pengangkuta | 1. Detail perhitungan biaya operasional | Belum dimilikinya | Menyusun detail biaya operasional | <ul style="list-style-type: none"> Mereview biaya pengangkuta ke TPA | Terimplementasinya | Terimplementasinya | Terimplementasinya | Terimplemen tasikannya | Satlit | Tersedianya perhitungan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja /RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | n Sampah ke TPA | pengangkutan sampah yang belum terukur secara pasti. | detail biaya pengangkutan khususnya yang terkait dengan <i>Public Service Obligation</i> sebagai komponen biaya pengelolaan persampahan secara umum. | pengangkutan sampah dari hulu ke hilir sebagai dasar penetapan biaya per unit. | disesuaikan dengan kondisi saat ini • Tersedianya detail biaya operasional pengangkutan sampah ke TPA per unit kegiatan | perhitungan biaya pengangkutan sampah sebagai PSO | perhitungan biaya pengangkutan sampah sebagai PSO | perhitungan biaya pengangkutan sampah sebagai PSO | perhitungan biaya pengangkutan sampah sebagai PSO | | PSO terhadap biaya pengangkutan sampah |
| | | 2. Bertumpuknya sampah di TPS. | Kurangnya sarana pengangkutan sampah serta jarak TPA yang relatif jauh dan memerlukan waktu 3-4 jam per rit. | Menambah truk berupa <i>compactor</i> truk dan <i>Arm roll</i> truk secara bertahap | Kebutuhan truk 165 unit Jumlah eksisting truk (umur teknis dibawah tujuh tahun) sebanyak 65 Penambahan truk 2 unit Meningkatkan operasional | Kebutuhan truk 167 unit Jumlah eksisting truk 67 unit Penambahan truk 2 unit Meningkatkan operasional dan | Kebutuhan truk 169 unit Jumlah eksisting 69 unit Penambahan jumlah truk 2 unit Meningkatkan operasional dan | Kebutuhan truk 171 Jumlah eksisting truk 71 unit Penambahan jumlah truk 2 unit Meningkatkan operasional dan | Kebutuhan truk 173 Jumlah eksisting truk 73 unit Penambahan jumlah truk 2 unit Meningkatkan operasional | PTU | Bertambahnya jumlah truk Meningkatkan pelayanan Meningkatkan pendapatan |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja /RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|------------------|--|---|--|--|--|---|------------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | dan pemeliharaan Mengusulkan ke provinsi Jawa Barat dan CSR untuk bantuan truk | pemeliharaan Mengusulkan ke provinsi Jawa Barat dan CSR untuk bantuan truk | pemeliharaan Mengusulkan ke provinsi Jawa Barat dan CSR untuk bantuan truk | pemeliharaan Mengusulkan ke provinsi Jawa Barat dan CSR untuk bantuan truk | dan pemeliharaan Mengusulkan ke provinsi Jawa Barat dan CSR untuk bantuan truk | | |
| | | | | Menambah mesin press di TPS. | Mengoptimalkan mesin press di SPA Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage | Mengusulkan penambahan SPA Ke Kemen PU Mengoptimalkan SPA yang ada | Mengoptimalkan SPA yang ada | Megoptimalkan SPA yang adda | Megoptimalkan SPA yang adda | Bid teknik dan wilayah | Efisiensi beban operasional pengangkutan sampah |
| | | | | Mengajukan permohonan bantuan truk kepada pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR-nya. | Menyampaikan proposal kebutuhan truk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR | Menyampaikan proposal kebutuhan truk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR | Menyampaikan proposal kebutuhan truk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR | Menyampaikan proposal kebutuhan truk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR | Menyampaikan proposal kebutuhan truk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan CSR | Satlit | Efisiensi beban operasional pengangkutan sampah |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | 3. Optimalisasi penggunaan asset-aset pengangkutan sampah. | Belum optimalnya pola pengangkutan sampah yang berorientasi pada efisiensi operasi pengangkutan sampah. | Melakukan perbaikan mekanisme pada proses pengangkutan sampah. | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pola pengangkutan Pemetaan pola pengangkutan dengan menyusun prioritas angkutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pola pengangkutan. Melakukan pengaturan pola kerja angkutan | Tercapainya pola pengangkutan cepat, tepat dan lancar | Tercapainya pola pengangkutan cepat, tepat dan lancar | Tercapainya pola pengangkutan cepat, tepat dan lancar | Teknik dan PTU | Efisiensi beban operasional pengangkutan sampah |
| | 4.5. Pemrosesan Akhir Sampah | 1. Tidak memiliki TPA yang representatif yang berdampak pada meningkatnya <i>Tipping Fee</i> khususnya ketika terjadi perpindahan TPA baru. | Tidak adanya lahan yang memadai di Kota Bandung untuk dijadikan TPA, sedangkan TPA yang digunakan saat ini merupakan TPA regional yang dikelola oleh provinsi Jawa Barat (BPSR). | Meningkatkan pengomposan skala kota di eks TPA Jelekong | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume sampah organik yang diangkut eks TPA Jelekong Mencari teknologi pengomposan yang efektif dan efisien Meningkatkan atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai teknologi pengomposan yang efektif dan efisien | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume sampah organik yang diangkut eks TPA Jelekong Melakukan pengomposan dengan teknologi Menghasilkan kompos yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume sampah organik yang diangkut eks TPA Jelekong Melakukan pengomposan dengan teknologi Menghasilkan kompos yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume sampah organik yang diangkut eks TPA Jelekong Melakukan pengomposan dengan teknologi Menghasilkan kompos yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume sampah organik yang diangkut eks TPA Jelekong Melakukan pengomposan dengan teknologi efisien Menghasilkan kompos yang berkualitas | TPA Satelit HH | Meningkatkan produksi kompos yang berkualitas |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Membayar Tipping Fee atas pembuangan sampah ke TPA Sarimukti | Membayar Tipping fee sesuai sampah yang dibuang ke TPA | Membayar Tipping fee sesuai sampah yang dibuang ke TPA | Membayar Tipping fee sesuai sampah yang dibuang ke TPA | Membayar Tipping fee sesuai sampah yang dibuang ke TPA | Membayar Tipping fee sesuai sampah yang dibuang ke TPA | TPA | Efisiensi beban operasional |
| | | | | Membangun lokasi eks TPA Cieunteung menjadi tempat pengomposan skala kota. | Menata eks TPA Cieunteung | Membuat perencanaan pengolahan kompos di eks TPA Cieunteung | Melaksanakan kegiatan pengolahan kompos skala kota di eks TPA Cieunteung | Melaksanakan kegiatan pengolahan kompos skala kota di eks TPA Cieunteung | Melaksanakan kegiatan pengolahan kompos skala kota di eks TPA Cieunteung | TPA | Meningkatnya pendapatan |
| | | | | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | Mendukung rencana pembangunan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. | TPA | Efisiensi beban operasional |
| | | 2. Tren jumlah sampah yang masuk ke TPA meningkat. | Tidak optimalnya pemilahan | Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan | Mendistribusikan komposter dan tong | Mendistribusikan komposter dan tong | Mendistribusikan komposter dan tong | Mendistribusikan komposter dan tong | Mendistribusikan komposter | PTU dan HH | Mengurangi volume sampah yang |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|--|---|--|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | sampah di sumber yang merupakan penapisan sampah yang berdampak pada pengurangan jumlah sampah di TPA. | kegiatan 3R melalui berbagai program pengurangan sampah dan pengolahan sampah. | sampah kepada masyarakat secara simultan <ul style="list-style-type: none"> • Drum Komposter 40 Unit • Tempat sampah terpilah 1044 unit • Pejalan kaki 100 unit • Keranjang komposter 200 unit | sampah kepada masyarakat secara simultan <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah terpilah 150 unit • Tempat sampah pejalan kaki 150 unit • Drum komposter 50 | sampah kepada masyarakat secara simultan <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah terpilah 200 unit • Tempat sampah pejalan kaki 200 unit • Drum komposter 60 | sampah kepada masyarakat secara simultan <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah terpilah 250 unit • Tempat sampah pejalan kaki 250 unit • Drum komposter 70 | dan tong sampah kepada masyarakat secara simultan <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah terpilah 300 unit • Tempat sampah pejalan kaki 300 unit • Drum komposter 80 | | dikumpulkan di TPS |
| | | | | Meningkatkan jumlah TPS 3R, teknologi yang digunakan pencacahan, komposting dan biodigester serta sosialisasi aktif, konsisten, dan berkembang dari program 3R. | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan TPS 3R yang ada di 5 lokasi • Memperbaiki peralatan yang rusak untuk mendukung 3R | Menambah TPS 3R menjadi 5 lokasi kegiatan: Pemilahan, pencacahan dan biodigester | Menambah TPS 3R menjadi 5 lokasi kegiatan : Pemilahan, pencacahan dan biodigester | Menambah TPS 3R menjadi 5 lokasi kegiatan : Pemilahan, pencacahan dan biodigester | Menambah TPS 3R menjadi 5 lokasi kegiatan: Pemilahan, pencacahan dan biodigester | TPA | Jumah Lokasi TPS 3R meningkat |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat yang telah melakukan pengolahan sampahnya di sumber | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kemitraan dengan komunitas yang melakukan kegiatan 3R Kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kemitraan dengan komunitas yang melakukan kegiatan 3R Kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kemitraan dengan komunitas yang melakukan kegiatan 3R Kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kemitraan dengan komunitas yang melakukan kegiatan 3R Kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kemitraan dengan komunitas yang melakukan kegiatan 3R Kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga | HH | Meningkatnya volume sampah terolah |
| 5. | Aspek Peran Serta Masyarakat | 1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam partisipasi membayar jasa kebersihan | Belum ada database wajib bayar rumah tinggal dan terkininya database wajib bayar jasa pengelolaan sampah non rumah tinggal di Kota Bandung. | Peningkatan sosialisasi terhadap wajib bayar | Melakukan sosialisasi mengenai jasa pelayanan kebersihan | Melakukan sosialisasi mengenai jasa pelayanan kebersihan | Melakukan sosialisasi mengenai jasa pelayanan kebersihan | Melakukan sosialisasi mengenai jasa pelayanan kebersihan | Melakukan sosialisasi mengenai jasa pelayanan kebersihan | HH | Meningkatnya pendapatan |
| | | 2. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber yang masing | Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal | Melakukan sosialisasi dengan metode yang inovatif secara aktif, konsisten, | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerja sama sosialisasi dengan kelompok masyarakat Membuat konsep dan | <ul style="list-style-type: none"> Uji coba teknologi informasi berupa visualisasi mengubah model atau bentuk | Sosialisasi menggunakan teknologi informasi berupa | Terlaksananya sosialisasi menggunakan teknologi informasi | Terlaksananya sosialisasi menggunakan teknologi informasi | HH | Penumpukan sampah berkurang |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|---|---|--|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | sangat rendah. | pengelolaan sampah, belum optimalnya masyarakat untuk menjaga lingkungannya seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungannya masih rendah, belum optimalnya upaya pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, dan belum optimalnya kegiatan 3R di masyarakat | dan berkembang. Melakukan sosialisasi dan himbauan baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat | <p>rancangan teknologi informasi berupa visualisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai penanganan sampah dan peningkatan pendapatan melalui : <ul style="list-style-type: none"> › media cetak 18 Kali dalam setahun › media elektronik 36 Kali dalam setahun (TV, radio, Internet) › tatap muka 18 Dalam setahun › Penyebaran leaflet dan sejenisnya • Mengikuti pameran dan kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media | <p>prasarana dan sarana penanganan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai penanganan sampah dan peningkatan pendapatan melalui : <ul style="list-style-type: none"> › media cetak 36 Kali dalam setahun › media elektronik 72 Kali dalam setahun (TV, radio, Internet) › tatap muka 48 Dalam setahun › Penyebaran leaflet dan sejenisnya • Mengikuti pameran dan kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media | <p>visualisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai penanganan sampah dan peningkatan pendapatan melalui : <ul style="list-style-type: none"> › media cetak 36 Kali dalam setahun › media elektronik 72 Kali dalam setahun (TV, radio, Internet) › tatap muka 48 Dalam setahun › Penyebaran leaflet dan sejenisnya • Mengikuti pameran dan kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media | <p>berupa visualisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai penanganan sampah dan peningkatan pendapatan melalui : <ul style="list-style-type: none"> › media cetak 36 Kali dalam setahun › media elektronik 72 Kali dalam setahun (TV, radio, Internet) › tatap muka 48 Dalam setahun › Penyebaran leaflet dan sejenisnya • Mengikuti pameran dan kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media | <p>berupa visualisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai penanganan sampah dan peningkatan pendapatan melalui : <ul style="list-style-type: none"> › media cetak 36 Kali dalam setahun › media elektronik 72 Kali dalam setahun (TV, radio, Internet) › tatap muka 48 Dalam setahun › Penyebaran leaflet dan sejenisnya • Mengikuti pameran dan kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media | HH | Penumpukan sampah berkurang |

| No | Aspek | Permasalahan utama | Penyebab Masalah | Rencana perbaikan | Belanja / RAB Investasi/Pelaksanaan Kegiatan | | | | | Unit Penanggung Jawab | Manfaat Terukur |
|----|-------|--------------------|------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | lainnya | lainnya | lainnya | lainnya | kegiatan sejenisnya di tingkat kota • Pembuatan media lainnya | | |
| | | | | Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan 3R melalui berbagai program pengelolaan sampah. | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara terus menerus • Memberikan sarana 3R secara simultan | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara terus menerus • Memberikan sarana 3R secara simultan | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara terus menerus • Memberikan sarana 3R secara simultan | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara terus menerus • Memberikan sarana 3R secara simultan | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara terus menerus • Memberikan sarana 3R secara simultan | HH | Masyarakat yang melakukan 3R meningkat |

**LEMBAR PERSETUJUAN
ACTION PLAN PD KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG 2014-2018**

WALIKOTA BANDUNG

DIREKTUR UTAMA
PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

(M. RIDWAN KAMIL)

(CECE H. ISKANDAR)